

338.64
KDE
A 21



**PERSEPSI MASYARAKAT PERAJIN DAN INDUSTRI UKIR
KAYU JEPARA TERHADAP INVESTASI ASING
DAN POSISI TAWAR-MENAWAR DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

ISHVIATI JOENAINI KOENTI, SH
NIM : B.4A.096041

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Suyudi Mangunwiharjo
NIP : 130.324151

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPENOGORO
SEMARANG
1999**

**PERSEPSI MASYARAKAT PERAJIN DAN INDUSTRI UKIR
KAYU JEPARA TERHADAP INVESTASI ASING
DAN POSISI TAWAR-MENAWAR DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA**

Disusun Oleh :

ISHVIATI JOENAINI KOENTI, SH

NIM : B.4A.096041

Tesis Ini Telah Diterima

Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. H. Suyudi Mangunwihardjo

NIP : 130324151

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

NIP : 130350599

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, atas berkat rahmat-Nya, maka penyusunan Tesis ini telah dapat diselesaikan. Penyelesaian tesis ini bukanlah akhir dari segalanya, akan tetapi merupakan awal dari pergulatan keilmuan.

Tesis ini saya persembahkan kepada orang tua saya Iskandar Joenaini (Alm), Ibunda tercinta Murwatijah Iskandar, serta Bapak – Ibu Sarwoadi.

Kepada pembimbing saya yang sangat terhormat Prof. Dr. H. Suyudi Mangunwihardjo, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, atas kesediaannya membimbing saya dengan sabar di tengah kesibukan tugas-tugas yang selalu menyertainya.

Kepada Prof. Purwahid Patrik, SH. Dan Prof. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum , saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya selama saya menuntut ilmu. Terima kasih kepada Maha Guru- Maha Guru saya yang sangat terhormat : Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Prof. Soehardjo, SS (Alm)., Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH., Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH., Prof. Dr. Gunawan Setiardja, Prof. Dr. Miyasto, Prof. Dr. Erman Radjaguguk, Prof. Soetandyo Wignyo Soebroto, MA., Prof. Dr. Pieter Marzuki, SH., Dr. Soemantoro (Alm), Prof. Dr. Is Susanto, Dr. Esmi Warasih Pudji Rahayu, SH., MS., Drs. Wiratno, Mec. Yang telah membagikan ilmunya kepada saya.

Eko Soponyono, SH, MH, Eko Sabar Prihatin, SH. MH, saya mengucapkan terima kasih atas segala bimbingannya.

Tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada Bapak – Ibu Pegawai Adm. Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP, serta rekan-rekan peserta program HET angkatan XV UNDIP, terima kasih atas kerjasama yang tulus dan kekompakannya selama ini.

Kepada kakak saya , Mas Is, Mba' Dani dan Adik-adik saya Isvi dan Vari, serta Kakak dan Adik Ipar semua keponakan terima kasih atas dukungannya. Akhirnya, ucapan terima kasih secara khusus saya tujukan kepada Suami saya Beny Berbudi dan anak-anak terkasih Al-Ahya Faizal Abdullah dan Naufal Abduljabar, orang-orang yang selama ini mendampingi saya dalam suka dan duka.

Semarang, Juli 1999

ABSTRAK

Terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam tesis yang berjudul “Persepsi Masyarakat Perajin dan Industri Ukir Kayu Jepara terhadap Investasi Asing dan Posisi Tawar-Menawar dalam Perjanjian Kerjasama”.

Kajian sosiologi yang mencermati fenomena sosial dari masuknya investor asing pada kehidupan masyarakat Jepara, tidak hanya membawa implikasi dalam bidang ekonomi dan hukum saja, melainkan mengimbas pula pada bidang kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Secara sosiologi persepsi masyarakat perajin terhadap kehadiran investor asing dipengaruhi oleh kepentingan dan pengalamannya. Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat perajin dan industri ukir kayu Jepara menimbulkan adanya kelompok-kelompok masyarakat. Secara garis besar terdapat 2 kelompok yaitu kelompok yang menghendaki kehadiran orang asing dan kelompok yang tidak menghendaki kehadiran orang asing, dengan berbagai pertimbangan yang dipengaruhi oleh kepentingannya.

Posisi tawar-menawar pada perjanjian kerjasama sangat dipengaruhi oleh pola kerjasama yang dilakukan. Pada pola kerjasama dengan praktek Joint Venture di Jepara posisi para pihak sudah mengacu pada peraturan yang sudah ada. Namun kondisi faktual menunjukan bahwa kedudukan dan kewenangan para pihak dipengaruhi oleh komposisi saham, padahal partner lokal justru yang memiliki kemampuan dan teknologi.

Pola-pola kerjasama yang dilakukan atas dasar hubungan sub-kontraktor atau kemitraan atau jual-beli biasa, pada umumnya, kepentingan perajin dan “pengusaha rumahan” belum cukup terlindungi. Oleh karena itu maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang sifatnya terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat namun tetap mengkaji secara hati-hati perubahan-perubahan sosial masyarakat dengan maksud mengabdikan pada usaha-usaha memperingan beban kehidupan sosial dan memperhatikan harmonisasi masyarakat.

Potensi konflik kepentingan yang terdapat dalam kelompok-kelompok masyarakat dapat dilihat sebagai konsekuensi-konsekuensi positif untuk memunculkan suasana dialektika yang menguntungkan sistem.

ABSTRAC

There are set problems that be adapted in this thesses there have his title "The Perception of Craftsman Community and Jepara Wood Carving Industry to Foreign Investment and Bargaining Position Cooperation Contract"

The study of sociolegal that pay close attention to social phenomenon from arriving foreign investmen in life of Jepara community is not only take an implication in economy and law. It can also lead to effect in social culture.

Perception of craftsman community toward foreign investment was influenced by their importances bring and experiences scoording to sociology. Those importances bring about community group the one is a group which want to receive foreigner and the other didn't want to. This in influenced by their importance.

Bargaining in cooperation contract is very influenced by cooperation pattern. In cooperation pattern with Joint Venture in Jepara, all parties have refferced to that rule. Local partner have ability and technology, but the factual condition of position and competence of parties in influenced by stock composition. The cooperation pattern based on relation of sub-contractor or partner or trade. Generally the importance of craftsman and "home-industrialist" is not be protected yet. So it is important to have rules is open toward changes in community but keep studying changes in community and pay attention social life.

Conflict of importance in groups is shown as positive consequences which can lead to dialectican situation

It can be beneficial to system.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Sistematika Penulisan	33

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Motivasi dan Faktor-Faktor Pendorong Aktivitas Ekonomi	
Industri Kecil Kerajinan Masyarakat	36
A.1. Industri Kecil pada Aktivitas Ekonomi Masyarakat	36

A.2. Motivasi dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat	43
A.3. Elemen Dasar Orang Melakukan Tindakan Merupakan Pilihan Bagi Seseorang atau Kelompok dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi	46
B. Analisis Hubungan antara Masyarakat Perajin, Pengusaha Lokal, Pengusaha Asing dan Pemerintah	48
B.1. Strategi Dasar dalam Analisis Fungsional Taraf Menengah sebagai Upaya Proses Perubahan Sosial yang Teratur	48
B.2. Disfungsi, Konflik, sebagai Stimulus untuk Perubahan Sosial	51
B.3. Hukum sebagai Pengatur Konflik Sosial	58
C. Bentuk-Bentuk Kerjasama dan Posisi Tawar-Menawar dalam Kerjasama	75
C.1. Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian	75
C.2. Bentuk-Bentuk Kerjasama dan Posisi Para Pihak dalam Kerjasama	78
D. Campur Tangan Pemerintah dalam Kerjasama antara Partner Lokal dan Partner Asing Khususnya Perlindungan Pada Pihak yang Lemah	84

D.1. Campur Tangan Pemerintah dalam Kerjasama Patungan (Joint Venture)	85
D.2. Campur Tangan Pemerintah pada Kerjasama dengan Model Kemitraan/Sub-Kontraktor	90

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Motivasi dan Faktor-Faktor yang Mendorong Aktivitas Perajin dalam Perkembangan Usahanya	94
A.1. Perkembangan Usaha Kerajinan -Industri Ukir Kayu Di Jepara dan Idustri Perajin	94
A.2. Motivasi Perajin dan Faktor-Faktor Pendorong Aktivitas Perajin	100
B. Pengaruh Kepentingan Perajin Dan Pengusaha Lokal Terhadap Persepsinya pada Investor Asing di Jepara ...	104
C. Kerjasama Antara Perajin/Pengusaha Lokal Dengan Orang / Pengusaha Asing dan Posisi Tawar Menawar Para Pihak Dalam Kerjasama	118
D. Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Investasi Asing Di Jepara dan Implikasinya pada Pengawasan Terhadap Orang Asing	130

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	146
B. Saran-Saran	152

DAFTAR PUSTAKA	154
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	159
-------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

a. Kebijakan Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi.

Pemerintah Indonesia menempatkan sektor industri dan pariwisata sebagai sektor andalan yang diharapkan dapat memberikan kekuatan ekonomi pada masa yang akan datang.

Pembangunan Industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi yang tidak seimbang karena terlalu bercorak pertanian dan industri. Pembangunan industri ini ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber alam dan energi serta sumber daya manusia.

Adapun arah strategi kebijaksanaan pembangunan dibidang ekonomi berkisar pada lima masalah pokok yaitu :

1. Stabilitas ekonomi makro;
2. Penghapusan kemiskinan;
3. Pembangunan sumber daya manusia;
4. Industrialisasi;
5. Pengembangan industri skala menengah dan kecil.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka sasaran pembangunan hukum sangat diperlukan untuk bisa memberikan keseimbangan, yaitu diperlukan kesungguhan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat umum.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta keadaan tertib. Sebagian dari perangkat kerja sistem sosial, hukum melakukan tugasnya dengan menentukan prosedur yang harus dilaksanakan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 93).

Sejak berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri di tahun 1968, berbagai jenis industri telah tumbuh. Industri yang sudah ada semakin berkembang sedangkan industri baru bermunculan.

Pada waktu sebelum dasa warsa 1970-1980, para pembuat kebijakan kebanyakan negara-negara sedang berkembang menekankan pada kebutuhan untuk mempertahankan kontrol sosial nasional dan hati-hati sekali terhadap investasi asing untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan, seperti konsentrasi pasar yang meningkat, repratisasi keuntungan yang berlebihan, transfer pricing, transfer teknologi yang tidak layak, juga ketergantungan kepada impor teknologi asing.

Di dalam konsideran UUPMA (Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing) secara eksplisit ditegaskan bahwa modal asing dimanfaatkan secara

maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. Tetapi persoalannya adalah dengan perkembangan perekonomian dunia, ternyata UUPMA tidak dapat sepenuhnya menarik atau mengundang modal asing ke Indonesia, sementara modal asing menjadi “rebutan” di negara-negara sedang berkembang. Modal asing akhir-akhir ini merupakan suatu yang semakin penting bagi pembangunan suatu bangsa.

Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam kategori negara sedang berkembang turut memperebutkan modal asing bersama-sama dengan negara sedang berkembang lainnya. Dari masuknya modal melalui investasi asing pada proses industrialisasi ini diharapkan terjadi penguasaan akses ke pasar internasional, distribusi management dan pengalaman usaha.

Sarana yang ditempuh Indonesia untuk menarik investasi asing itu antara lain adalah dikeluarkannya kebijakan-kebijakan, melalui paket deregulasi di bidang PMA antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1993 tentang Jangka Waktu Perijinan, PP No. 50 tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan saham Dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka PMA, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan dari Menteri Penggerak dana Investasi dan ketua BKPM.

Dari kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh kebijakan deregulasi di bidang PMA dan arus lalu lintas manusia antar bangsa yang begitu longgar, maka akan menimbulkan berbagai keuntungan dan dampak-dampak yang menyertainya pula.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menarik investor asing antara lain adalah :

- a. Kebebasan dalam kepemilikan saham, termasuk dihapuskannya keharusan diinvestasi.
- b. Kebebasan menetapkan sendiri nilai investasi;
- c. Perlakuan sama dalam hukum dan kedudukan;
- d. Adanya jaminan berinvestasi dan berusaha;
- e. Diterima kehadirannya sebagai mitra pembangunan ;
- f. Birokrasi yang transparan dan lancar.

Dari latar belakang hal-hal tersebut di atas, maka dikeluarkan PP No. 20 tahun 1994 serta SK Menives / Ketua BKPM No.15 tahun 1994 yang dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mampu mengakomodasi kepentingan dunia usaha swasta, baik nasional maupun asing, akan menanamkan modalnya guna mendukung terciptanya sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Beberapa ketentuan penting yang tercakup dalam PP Nomor 20 tahun 1994 adalah :

- a. Penanaman modal asing dapat dalam bentuk :
 - (1) Usaha patungan antar modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia, dengan ketentuan peserta Indonesia harus memiliki paling sedikit 5% dari modal disetor sejak pendirian perusahaan PMA.

- (2) Investasi langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sejak produksi komersial, sebagian saham asing harus dijual kepada warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau pasar modal.

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan bagi investor asing diikuti pula dengan perluasan sektor yang dapat dimasuki modal asing. Pemerintah mengeluarkan daftar negatif sektor-sektor yang tertutup bagi modal asing.

Pengolahan kayu dan produk-produk kayu merupakan sektor yang terbuka baik negara asing.

Pada sektor pengolahan kayu ini Indonesia memiliki berbagai jenis produk, baik itu produk jadi maupun setengah jadi. Misalnya : Playwood, alat-alat rumah tangga maupun barang-barang yang berkaitan dengan barang-barang seni.

Jawa Tengah termasuk dalam wilayah yang diminati investor asing untuk mengembangkan modalnya. Jepara sebagai salah satu Kabupaten Dati II di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengolahan kayu menjadi barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kerajinan. Jepara ibarat memiliki harta karun yang tak ternilai harganya. Hal ini disebabkan karena adanya kemampuan membuat seni ukir yang secara alamiah diwarisi secara turun-temurun, dari generasi ke generasi. Pada umumnya mereka melakukan usahanya dengan jenis usaha industri kecil.

Baru kurang lebih 8 tahun yang lalu (1990), masuklah pengusaha asing ke Jepara. Datangnya orang-orang asing dengan membawa modal ke Jepara tersebut mengakibatkan kota Jepara yang semula sebagai kota kecil yang tenang, menjadi kota yang ramai dengan lalu lintas perdagangan yang cukup dikenal di dunia.

Masuknya investasi asing ke Jepara itu mampu merubah wajah kota Jepara menjadi kota Internasional. Cara yang dilakukan oleh investor asing untuk menanamkan modalnya di Jepara dapat dilakukan melalui asimilasi (menikah dengan orang pribumi), investasi melalui kerjasama dengan perjanjian di bawah tangan dan melalui PMA / PMDN. Atau mendirikan perusahaan asing murni non fasilitas.

Kedatangan investor asing menimbulkan semangat dan motivasi yang tinggi bagi para perajin dan industri kecil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksinya.

Namun perkembangan tersebut di atas, juga diikuti oleh permasalahan antara pengusaha mebel lokal dengan pengusaha asing. Adalah suatu dilema dalam mengizinkan orang asing untuk berwiraswasta sekaligus sebagai pembeli produk-produk kerajinan atau melakukan investasi asing serta keluar masuk di Jepara. Di satu sisi memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat namun pada sisi lain telah mengakibatkan kekhawatiran bagi pengusaha lokal akan terdesaknya posisi mereka. Pada kenyataannya, orang asing yang ada di Jepara baik sebagai pembeli, tenaga ahli maupun investor sedikit banyak telah menggeser kedudukan pelaku bisnis lokal. Di samping itu orang asing yang melakukan usaha di Jepara tidak seluruhnya memiliki ijin resmi melakukan usaha, tetapi sebagian dari mereka melakukan penyimpangan-

penyimpangan tentang status dan identitasnya, misalnya dengan ijin tinggal sementara atau turis, tetapi mereka melakukan usaha permebelan.

Melihat lajunya usaha pemerintah dalam menarik investor khususnya di Jepara ini memunculkan “issue” tentang perlindungan kepentingan nasional dalam hal ini kepentingan perajin / industriawan pribumi atau lokal. Hal ini wajar, mengingat semakin bebasnya investasi asing disuatu negara dapat memungkinkan semakin kompleksnya persoalan-persoalan yang harus dihadapi dalam kaitanya dengan kepentingan nasional.

Ada kekhawatiran bagi sebagian masyarakat, bahwa kehadiran orang-orang asing tersebut akan menimbulkan akibat tercerabutnya masyarakat dari akar budayanya.

B. Perumusan Masalah.

Dari kenyataan yang ada bahwa, investasi pada sektor industri kerajinan, khususnya ukir kayu di Jepara investor lebih menitik beratkan pada penyediaan modal tenaga manajerial sementara justru teknologinya dimiliki oleh perajin lokal, maka berkaitan dengan hal tersebut, guna kepentingan penelitian diajukan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Mengapa perajin termotivasi melakukan aktivitas penembangan usahanya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat perajin dan industri lokal terhadap masuknya investasi asing dibidang industri kerajinan kayu ?

3. Bagaimana hubungan kerja perajin dengan para investor asing dilakukan dan posisi tawar menawar para pihak ?
4. Bagaimana peranan Pemerintah dalam kaitannya dengan perlindungan hukumnya ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.

1. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat perajin.
2. Untuk mengkaji persepsi masyarakat perajin dan industri ukir kayu Jepara terhadap masuknya investasi.
3. Menggali dan mengkaji masuknya investasi asing terhadap meningkatnya usaha industri kecil dalam kerjasama dengan investor asing dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Bargaining Position para pihak .
4. Mengkaji akibat-akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhi bargaining dan campur tangan Pemerintah dalam hal perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.

Tesis ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan bagi Pemerintah selaku pemegang utama menentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan dibidang penanaman modal asing.
2. Hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Jawa Tengah, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

3. Dapat menjadi kajian untuk lebih memberdayakan posisi perajin lokal.

D. Metoda Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan ke arah fenomena yang telah dipilih oleh peneliti untuk menyelidikinya. Dengan demikian metode penelitian merupakan logika yang mengarahkan penelitian. Di dalam kajian ini diketengahkan suatu penelitian hukum yang mengkonsepsikan gejala hukum sebagai serangkaian pola-pola perilaku sosial yang terlembaga, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan *sociolegal research*. Dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukumnya, menjelaskan realitas empirik yang terjadi pada masyarakat.

Di sini hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang *riil* dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengerahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Hukum bukan dikonsepsikan sebagai *rules*, melainkan sebagaimana tersimak di dalam kehidupan sehari-hari. (Soetandyo Wignyosubroto, 1994 : 6). Konsep hukum ini kemudian dikaji dengan sosiologi hukum, mengkaji

“law as it is (human) actions, dengan metode mendoktrinner dengan pendekatan interaksional / mikro dengan analisis kualitatif.

Penelitian ini mencoba melihat dan meperlakukan responden atau sumber informasi untuk mengungkapkan data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini seperti apa adanya. Data-data atau informasi yang diperoleh dianalisis untuk mengungkapkan atau mempresentasikan deskripsi subyek yang diteliti sebagaimana adanya, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah ada. Setelah itu, sedapat mungkin dikemukakan teori-teori baru berdasarkan penarikan kesimpulan dari data-data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian.

2. Penentuan Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah : pertama Jepara merupakan pusat industri kerajinan ukir kayu yang sudah ada sejak jaman Majapait dan dalam perkembangannya menjadi sangat terkenal di dunia internasional, kedua dengan masuknya orang asing di Jepara menjadikan kota mengalami perubahan-perubahan antara karakteristik tradisional dengan kehidupan modern, sehingga membuat Jepara sangat spesifik.

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri dari 10 Kecamatan yang terdiri dari 36 Kalurahan dan Desa. Dari hampir seluruh Kabupaten Jepara tersebut banyak terdapat

perajin, perusahaan yang dikategorikan sebagai industri kecil, industri menengah dan industri besar, dengan menggunakan pengkategorian dari BPS.

Mengingat bahwa objek yang diteliti tidak memenuhi unsur homogenitas, maka pada penelitian ini menggunakan data kualitatif. Untuk mendekati objek penelitian digunakan cara purposive, artinya dipilih responden-responden yang memiliki ciri-ciri khusus atau variabel-variabel tertentu secara purposive, tidak diabetes oleh wilayah tertentu. Jadi responden tersebar di wilayah penelitian.

3. Penelitian dan Sumber Data.

a. Jenis Data .

Data yang dipergunakan adalah jenis data Primer dan data Sekunder.

b. Sumber Data.

Data primer yang digunakan bersumber atau diperoleh dari lapangan, yaitu dari : masyarakat perajin di Jepara yang meliputi para perajin dan tukang ukir, pengusaha kecil, pengusaha menengah / besar, pengusaha yang melakukan kerjasama dengan orang asing, dan pemerintah.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pada pengumpulan data ditentukan informan-informan yang diperoleh dengan teknik sampling purposive yaitu dipilih berdasarkan pada pengamatan, bahwa yang bersangkutan dapat memberikan informasi perihal yang diteliti. Dalam hal ini dijadikan informasi kunci terdiri dari :

1. Perajin ukir / pengusaha “rumahan”.

Dari informasi kunci dikumpulkan responden dari kalangan perajin / pengusaha rumahan sebanyak 50 orang.

2. Pengusaha lokal kelas menengah dan besar, sebanyak 3 pengusaha.
3. Investor asing sebanyak 3 pengusaha.
4. Dari kalangan Birokrat, dalam hal ini yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu :

- a. Aparatur dari Dep. Perindag.

Bp. Surpiyono Hardjono, Apt.

- b. Aparatur Pemerintah daerah.

Bp. Drs. Wayudi

- c. Aparatur Keimigrasian

Ka. Kanim Semarang, Bp. Johanes Sri Triswoyo, SH.

- d. Aparatur BKPM.

Bp. Soedarsono.

Selanjutnya informan-informan lain diperoleh dari informan kunci.

Ada tiga teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tiap-tiap sampling tersebut digunakan untuk mencari data atau informasi dari satuan pengamatan yang jamak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Secara rinci penggunaan teknik-teknik tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Observasi.

Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati kegiatan sehari-hari lingkungan masyarakat industri ukir kayu, dari kalangan perajin, pengusaha lokal, orang / pengusaha asing, aparaturnya dan masyarakat serta interaksi antara mereka. Baik aspek lingkungan sosial, maupun perilaku yang berkaitan dengan status masing-masing. Observasi dilakukan pula pada lingkungan perusahaan dan kegiatan organisasinya.

Tahap-tahap observasi.

- a. Observasi deskriptif, yaitu tahap eksplorasi secara umum yang mencakup semua aspek situasi sosial obyek penelitian.
- b. Observasi terfokus yaitu mengamati dengan lebih rinci dengan mempersempit fokus.
- c. Observasi terseleksi yaitu memperdalam pengamatan pada fokus yang sudah dipersempit.

Pada taraf observasi ini digunakan catatan-catatan dan dibantu dengan kamera, tape recorder atau alat mekanik lain.

2. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan sumber informasi, terutama dengan para perajin, pengusaha lokal dan investor asing, birokrat dan masyarakat.

Wawancara dilakukan secara :

- a. Terstruktur : yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan pada saat wawancara informan / responden.
- b. Tak terstruktur : yaitu wawancara secara umum, dengan berpedoman pada pokok-pokok saja untuk selanjutnya dikembangkan pada saat berlangsungnya wawancara.
- c. “Probing” untuk mengorek keterangan yaitu berusaha memperoleh keterangan yang lebih jelas atau lebih mendalam. Untuk kelancaran wawancara ini dipelihara “rapport” atau hubungan baik, dengan tujuan utama mendapatkan informasi. (S. Nasution, 1995 : 122).

3. Questioner.

Daftar pertanyaan berupa questioner digunakan untuk mendapatkan data pendahuluan.

4. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan statistik, foto dan dokumen-dokumen.

5. Alat-Alat Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini, alat-alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a. Daftar Pertanyaan.
- b. Catatan harian di lapangan.
- c. Tape Recorder.
- d. Kamera.

6. Teknik Pengecekan Validasi Data

Menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang dipakai di sini triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik, derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara .
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang dihadapan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Disamping itu juga dipakai triangulasi dengan metode yang meliputi dua strategi, yaitu :

- a. Pengecekan derajat kepercayaan pemenuhan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. (Lexi J. Moleong, 1995 : 178).

7. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar data-data atau informasi yang didapat, diperoleh pemahaman tentang sesuai tidaknya dengan tujuan penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data-data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan diskusi-diskusi, analisisnya dilakukan secara simultan dengan terlebih dahulu memilah data yang diperoleh berdasarkan kategori permasalahan, melakukan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Dapat dikemukakan bahwa penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika induktif.

E. Kerangka Pemikiran.

Dewasa ini muncul keinginan yang luas untuk memberdayakan usaha kecil. Berbagai program ditawarkan bagi pengembangan industri kecil, misalnya program kemitraan. Kerjasama antara perusahaan kecil dan perusahaan besar maupun antara

perusahaan-perusahaan kecil harus ditangani dengan baik. Hal ini sangat diperlukan demi tercapainya tujuan memberdayakan industri kecil, yaitu :

- a. Agar terjalin hubungan usaha erat antara usaha besar / menengah dengan usaha kecil berdasarkan asas saling butuh, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- b. Menciptakan nilai tambah, efisiensi dan produktivitas usaha bagi kedua pihak dan selanjutnya akan memperkuat ekonomi dan industri nasional.
- c. Menciptakan dan meningkatkan alih pengetahuan, ketrampilan, manajemen dan teknologi.
- d. Mitra usaha (usaha kecil) akan dapat menerima dan mengadaptasikan nilai-nilai dalam berusaha (budaya agraris ke industrial) seperti : perluasan wawasan, prakarsa dan kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan kedepan dan sebagainya. (UU No.9/1995 Tentang Usaha Kecil).

Dalam usaha kerjasama tersebut industri kecil dapat beradaptasi dalam kegiatan ekspor barang-barang non-migas. Untuk keperluan tersebut ditentukan cara-cara kerjasama agar dalam melakukan kerjasama mereka tidak merasa canggung. (Suyudi Mangunwihardjo, 1997 : 26).

Berdasarkan ciri-ciri tertentu, sektor-sektor industri dapat dibagi ke dalam 6 (enam kelompok). Adapun kelompok yang dimaksud adalah :

1. Industri pemupuk dana nasional.
2. Industri bernilai politis strategis.
3. Industri sekunder.
4. Industri yang berdasarkan ketrampilan tradisional.
5. Industri yang menghasilkan benda seni.
6. Industri pedesaan.

Tiap-tiap kelompok lingkungan masyarakat -berlain-lainan, sedangkan bidang usaha tergabung di dalamnya mempunyai ciri-ciri khas dipandang dari struktur usaha, peranan produk yang dibuat, besar modal dan tingkat teknologi, cara pemodalan, cara pemasaran dan cara pengelolaan. (Felix Oentoeng Soebagijo, dalam Soemantoro, 1987 : 148).

Pada pembahasan ini, yang perlu diketahui adalah bahwa kelompok industri yang berdasarkan ketrampilan tradisional, yang menghasilkan benda-benda seni dan kelompok industri-industri pedesaan, dapat digolongkan ke dalam industri kecil. (lihat misalnya SK Menteri Perindustrian No.350/M/SK/8/1980, dan SK Menteri Perindustrian No. 133/M/K/B/1979).

Dalam kaitannya dengan (usaha) industri kecil, dapat dilihat beberapa rumusan, seperti :

1. a. *Small Busines Administration* (SBA) di USA menetapkan agar suatu usaha dapat memperoleh fasilitas bantuan dari SBA, maka usaha tersebut harus memenuhi beberapa syarat : *Independenhly owned and operated ; no dominant in its field of operation meet the particuolar size standard of its*

industry or other area of operation ; operated for profit. (dikutip dari Prayogo Mirhad, 1975 : 5)

- c. Sedangkan kriteria yang dipergunakan SBA dalam menentukan *standard size* adalah : *The number of employees dollar volume of sales recaips ; assets size of firm*

Kriteria yang dipergunakan berbeda dari satu jenis industri ke industri yang lain, demikian juga berbeda dari satu program ke program yang lain.

Rumusan lain diusulkan oleh penelitian UNCTAD (United National Commission on Trade and Development); bahwa pengusaha kecil ialah mereka yang melakukan kegiatan dalam bidang usaha yang keadaannya apabila ditinjau dari segi permodalan, ketrampilan dan organisasi dan menejemen adalah sangat sederhana, akan tetapi mempunyai potensi dan prospek untuk ditingkatkan dengan bantuan dan pembinaan.

Adanya keterbatasan modal dan dunia usaha industri kecil, menimbulkan akibat terbatasnya pendapatan, sehingga kemampuan untuk memupuk modal sukar berkembang.

Oleh karenanya, pengembangan industri kecil sedikit banyak tergantung pada tersedianya bantuan pembiayaan dari Bank ataupun lembaga keuangan non perbankan lainnya. Praktek menunjukan beberapa kesulitan yang dihadapi oleh industri kecil dalam usaha mendapatkan kredit tersebut, karena tidak memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan perbankan.

Kecuali dalam bentuk uang, bantuan dapat juga diberikan dalam bentuk lain, misalnya alat-alat produksi yang diperlukan suatu usaha industri kecil. Kesulitan modal dapat juga disebabkan oleh manajemen keuangan yang kurang baik, sehingga walaupun banyak diantara mereka yang memperoleh bantuan modal dari bank maupun kreditur-kreditur lain, ternyata bantuan tersebut belum dapat membantu perkembangan usaha mereka.

Dari penelitian (LP3ES, 1978) , telah menunjukkan bahwa industri kecil berasal dari dan merupakan perwujudan kebudayaan masyarakatnya. Dengan demikian untuk mengetahui gejala-gejala yang ada padanya diperlukan penekanan tentang kebudayaannya. Namun mengingat industri kecil sebagai “ industri”, maka dalam hal ini merupakan subyek ekonomi, artinya sebagian besar pendekatan ialah teknis ekonomi.

Industri ukir kayu di Jepara mengalami perkembangan yang lambat meskipun tidak sampai mengakibatkan kemandegan (stagnasi), bahkan semakin berkembang walaupun merayap.

Pada tahun 1974, datang orang asing dari Inggris ke Jepara dan tertarik pada seni kerajinan kayu Jepara. (Pemda, 1985 : 77). Selanjutnya maka berkembang industri ukir kayu Jepara mengalami “masa bangkit kembali”. Masa bangkit kembali ini juga diungkapkan pula oleh Dawam Rahardjo dibidang kerajinan Batik. Dawam Rahardjo mengemukakan dalam penelitiannya mengenai kerajinan Batik pada tahun 1976, batik mengalami masa bangkit kembali (revival). (Dawam Rahardjo, 1976 : 157).

Dilihat dari hasil usaha pemasarannya, industri kecil belum menggunakan promosi penjualan yang sesuai, industri kecil memperoleh informasi pasar dari teman-temannya, sehingga sifatnya hanya meniru temannya. (Suyudi Mangunwihardjo, 1997 : 23). Oleh karena itu jangkauan pasar yang dicapai oleh industri kecil adalah pasar lokal. Sedang yang dapat mencapai pasar internasional merupakan sebagian kecil saja dari produk industri ukir-ukiran, kerajinan, kuningan dan sebagainya (ibid).

Tahun 1982, pengusaha Jepara sudah ada yang melakukan ekspor, namun perkembangan yang sangat pesat dimulai pada tahun 1990. Dalam kurun waktu yang cukup singkat, orang asing yang malang melintang di Jepara mencapai kurang lebih 2000 orang (Kompas 26 Juni 1997). Selain menjadi produsen, mereka aktif turun ke desa-desa membeli hasil mebel ukir dari pengrajin setempat dan memasarkan sendiri ke berbagai negara.

Interaksi yang terjadi dalam masyarakat industri belum tentu satu pihak dengan pihak yang lain akan sama-sama merasakan kepuasannya, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan daya reaksi yang berbeda-beda.

Perusahaan sebagai lembaga yang pada hakekatnya merupakan bagian dari masyarakat, keberadaannya adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan itu sendiri, maka setiap perusahaan perlu menciptakan terselenggaranya tanggung jawab sosial perusahaan. Hubungan yang serasi antara perusahaan dan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab sosial

perusahaan adalah menjadi suatu pola interaksi yang wajar oleh karena (Satjipto Rahardjo, 1986 : 12) :

- a. Industri telah menyerap sumber daya yang berasal dari lokalitas dan masyarakat tempat ia menjalankan usahanya.
- b. Muncul problema sosial dan kemanusiaan akibat beroperasinya perusahaan.
- c. Keberadaan perusahaan itu sendiri sebagai subsistem dalam totalitas sistem yang disebut masyarakat.

Dengan demikian bagi perusahaan dalam pola interaksi yang wajar terbeban tanggung jawab sosial baik dengan cara turut menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan pada umumnya. Apabila interaksi antara pengusaha dengan tenaga kerja dan lingkungan sosialnya tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan timbul perselisihan.

Konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, sedangkan masyarakat selalu berada pada proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Merupakan anggapan dasar bahwa setiap unsur dalam suatu masyarakat memberi sumbangan untuk terjadinya disintergrasi karena dominasi oleh kelompok orang-orang terhadap kelompok-kelompok yang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak dihadapi konflik-konflik antar pribadi pada tingkat mikro, tetapi yang ditekankan disini adalah konflik-konflik sosial yang bersumber pada struktur sosial termasuk yang terjadi secara tatap muka.

Konflik tersebut mungkin bukan cerminan ketidaksesuaian antar mereka, melainkan lebih sebagai cerminan ketidaksesuaian atau posisi antara kepentingan-kepentingan mereka seperti yang ditentukan oleh posisi mereka masing-masing (Doyle Paul Johnson, 1981 : 162).

Perubahan sosial dianggap sebagai gejala melekat dalam kehidupan setiap masyarakat dan bersumber pada faktor-faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial demikian terutama timbul karena adanya unsur-unsur yang paling bertentangan di dalam setiap masyarakat. Kontradiksi intern demikian bersumber pada pembagian wewenang (authority) yang tidak merata sehingga timbulnya dua kategori sosial dalam masyarakat, yaitu golongan wewenang. Pembagian wewenang yang bersifat dikhotomis demikian itu dianggap oleh para penganut pendekatan konflik menjadi sumber timbulnya konflik-konflik sosial, karena menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan secara substansial maupun mengenai arahnya. Yang dimaksud kepentingan di sini bukanlah kepentingan dalam arti subyek yang dirasakan oleh orang-orang akan tetapi kepentingan yang obyektif yaitu yang melekat pada kedudukan sosial tertentu. Dengan demikian dalam suatu masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan pihak untuk memiliki kekuasaan otoritatif yaitu kepentingan untuk selalu berada di dalam situasi konflik pula. Sementara itu konflik tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kenyataan bahwa di dalam setiap masyarakat selalu terdapat distribusi kewenangan yang terbatas. Konsekuensi yang timbul dalam suatu masyarakat ialah bahwa

bertambahnya wewenang pada suatu pihak berarti berkurangnya wewenang dipihak lain.

Struktur sosial adalah hasil konsensus anggota-anggota masyarakat (kemufakatan). Pada hakekatnya masyarakat itu teratur dan stabil. Keteraturan dan kestabilan itu karena kultur dan nilai bersama. Kultur dan nilai bersama meliputi nilai-nilai tujuan bersama, sehingga masalah penyimpangan di nilai sebagai mengingkari nilai-nilai bersama. Perluasan analisis Pason terhadap konsensus ini adalah karena konsensus saja tidak cukup untuk menempatkan suatu pola interaksi yang dapat berlangsung terus.

Sebagian besar analisis dalam Toward A General Theory of Action (TGTA) meliputi perkembangan berbagai kategori dan penggolongan sistem-sistem untuk menganalisis sistem-sistem tersebut variabel-variabel pola merupakan yang paling banyak diuraikan dan sering dijadikan acuan.

Variabel-variabel pola digunakan untuk menggolongkan orientasi-orientasi pelaku dalam sistem kepribadian, syarat-syarat normatif dalam sistem sosial dan pola-pola nilai dari sistem budaya. Dalam kerangka umum, orientasi seorang pelaku terdiri dari dua unsur dasar : orientasi motivasional dan orientasi nilai. Orientasi motivasi menunjukkan keinginan pelaku untuk memperbesar kepuasan dan menghindari sedapat mungkin kerugian. Salah satu aspek dari perhatian ini ialah usaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepuasan segera dan tujuan jangka panjang. Orientasi nilai menunjukkan standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan orang perorang dan yang menentukan prioritas dengan memperhatikan

kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda. Tiap-tiap unsur dari orientasi pelaku tersebut masih dibagi lagi dalam tiga dimensi, yaitu :

1. Orientasi motivasional :

- a. Dimensi kognitif
- b. Dimensi cathetic
- c. Dimensi evaluatif.

2. Orientasi nilai :

- a. Dimensi Kognitif
- b. Dimensi apresiatif.
- c. Dimensi moral.

Ketiga dimensi orientasi nilai mencerminkan pola-pola budaya yang telah diinternalisasikan oleh orang perorang. Dimensi ini dapat juga untuk mengelompokkan tiap-tiap aspek sistem budaya.

Variabel-variabel pola dalam *The Social System*, antara lain oleh Parson juga dianggap berhubungan dengan *persepsi* orang terhadap orang lain. Perhatiannya diletakan pada lingkup keterlibatan orang perseorangan dengan orang lain. Jika hubungan termasuk hak dan kwajibanya ditentukan secara ketat dan persis (hubungan kontrak) pola ini disebut *Specifity*. Tetapi bila hubungan itu saling memberi dan menerima kepuasan dalam kerangka yang luas dan cukup ada keleluasaan disebut pola *difuseness*. (J. Haryatmoko, 1986 : 33) .

Secara umum persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh sebagai cara menyimpulkan informasi dan penafsirannya (Jalaludin Rachmad, 1988 : 157).

Variabel-variabel pola digunakan juga untuk menganalisis tingkatan-tingkatan realitas sosial dan yang paling sering ialah untuk menganalisis tingkat interpersonal. Disamping itu relevan juga untuk menganalisis realitas sosial pada tingkat struktur sosial dan tingkat budaya.

Sementara perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motivasi . Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Motivasi bisa ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal, tergantung dari mana suatu kegiatan dimulai. Motivasi internal berasal dari diri pribadi. Seseorang akan dijelaskan oleh hierarki kebutuhan Maslow dan motivasi berprestasi Mc. Clelland.

Motivasi dapat dipandang sebagai psikologi dasar atas berbagai kebutuhan, dorongan dan tujuan. Pendekatan hubungan manusiawi tradisional pada umumnya tidak menyadari pentingnya proses psikologi ini. Pandangan tersebut didasarkan atas tiga asumsi sebagai berikut :

1. Personalia terutama dimotivasi secara ekonomis dan perasaan aman serta kondisi kerja yang baik.

2. Pemenuhan ketiga hal itu akan mempunyai pengaruh positif pada semangat kerja mereka.
3. Ada korelasi positif antara semangat kerja dan produktivitas.

Teori isi motivasi bermaksud untuk menentukan apa yang memotivasi orang-orang dalam pekerjaan mereka. Pada permulaannya banyak ahli berpendapat hanya uang yang memotivasi mereka (manajemen ilmiah), dan kemudian dirasa juga kondisi kerja, keamanan dan barangkali gaya supervisi demokratis (hubungan manusiawi). Lebih lanjut isi motivasi telah dipandang lebih dalam lagi dan dikenal apa yang disebut motif-motif dengan “tingkatan yang lebih tinggi”. Misalnya ; penghargaan, aktualisasi diri, pengakuan dan prestasi. (Soekanto Reksohadiprodjo, 1996 : 261-262).

Dari temuan penelitian Mudjahirin Thohir (1994) di tiga desa yaitu Sukodono, Tahunan dan Senengan Kecamatan Tahunan Jepara, keberanian membuka usaha sebagai perajin ukir (38,33%) baru mulai usahanya antara tahun 1976 – 1985 , (30%) umumnya dilatar belakangi oleh berbagai alasan yang saling mendukung. Alasan itu menyangkut pada lingkungan sosial, ketrampilan dan keberanian.

Faktor yang memberikan motivasi usaha para perajin adalah dimotivasi oleh perspektif kerajinan ukir itu sendiri. Pandangan optimistik terhadap masa depan usaha kerajinan ukir, nampak dari pengakuan secara umum (baik bagi perajin Senenan, Tahunan dan Sukodono) bahwa mereka memilih sebagai perajin ukir karena memiliki motivasi yang besar untuk bisa memperbaiki hidup (41,66%). Motif seperti itu menonjol di samping alasan mengikuti jejak teman.

Apabila mengalami kesulitan yang dirasakan menyangkut masalah tenaga kerja dan pemasaran, maka cara menyelesaikannya ialah dengan lebih agresif dalam mencari pembeli, pinjam kayu dan menaikkan upah buruh.

Pada perkembangan industri ukir kayu Jepara dari perajin atau industri ukir kayu kemudian terjadi kerjasama dengan investor asing. Kerja sama itu dapat dikategorikan dalam kerja sama atau kontrak secara legal dalam arti sesuai dengan peraturan yang ada, ada pula yang dilakukan dengan kerjasama terselubung

Beberapa prinsip dasar dari pada hukum kontrak di Indonesia, dikemukakan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka untuk mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Perjanjian tersebut mengenai sesuatu hal tertentu.
4. Perjanjian tersebut merupakan suatu sebab yang halal.

Jika suatu perjanjian melanggar ketentuan/ syarat –syarat tersebut di atas maka perjanjian tersebut adalah batal karena hukum.

Keempat syarat tersebut selanjutnya diuraikan dalam pasal-pasal berikutnya Pasal 1338 mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan atas ketentuan itu maka kontrak PMA dianggap sebagai *lexspesialis*, walaupun dalam kontrak PMA izin Pemerintah merupakan dokumen yang penting sebagaimana pentingnya kontrak antara para peserta dalam kerja sama patungan modal asing dengan modal nasional (Subekti, 1976 : hal . 14).

Pada kalimat dari pasal 1338 tersebut dinyatakan bahwa persetujuan yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dan Pasal 1339 menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan asas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Jika prinsip-prinsip dasar dari hukum kontrak tersebut diterapkan pada pelaksanaan kontrak kerjasama patungan yang didalamnya berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sifatnya transnasional, maka sejak diterbitkannya UUPMA serangkaian kegiatan kontrak yang baru muncul dan yang telah ada sebelumnya mengalami pengembangan-pengembangan.

Pembahasan hukum kontrak kerjasama patungan sebagaimana diuraikan terdapat banyak kaitan dengan hukum internasional / hukum transnasional.

Di Indonesia pengaturan hukum kontrak diatur di dalam beberapa macam hukum. Tergantung dari materi kontrak yang diatur. Sehingga ada hukum kontrak yang diatur dalam hukum Islam seperti dalam hal perkawinan menurut Islam; hukum adat mengatur masalah warisan menurut adat ; dan hukum perdata mengatur hubungan hukum ekonomi / perdagangan.

Dalam peristilahan terdapat beberapa perbedaan, yaitu antara perikatan, perjanjian, kontrak dan persetujuan. Dalam hal ini Prof. Soebekti telah memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
3. Persetujuan adalah merupakan kata lain dari perjanjian, karena kedua belah pihak itu bersetuju untuk melakukan sesuatu.
4. Kontrak adalah lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Pada pembahasan mengenai kontrak dan ruang lingkupnya sebagaimana dibahas oleh para ahli, dapat dicatat antara lain sebagai berikut :

Menurut Henry Cambell Black, kontrak dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara, tergantung dari unsur-unsur di dalamnya yang mendapatkan tekanan utamanya. Sehingga ada jenis kontrak yang *Communitative*, dan *independent*, *conditional*, *concentual*, *concentual and real*, *divisible and indivisible* dan sebagainya. (Henry Cambell Black, 1968 : hal . 395).

Penerapan hukum kontrak dalam praktek dunia usaha telah digambarkan di atas sebagai hal yang sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum sehari-hari.

Prof. Soebekti membahas aspek jual beli dan sewa menyewa yang dianggap sebagai yang paling banyak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. (ibid. : 92).

Sebelum membahas tentang kontrak kerjasama patungan dengan modal asing, terlebih dahulu menguraikan titik-titik kepentingan (point of interest) dari masing-masing peserta dalam pengaturan kontrak kerja sama untuk mengkaji pengalaman yang ada serta memikirkan pengaturan pola-polanya untuk masa-masa yang akan datang. Titik kepentingan dari peserta kerjasama patungan menyangkut lingkungan aspek hukum, ekonomi dan politik dari menyelenggarakan kerjasama dengan modal asing.

Pengaturan kontrak kerja sama patungan yang menjadi obyek untuk mengejar motif masing-masing peserta dapat dilakukan dalam (Sumantoro, 1984 : 163) :

1. Pembentukan usaha kerjasama patungan (PT).
2. Kontrak manajemen.
3. Perjanjian kerjasama teknik.
4. Perjanjian penggunaan hak / merk (*franchise and brand use*).
5. Perjanjian pemasaran.
6. Perjanjian patent dan merk dagang.
7. Perjanjian pembiayaan / pinjaman.
8. Perjanjian yang merupakan kombinasi antara perjanjian tersebut di atas.
9. Bentuk. Kontrak-kontrak lainnya.

Pada kerjasama yang dilakukan antara perajin / pengusaha lokal ukir kayu di Jepara dengan Investor asing perlu pengkajian yang mendalam. Ada kalanya

kerjasama yang dilakukan antara mereka tidak mengikuti atau tidak berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang digariskan, mengingat pembicaraan masalah hukum tidak terbatas pada struktur dan substansional saja, tetapi perlu melihat pada kultur hukumnya.

Jadi segala tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum itulah yang disebut budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh (positif atau negatif) kepada tingkah laku yang bertemali dengan hukum dan pranata-pranata hukum. (Lewrence M. Friedman, terjemahan Racmadi Joko Soemadio, 1969 : hal . 28).

Analisis terhadap kedudukan partner nasional dalam perusahaan Joint Venture (kerjasama patungan), dari hasil penelitian Ni Ketut Supasti Darmawan di Bali, mengemukakan bahwa kedudukan partner lokal menghasilkan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Partner nasional berkedudukan cenderung lemah terutama pada perusahaan-perusahaan yang partner asingnya memiliki gaya manajemen konservatif, serta pada partner nasional/yang keberadaannya hanya dibutuhkan sebagai persyaratan administratif, saham relatif kecil, dan kurang didukung profesionalisme dalam bisnis yang dijalankan.
2. Partner nasional berkedudukan proporsional sesuai kemampuan dan profesionalismenya yaitu umumnya berpartner dengan perusahaan multi nasional yang dimiliki manajemen yang berkelas dunia.

3. Kedudukan partner nasional menjadi dominan kuat yaitu pada partner nasional yang mengerti dan menguasai bisnis PMS pariwisata di Bali serta didukung oleh ide-ide cemerlang dan unik serta *goodwill*.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini dibagi dalam 4 bab :

Bab I : Pendahuluan.

Pada bab ini merupakan pengantar dalam pedoman untuk pembahasan bab-bab berikutnya. Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab. II : Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini membahas Toeri-teori yang digunakan sebagai dasar Analisis Penelitian.

A. Motivasi dan Faktor-Faktor Pendorong Aktivitas Ekonomi Industri Kerajinan Masyarakat.

A.1. Industri Kecil pada Aktivitas Ekonomi Masyarakat.

A.2. Motivasi dan Faktor-Faktor yang Turut Berpengaruh terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat.

A.3. Elemen Dasar Orang Melakukan Tindakan Merupakan Pilihan Individu atau Kelompok dalam Melakukan Aktivitas Ekonominya.

- B. Analisis Hubungan antara Masyarakat Perajin, Pengusaha Lokal, Pengusaha Asing dan Pemerintah.
 - B.1. Strategi Dasar Analisis Fungsional Taraf Menengah Sebagai Analisis Proses Perubahan Sosial yang Teratur.
 - B.2. Disfungsi, Konflik, sebagai Stimulus Untuk Perubahan Sosial.
 - B.3. Hukum Sebagai Pengatur Konflik Sosial.
- C. Bentuk-Bentuk Kerjasama dan Posisi Tawar Menawar pada Perjanjian kerjasama serta posisi tawar menawar para pihak dalam kerjasamanya.

Anak bab ini dimaksudkan untuk menguraikan beberapa prinsip dalam perjanjian yang dipaparkan sebagai berikut :

 - C.1. Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian.
 - C.2. Bentuk-Bentuk Kerjasama dan Posisi Tawar Menawar Dalam Kerjasama.
- D. Campur Tangan Pemerintah dalam Kerjasama Antara Partner Lokal dan Partner Asing Khususnya Perlindungan Pada Pihak yang lemah.
 - D.1. Campur Tangan Pemerintah dalam Kerjasama Patungan (Joint Venture).
 - D.2. Campur Tangan Pemerintah Dalam Kerjasama Pola Kemitraan / Sub-Kontraktor.

Bab.III : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini merupakan isi pokok dari laporan dan pembahasan yang memuat uraian mengenai analisis terhadap permasalahan yang ada, yang meliputi :

- A. Motivasi dan Faktor-Faktor yang mendorong Aktivitas Perajin dalam perkembangan Usaha Kerajinan Ukir Kayu.
 - a. Perkembangan Usaha Kerajinan Industri Ukir kayu di Jepara dan Identifikasi Masyarakat Perajin.
 - b. Motivasi dan Faktor-Faktor Pendorong Aktivitas Perajin.
- B. Pengaruh Kepentingan Perajin atau Pengusaha Lokal terhadap Persepsi Pada Investor Asing.
- C. Kerjasama antara Pengusaha / Perajin Lokal dengan Orang / Pengusaha Asing dan Posisi Tawar Menawar dalam Kerjasama.
- D. Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Investasi Asing di Jepara dan Pengawasan Terhadap Orang Asing.

.Bab. IV : Penutup.

Pada bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan serta dengan saran-saran berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Motivasi dan Faktor-Faktor Pendorong Aktivitas Ekonomi Industri Kecil Kerajinan Masyarakat.

A.1. Industri Kecil pada Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Dengan berbagai sifat-sifat yang ada pada industri kerajinan, maka pada umumnya industri tersebut termasuk dalam industri kecil. Industri kecil adalah berbagai macam usaha produksi melalui kegiatan industri untuk diperdagangkan, yang dikelola oleh tidak lebih dari 50 tenaga kerja, menggunakan mesin bertenaga 15 PK atau kurang dan modalnya tidak lebih dari 200 juta. (Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil : 1997).

Berdasarkan ciri-ciri tertentu sektor industri dapat dibagi ke dalam 6 (enam) kelompok, Adapun kelompok yang dimaksud adalah :

1. industri pemupuk dana nasional;
2. industri bernilai politis strategi;
3. industri sekunder;
4. industri yang berdasarkan ketrampilan tradisional;
5. industri yang menghasilkan benda seni;
6. industri pedesaan.

Tiap-tiap kelompok mencakup lingkungan masyarakat yang berlain-lainan, sedangkan bidang usaha yang tergabung didalamnya mempunyai ciri-ciri khas dipandang dari struktur usaha, peranan produk yang dibuat, besar, modal dan tingkat teknologi, cara permodalan, cara pemasaran dan cara pengelolaan. (Felix Oentoeng Soebagijo, dalam Soemantoro, 1987:148).

Anderson (1982),, mengetengahkan ada relasi antara perekonomian suatu negara dengan eksistensi usaha kecil. Anderson mengemukakan adanya relasi positif antara peningkatan "skala usaha industri" dengan tahapan industrialisasi suatu negara akan terjadi substitusi kedudukan skala usaha industri, yaitu dari industri rumah tangga ke industri kecil-menengah dan akhirnya industri besar. (Dennis Anderson, 1982: 69).

Di dalam kondisi ini, upaya mengenali usaha kecil di Indonesia tentu berangkat dari pengertian usaha kecil itu sendiri. Persoalannya kemudian adalah munculnya berbagai batasan pengertian tentang usaha kecil sebagai akibat dari banyaknya instansi dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan usaha kecil.

Ditengah keragaman pengertian itu, menarik untuk dicatat suatu fenomena yang tidak, dapat dipisahkan begitu saja dari catatan perjalanan usah akecil, yakni definisi yang disusun oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan kriteria BPS, industri skala kecil dicatat sebagai suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja antara 1-19 orang. Selain menggunakan batasan tenaga kerja, beberapa instansi lainnya mendefinisikan usaha kecil menurut nilai omzet atau nilai asset yang dimiliki suatu usaha (diluar tanah dan bangunan). Misalnya industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan dibawah 70 juta, investasi per tenaga kerja

maksimal Rp.625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang, serta memiliki asset perusahaan tidak lebih dari 100 juta. Sementara perusahaan kecil yang digolongkan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan atau jasa komersial memiliki modal kurang dari Rp.80 juta, dan perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industri memiliki modal Rp.200 juta. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memberikan batasan untuk industri kecil sektor industri dengan asset Rp.250 juta, tenaga kerja paling banyak 300 orang dan nilai penjualan (omzet) dibawah Rp.100 juta. Sedangkan batasan sektor perdagangan adalah modal kerja maksimal Rp.150 juta, tenaga kerja maksimal 300 orang dan nilai penjualan maksimal Rp.600 juta. (Gunawan Sumodiningrat, 1996, 41).

Menurut kriteria Departemen Keuangan usaha kecil adalah perusahaan yang mempunyai nilai asset (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) maksimal Rp.600 juta atau omzet maksimal Rp.600 juta. (Kep. Menteri Keuangan RI No.316/KMK.016/1994).

Kriteria industri kecil dapat dikelompokkan dalam kelompok industri kecil manufaktur dan kelompok industri yang berdasarkan ketrampilan tradisional, yang menghasilkan benda-benda seni dan kelompok industri pedesaan.

Mengenai industri kecil ini secara sosiologis dapat dikemukakan beberapa rumusan antara lain, rumusan yang diusulkan oleh UNSEL, bahwa industri kecil ialah mereka yang melakukan kegiatan dalam bidang usaha yang keadaanya apabila ditinjau dari segi permodalan, ketrampilan, organisasi dan manajemen adalah sangat sederhana, akan tetapi mempunyai potensi untuk dan prospek untuk ditingkatkan

dengan bantuan dan pembinaan. Bantuan dan pinjaman itu dapat berupa bantuan pembiayaan maupun manajemen dan teknologi.

Perbedaan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar menurut Vernon A. Musselman dan John H. Jackson dapat dilihat melalui : (Vernon A. Musselman & John H. Jackson, 1989, 196).

1. Umumnya usaha kecil dikelola oleh pemilik. Struktur organisasinya sederhana dan pemiliknya mengenal karyawannya, sedangkan perusahaan besar dikelola oleh bukan pemilik, struktur organisasinya kompleks dan pemilik hanya mengenal sedikit dari karyawannya.
2. Persentasenya tinggi kegagalannya rendah.
3. Sukar mendapat modal dalam jangka panjang sedang perusahaan besar modal jangka panjang biasanya relatif mudah diperoleh.

Survei yang dilakukan oleh Heller dan Roper terhadap lebih dari seribu perusahaan kecil di Amerika Serikat, berupaya mencari masalah utama bagi perusahaan kecil. Masalah yang paling sering dicantumkan adalah mengenai pencarian tenaga kerja yang berkemampuan tinggi, urutan ke-2 adalah Peraturan Pemerintah mengenai Pajak, urutan ke-3 adalah memotivasi karyawan. Masalah besar lainnya adalah kesulitan bahan baku, kemampuan bersaing dengan perusahaan besar dan mengatasi keterlambatan pembayaran hutang (karena piutang dagang sering macet).

Komunikasi perusahaan ini sangat kuat. Secara umum disimpulkan bahwa peranan industri kecil lebih dominan dalam penciptaan kesempatan kerja dibanding

dalam penciptaan nilai tambah. (studi Korns & Rowter, 1995) dan dibandingkan dengan Rahardjo (1993) menunjukkan antara tahun 1973 hingga tahun 1993, ternyata industri kecil dan rumah tangga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,2 juta orang dibandingkan industri besar dan menengah yang hanya 2,5 juta orang saja, (M. Dawam Rahardjo dan Facri Ali, dalam Kenneth James dan Narongchai Akrasanee, 1993, 122).

Pada perusahaan kecil aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. Keinginan yang kuat untuk mandiri;
2. Kemampuan menanggung resiko;
3. Kemampuan belajar dari pengalaman;
4. Motivasi diri;
5. Semangat bersaing;
6. Berorientasi ke arah kerja keras;
7. Kepercayaan pada diri sendiri;
8. Dorongan mencapai kemajuan;
9. Tingkat energi tinggi
10. Tegas.

John Sloan, menyatakan bahwa motivasi dalam manajemen adalah kualitas multifaktor. Dia mengatakan bahwa imbalan keuangan jelas merupakan salah satu jenis motivasi, kebebasan menjadi "pemilik perusahaan" adalah motivasi kedua dan

menjalankan apa yang orang lain mau menjalankannya adalah motivasi ketiga. (op.cit,203).

Sejalan dengan harapan agar usaha kecil memperoleh manfaat positif dari berlangsungnya globalisasi perdagangan dunia paling tidak ada 2 dimensi yang harus dilakukan yaitu :

1. Mempersiapkan kondisi internal usaha kecil agar siap menyongsong pasar yang terbuka;
2. Persiapan pemerintah dalam kerangka makro, yaitu penciptaan iklim kompetisi yang sehat antara usaha kecil dan usaha besar dalam bentuk kebijaksanaan persaingan (*competition policy*).

Persoalannya kemudian, kelemahan struktur yang dialami oleh usaha kecil di Indonesia dan telah berlangsung lama, tidak serta merta akan menyebabkan usaha kecil memperoleh manfaat yang positif. Berbagai studi dalam pengembangan usaha kecil di Indonesia menunjukkan bahwa usaha kecil mengalami kelemahan hampir di seluruh aspek, seperti pengadaan bahan baku, teknik produksi, manajemen, permodalan, pemasaran dan sumber daya manusia. (Marzuki Usman, 1998, 8).

Sejalan dengan harapan agar industri kecil memperoleh manfaat dalam perdagangan dunia, paling tidak ada dua dimensi mendasar yang seharusnya dilakukan Pemerintah. Dimensi pertama berkaitan dengan mempersiapkan kondisi-kondisi internal perusahaan kecil agar siap menyongsong peluang pasar yang terbuka. Kata kunci dari keseluruhan program bertujuan untuk memperkuat usaha kecil ini adalah koordinasi dan komprehensif. Dalam kenyataannya kata koordinasi ini masih

dijumpai bahwa dalam kenyataannya masing-masing instansi membuat kebijaksanaan dan program usaha kecil yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan instansi lain.

Dimensi lain yang harus disiapkan terletak dalam kerangka makro, yakni penciptaan iklim kompetisi yang sehat antara usaha kecil dan usaha besar dalam bentuk kebijaksanaan persaingan (*competitioni policy*). Hal ini tentunya berdampak kepada pengurangan fasilitas yang selama ini banyak dinikmati oleh usaha besar. Kebijakan kompetisi ini sendiri tidak selalu berarti usaha kecil memerlukan perlindungan dari pemerintah sepanjang waktu. Hal yang diperlukan adalah dorongan pemerintah kepada perusahaan besar agar mengalirkan subsidi kepada usaha kecil saat melakukan hubungan awal (baik sub-kontrak maupun vendor) yang pada gilirannya menghapus subsidi tersebut setelah usaha kecil kuat dan efisien.

Pada industri kerajinan kayu, menarik untuk diamati, mengingat bahwa dari beberapa aspek, industri ini termasuk pada kelompok industri kecil dan pedesaan, namun dalam perkembangannya kemudian industri ini mengalami perubahan yang luar biasa yang kemudian masuk dalam industri yang bermodal besar, berteknologi dan mempunyai cara-cara pemasaran dan pengelolaan yang modern.

Untuk menganalisis kondisi ini maka, pada penelitian ini akan di kaji motivasi dan faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan ini.

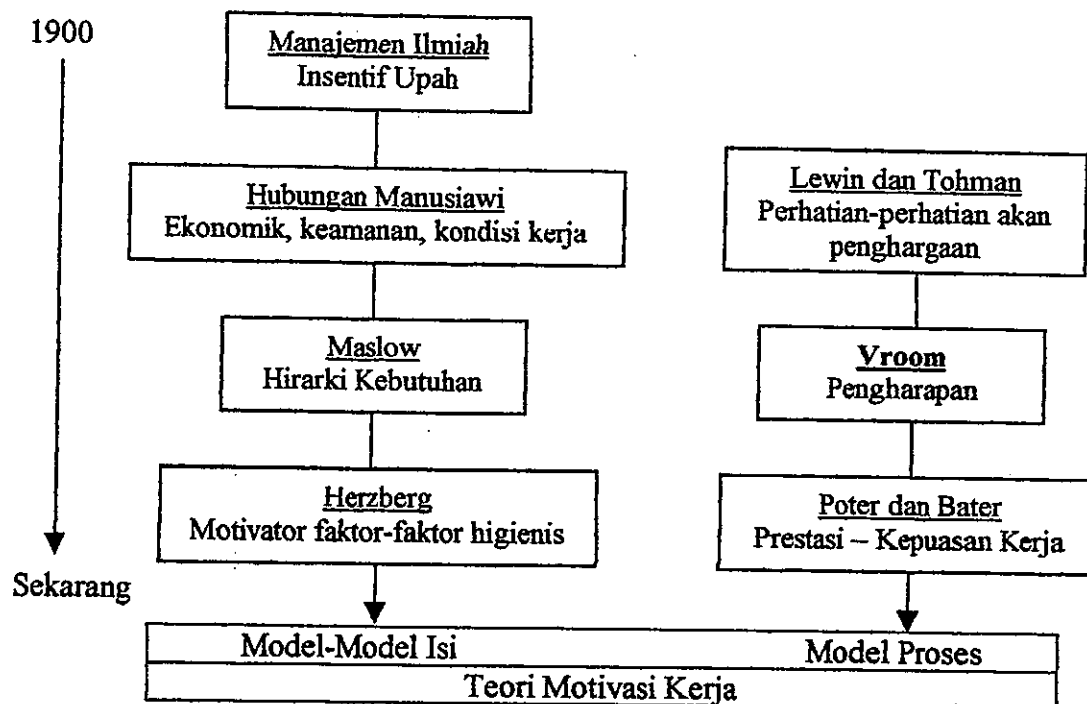
A.2. Motivasi dan Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat.

Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Motivasi bisa ditimbulkan oleh faktor-faktor internal atau eksternal, tergantung pada faktor-faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Motivasi manusia adalah jauh lebih kompleks dan kondisi daripada pendekatan ekonomi, keamanan dan kondisi kerja. Ada sejumlah variabel-variabel internal dan lingkungan yang mempengaruhi motivasi untuk bekerja.

Pertama kali perlu disadari bahwa ada korelasi antara kepuasan dan prestasi kerja, kemudian muncul teori Y dari Mc.Gergor yang disebut sebagai transisi ke pendekatan modern, dan selanjutnya dikemukakan konsep-konsep motivasi lainnya, seperti herarki kebutuhan w, teori dua faktor Herzberg, teori pengharapan Vroom, dan sebagainya.

Gambar 1 : menunjukkan perkembangan teori motivasi kerja, dan menunjukkan berbagai model.

(Sumber : Fred Luthans, *Organizational Behavior*, Mc.Graw –Hill Book Company, New York 1977



Motivasi bisa ditimbulkan oleh faktor-faktor internal atau eksternal, tergantung pada faktor-faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Motivasi adalah satu kekuatan pendorong di balik perilaku manusia, namun perlu disadari bahwa ada hal-hal lain yang mempengaruhi bagaimana dorongan itu diterjemahkan menjadi kinerja. Dalam faktor-faktor ini termasuk kemampuan, pelatihan, apa yang diharapkan dari pekerjaan mereka, kesempatan dan apakah mereka diperlakukan dengan wajar serta adil. Kalau seseorang mau bekerja keras, tetapi kemampuan dan pelatihan yang pernah diikutinya tidak cukup banyak, kita tidak dapat mengharapkan

suatu tingkat prestasi yang cukup tinggi. *Imbalan* (balas jasa) juga mempengaruhi prestasi. Kalau prestasi yang lebih baik diikuti oleh suatu imbalan (balas jasa) juga mempengaruhi prestasi. Peningkatan pendapatan dan pengalaman kerja kemungkinan akan dipandang tidak wajar, orang cenderung menjadi tidak puas dan berupaya mencari kemungkinan-kemungkinan lain untuk meningkatkan pendapatannya.

Salah satu faktor yang penting dalam mengevaluasi imbalan adalah persepsi atau bagaimana orang memandang sesuatu yang terjadi terhadap mereka. Kalau orang memandang sesuatu sebagai tidak adil, maka hal itu tidak adil bagi orang tersebut, walaupun orang lain menganggapnya benar-benar adil.

Persoalannya kemudian, kelemahan struktur yang dialami oleh usaha kecil di Indonesia dan telah berlangsung lama, tidak serta merta akan menyebabkan usaha kecil memperoleh manfaat yang positif. Berbagai studi dalam pengembangan usaha kecil di Indonesia menunjukkan bahwa usaha kecil mengalami kelemahan hampir di seluruh aspek, seperti pengadaan bahan baku, teknik produksi, manajemen, permodalan, pemasaran dan sumber daya manusia. (Marzuki Usman, 1998, 8).

Sejalan dengan harapan agar industri kecil memperoleh manfaat dalam perdagangan dunia, paling tidak ada dua dimensi mendasar yang seharusnya dilakukan Pemerintah. Dimensi pertama berkaitan dengan memperispakan kondisi-kondisi internal perusahaan kecil agar siap menyongsong peluang pasar yang terbuka. Kata kunci dari keseluruhan program ini adalah koordinasi dan komprehensif. Dalam kenyataannya kata koordinasi ini masih dijumpai bahwa dalam kenyataannya masing-

masing instansi membuat kebijaksanaan dan program usaha kecil yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan instansi lain.

A.3. Elemen Dasar Orang Melakukan Tindakan Merupakan Pilihan bagi Seseorang atau Kelompok dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi.

Teori Talcott Parsons yang umum mengenai tindakan sosial menekankan orientasi subyektif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu. Hal ini berlaku untuk tujuan-tujuan yang ditentukan individu serta alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Juga untuk memenuhi kebutuhan fisik yang mendasar pada pengaturan normatif.

Prinsip-prinsip dasar ini menurut Parson bersifat universal dan mengendalikan semua tipe perilaku manusia. Namun tujuan akhir suatu teori ilmiah tetap mengidentifikasi gejala dan mengembangkan katagori-katagori untuk mengklasifikasikan tipe-tipe khusus yang bervariasi. Bagaimana elemen subyektif yang terdapat pada individu-individu yang berbeda cocok satu sama lain atau menghasilkan tindakan-tindakan yang saling tergantung yang membentuk suatu sistem sosial ?

Sistem klasifikasi, variabel-variabel berpola mungkin dapat dipakai. Dalam kerangka umum itu orientasi orang yang bertindak terdiri dari dua elemen dasar yaitu : orientasi *motivasional* dan orientasi *nilai*. Orientasi *motivasional* menunjukkan pada keinginan individu yang bertindak itu untuk memperbesar

kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Satu segi dari masalah ini adalah untuk menyeimbangi kebutuhan-kebutuhan langsung yang memberikan kepuasan dengan tujuan-tujuan jangka panjang. Orientasi nilai menunjuk pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu (alat dan tujuan) dan prioritas sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda.

Masing-masing elemen dalam orientasi individu selanjutnya dibagi lagi ke dalam tiga dimensi yang berbeda-beda, masing-masing ada dalam setiap orientasi individu. Dimensi-dimensi itu adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Orientasi motivasional | 2. Orientasi nilai |
| a. dimensi kognitif | a. dimensi kognitif |
| b. dimensi katetik | b. dimensi apresiatif |
| c. dimensi evaluatif | c. dimensi moral |

Dimensi kognitif dalam orientasi motivasi pada dasarnya menunjuk pada pengetahuan orang bertindak itu mengenai situasi, khususnya kalau dihubungkan dengan kebutuhan dan tujuan-tujuan pribadi. Dimensi ini mencerminkan kemampuan dasar manusia untuk membedakan antara rangsangan-rangsangan yang berbeda dan membuat generalisasi dari suatu rangsangan dengan rangsangan lainnya. Dimensi katetik dalam orientasi motivasi menunjuk pada reaksi efektif atau emosional dari orang yang bertindak itu terhadap situasi atau pelbagai aspek di dalamnya. Ini juga mencerminkan kebutuhan dan tujuan individu. Umumnya orang memiliki reaksi emosional positif terhadap elemen-elemen dalam lingkungan itu yang memberikan

kepuasan atau dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan dan reaksi yang negatif aspek-aspek dalam lingkungan itu yang mengecewakan. Dimensi evaluatif dalam orientasi motivasi menunjuk pada dasar pilihan seseorang antara orientasi kognitif atau katetik secara alternatif.

Pelaku aktivitas ekonomi masyarakat memiliki motivasi yang menunjukkan dasar pemilihan bagi seseorang atau kelompoknya.

B. Analisis Hubungan antara Masyarakat Perajin, Pengusaha Lokal, Pengusaha Asing dan Pemerintah.

B.1. Strategi Dasar dalam Analisis Fungsional Taraf Menengah – Sebagai Upaya Proses Perubahan Sosial yang Teratur.

Pada penelitian ini analisis fungsional dipakai untuk memberikan suatu kerangka dalam melihat dilema-dilema kebijaksanaan sosial. Meskipun fungsionalisme ini merupakan suatu perspektif yang abstrak dan sangat umum, pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membahas pertanyaan-pertanyaan umum sebagai berikut : persyaratan mendasar apa saja yang harus dipenuhi untuk suatu masyarakat, atau sistem sosial apa saja supaya tetap bertahan sebagai suatu sistem masyarakat, atau sistem sosial apa saja, supaya tetap bertahan sebagai suatu sistem hidup dan bagaimana fungsi-fungsi ini dipenuhi ?. Juga untuk setiap pola perilaku tertentu apa saja yang meluas, apa kosekuensi-konsekuensi sosial atau pengaruh

setiap pola perilaku yang sesuai atau menyimpang, setiap kebiasaan atau norma, setiap keputusan kebijaksanaan yang besar, setiap nilai budaya dianalisis dalam kerangka fungsional.

Tujuan untuk menilai konsekuensi-konsekuensi sosial dari pola perilaku individu itu sangat mendasar dalam perspektif fungsional Robert Merton.

Tekanan pada fungsionalisme adalah pada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi supaya suatu sistem sosial (seperti masyarakat misalnya) bertahan, dan bukan kebutuhan-kebutuhan individu.

Analisis fungsional juga relevan dengan suatu pemahaman akan proses perubahan sosial, khususnya perubahan yang teratur. Sesungguhnya pandangan mengenai saling ketergantungan institusional mengandung implikasi bahwa kalau perubahan terjadi dalam satu institusi apa saja, akan menghasilkan perubahan dalam institusi-institusi lainnya.

Teori Talcott Parson yang umum sifatnya (*general theory*) mengenai tindakan sosial menekankan orientasi subyektif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu. Pilihan-pilihan ini secara normatif diatur atau dikendalikan oleh nilai-nilai dan standart normatif bersama. Hal ini berlaku untuk tujuan-tujuan yang ditentukan individu serta alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Juga dalam memenuhi kebutuhan fisik yang mendasar ada pengaturan normatifnya.

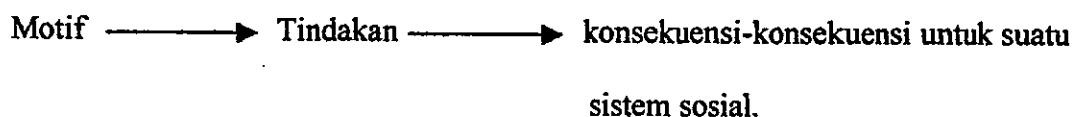
Prinsip-prinsip dasar ini menurut Parson bersifat universal dan mengendalikan semua tipe perilaku manusia. Meskipun suatu dasar yang kokoh bagi prinsip-prinsip universal itu penting sebagai titik tolak, tujuan akhir setiap teori

ilmiah adalah menjelaskan variasi-variasi yang mengidentifikasi elemen-elemen dasar yang membentuk gejala dan mengembangkan seperangkat kategori untuk mengklasifikasikan tipe-tipe khusus yang berbeda. Bagaimana elemen subyektif yang terdapat pada individu-individu yang berbeda cocok satu sama lain atau menghasilkan tindakan-tindakan yang saling tergantung yang membentuk suatu sistem sosial ?

Kalau teori Parson merupakan *general theory*, maka Robert K. Merton mengemukakan teorinya yang lebih mencerminkan kepekaannya yang lebih besar terhadap hubungan dinamis antara penelitian empiris dan proses berteori dari pada teori Parson. Robert K. Merton mengembangkan “teori-teori taraf menengah” (*theory of middle-range*).

Seperti Parson, Merton menekankan tindakan-tindakan yang berulang kali atau yang baku yang berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial dimana tindakan itu berakar. Tetapi tidak seperti Parsons, Merton tidak menaruh perhatian pada orientasi subyektif individu yang terlibat dalam tindakan, melainkan pada konsekuensi-konsekuensi obyektif.

Perbedaan antara motif dan fungsi atau konsekuensi sosial, dapat dilihat dalam diagram berikut :



Perbedaan antara motif dan fungsi ini dinyatakan Merton dalam perbedaan yang tajam antara *fungsi manifest* dan *fungsi laten*. Mengutip Merton *fungsi-fungsi manifest* adalah konsekuensi-konsekuensi obyektif yang menyumbang pada penyesuaian-penyesuaian terhadap sistem itu yang dimaksudkan (*intended*) dan diketahui (*recognized*) oleh partisipan dalam sistem itu; *fungsi laten* adalah yang tidak dimaksud dan tidak diketahui. (Robert K.Merton, 1968:105).

B.2. Disfungsi, Konflik sebagai Stimulus untuk Perubahan Sosial

Merton mengingatkan tidak boleh mengasumsikan bahwa semua pola tindakan harus mempunyai konsekuensi yang menguntungkan sistem, atau memenuhi persyaratan fungsional. Banyak tindakan yang dapat mempunyai konsekuensi yang bersifat *disfungsional* atau “Memperkecil penyesuaian-penyesuaian terhadap sistem itu” Alternatif yang lain, bahwa konsekuensi-konsekuensi dari banyak tipe tindakan mungkin irelevan dengan kesejahteraan atau bertahan hidupnya sistem itu; dengan kata lain tindakan itu adalah nonfungsional.

Adanyaberbagai kepentingan yang saling bertentangan antara kelompok dan organisasi yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat kompleks serta kelangkaan sumber-sumber, maka pola pola adaptasi yang fungsional untuk satu kelompok atau kelompok segmental dalam masyarakat mungkin disfungsional yang lain.

Untuk menganalisis kelompok dan organisasi pada penelitian ini yaitu kelompok perajin, pengusaha lokal, investor dan pemerintah, maka adaptasi kelompok satu dengan lainnya kemungkinan terjadi disfungsional.

Interaksi yang terjadi dalam aktifitas ekonomi masyarakat belum tentu satu pihak yang lain akan sama-sama merasakan kepuasannya, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan daya reaksi yang berbeda-beda.

Perusahaan sebagai lembaga yang pada hakekatnya merupakan bagian dari masyarakat, keberadaannya adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat, maka setiap perusahaan perlu menciptakan terselenggaranya tanggung jawab sosial. Hubungan yang serasi antara perusahaan dengan lingkungan adalah suatu pola interaksi yang wajar oleh karena : (Satjipto Rahardjo, 1986 : 12)

- a. Industri telah menyerap sumber daya yang berasal dari lokalitas dan masyarakat tempat ia menjalankan usahanya.;
- b. Munculnya problem sosial dan kemanusiaan akibat beroperasinya perusahaan;
- c. Keberadaan perusahaan itu sendiri sebagai subsistem dalam totalitas sistem yang disebut masyarakat.

Dengan demikian bagi perusahaan dalam pola interaksi yang wajar terbeban tanggung jawab sosial baik dengan cara turut menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan pada umumnya. Apabila interaksi antara pengusaha dengan tenaga kerja dan lingkungan sosialnya tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan timbul perselisihan.

Konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, sedang masyarakat selalu berada pada proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Dan merupakan anggapan dasar bahwa setiap unsur dalam suatu masyarakat memberi

sumbangan untuk terjadinya disintegrasi dominasi oleh kelompok orang-orang terhadap kelompok orang-orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak dihadapi konflik-konflik antara pribadi pada tingkat mikro. Tetapi yang ditekankan di sini adalah konflik-konflik sosial yang bersumber pada struktur sosial termasuk yang terjadi secara tatap muka.

Konflik tersebut mungkin bukan cerminan ketidaksesuaian antara mereka, melainkan lebih sebagai cermin ketidaksesuaian posisi antara kepentingan-kepentingan mereka seperti yang ditentukan oleh posisi mereka masing-masing.

Untuk tujuan ini, teori konflik juga penting karena menekankan kenyataan sosial di tingkat struktur sosial dari pada tingkat individual, antar pribadi atau budaya. Seperti halnya fungsional, beberapa implikasi teori konflik yang penting membentang ke berbagai tingkat kenyataan sosial lainnya. Tingkat antara pribadi khususnya dapat dianalisis dengan mudah menurut prinsip-prinsip yang banyak dikembangkan dalam teori konflik. Dalam pengalaman sehari-hari tentu kita menghadapi antar pribadi pada tingkat mikro. Tetapi, tekanannya adalah pada konflik-konflik sosial yang bersumber pada struktur sosial, termasuk yang terjadi secara tatap muka. Misalnya konflik, yang mungkin terjadi pada pengusaha lokal, perajin / buruh, investor asing dan Birokrasi. Mungkin bukan cermin dari kebencian pribadi antara mereka melainkan lebih sebagai cerminan ketidaksesuaian atau posisi mereka masing-masing dalam usaha itu.

Para ahli teori konflik, tidak harus mengabaikan sama sekali nilai norma budaya, tetapi mereka lebih cenderung melihat nilai dan norma sebagai ideologi

yang mencerminkan usaha kelompok-kelompok dominasi untuk membenarkan berlangsung terusnya dominasi mereka.

Perubahan sosial dianggap sebagai gejala yang melekat dalam kehidupan setiap masyarakat dan bersumber pada faktor-faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial demikian terutama timbul karena adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam setiap masyarakat. Kontradiksi intern demikian bersumber pada pembagian wewenang (authority) yang tidak merata sehingga timbulnya dua kategori sosial dalam masyarakat, yaitu golongan yang memiliki wewenang dan golongan yang tidak memiliki wewenang. Pembagian wewenang yang bersifat dikotomi demikian itu dianggap oleh penganut pendekatan konflik menjadi sumber timbulnya konflik-konflik sosial, karena menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan secara substantial maupun mengenai arahnya. Yang dimaksud kepentingan di sini bukanlah kepentingan dalam arti subyektif yang dirasakan oleh orang-orang akan tetapi kepentingan yang obyektif yaitu yang melekat pada kedudukan sosial tertentu. Dengan demikian dalam suatu masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan pihak untuk memiliki kekuasaan otoritatif yaitu kepentingan untuk selalu berada di dalam situasi konflik pula. Sementara itu konflik tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kenyataan bahwa di dalam setiap masyarakat selalu terdapat distribusi kewenangan yang terbatas. Konsekuensi yang timbul dalam suatu masyarakat ialah bahwa bertambahnya wewenang pada suatu pihak berarti berkurangnya wewenang pihak lain. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1981 : 9 – 10).

Coser mengihtarkan untuk mempertemukan implikasi-implikasi dari fungsionalisme dan teori konflik. Dia mengemukakan bahwa proses konflik dipandang dan diperlukan sebagai sesuatu yang mengacaukan atau disfungsional terhadap keseimbangan sistem itu keseluruhan. Tekanan yang berat sebelah pada integrasi yang selaras yang didasarkan pada konsensus normatif diungkapkan, demikian argumentasinya, dalam karya Parson keseluruhan dan juga dalam bidang-bidang sosiologi lainnya.

Menurut yang mendasarkan pada analisis Simsel, konflik merupakan salah satu bentuk interaktif sosial yang mendasar, dan bahwa proses konflik dihubungkan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerjasama dalam berbagai cara yang bersifat kompleks. Coser menekankan bentuk-bentuk konflik dan interaksi lainnya tidak dalam tingkat antar pribadi, tetapi lebih pada konsekuensi-konsekuensi konflik itu sebagai keseluruhan untuk sistem sosial yang lebih besar dimana konflik terjadi.

Coser mengakui bahwa semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme tertentu, ketegangan atau perasaan-perasaan negatif. Tidak terelakannya ketegangan-ketegangan dan perasaan-perasaan negatif merupakan hasil dari keinginan individu untuk meningkatkan kesejahteraannya kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau penghargaan-penghargaan lainnya. Karena banyak dari penghargaan-penghargaan yang dikejar itu adalah langka, suatu tingkat kompetisi tertentu tidak dapat dielakkan. Juga untuk penghargaan seperti dukungan sosial yang tidak sama sejenis kelangkaannya dengan penghargaan materiil, masih akan ada Keinginan-keinginan untuk memperbaiki posisi seorang

dibandingkan dengan yang lainnya. Ketegangan dalam semua hubungan sosial terjadi karena perbedaan dalam kebutuhannya, tujuan pribadi, ketrampilan, kemampuan dan seterusnya.

Pada tingkat yang lebih luas konflik dapat ditinjau apakah konflik itu menyangkut prinsip-prinsip dasar atau isu-isu yang sekunder. Menekan konflik tidak menghilangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Strategi untuk menghadapi konflik itu ada bermacam-macam, tergantung pada tingkat atau besarnya birokratisasi dalam kelompok itu. Dalam organisasi birokratis yang besar, prosedur yang resmi mungkin dapat dikembangkan untuk merembukkan perbedaan-perbedaan itu. Misalnya prosedur perundingan kolektif dikembangkan dalam organisasi industri untuk merundingkan perbedaan paham antara pengusaha besar, pengusaha asing dan perajin (mitra usahanya).

Fungsi konflik yang bersifat integratif itu sangat jelas dalam kelompok atau organisasi dimana ada kerangka konsensus yang lebih luas mengenai ketidaksepakatan yang terjadi. Sering kali kerangka konsensus umum mengenai masalah pokok hancur, sehingga tidak ada dasar untuk kesatuan kelompok, konflik internal dapat mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan kelompok. Tetapi rusaknya konsensus yang utama mengenai masalah-masalah pokok agak berkurang kalau perasaan antagonistik dan ketidaksepakatan dibicarakan secara terbuka dari pada dipendam. (Doley Paul Johnson, 1981 : 200)

Coser membuat perbedaan yang penting dalam hubungan ini antara konflik yang realistik dan mono realistik. Konflik realistik merupakan suatu alat untuk suatu tujuan tertentu, yang kalau tujuan itu tercapai mungkin akan

menghilangkan sebab-sebab dari konflik itu. Sebaliknya konflik yang nonrealistik mencakup ungkapan permusuhan sebagai tujuannya sendiri. Konflik lebih cenderung bersifat realistik daripada diterima secara eksplisit daripada diingkari dan kalau posisi seperti mengarah ke perundingan mengenai perbedaan-perbedaan dari pada menekannya.

Konflik realistik sering merupakan rangsangan utama untuk perubahan sosial. Perubahan seperti itu dapat menguntungkan sistem, dengan memberikannya kebebasan untuk mengatasi dengan lebih efektif perubahan-perubahan dalam lingkungannya. Atau perubahan dapat menghasilkan suatu kepekaan terhadap kebutuhan pribadi anggota sistem itu, dalam hal ini komitmen terhadap sistem cenderung baik. Secara keseluruhan, membiarkan konflik yang realistik dan mengembangkan prosedur untuk mengatasinya membantu mempertahankan semangat hidup dari sistem itu, dan menghindarkannya dari tekanan untuk mempertahankan semangat hidup dari sistem itu, menghindarkannya dari kemerosotan menjadi suatu sistem yang sangat kaku yang tidak mampu menanggapi tekanan untuk perubahan atau kebutuhan pribadi anggota-anggotanya.

Fungsi positif dari konflik adalah merangsang perubahan sosial yang dibutuhkan. Sementara dapat dilihat kalau ada prosedur yang mantap untuk menerima dan merembukkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan itu kekerasan mungkin satu-satunya pilihan, sehingga kelompok yang dirugikan dalam masyarakat itu dapat didengar suaranya.

B.3. Hukum Sebagai Pengatur Konflik Sosial .

Hukum pada dasarnya didirikan sebagai alat untuk memecahkan atau menghindarkan perselisihan dengan : (Scwartz dan Skolnik, dalam Austin T. Truk, 1988 : 162).

- a. Menegaskan persyaratan ide keadilan (diungkapkan sebagai persyaratan bagi terpeliharanya interaksi dan organisasi kehidupan sosial bagi yang terus berlangsung.
- b. Mengendalikan mereka yang tindakannya tidak cocok dengan persyaratan yang disebut dalam huruf (a) di atas.

Pada penelitian socio-legal tujuan-tujuan penelitian adalah bagaimana konsep hukum, institusi dan proses berfungsi dari hukum dalam mencegah, memperkecil dan mencegah konflik, bagaimana mekanisme non-legal komplementer, dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai lebih efektif. Tidak disangkal pula bahwa hukum kadang-kadang mendukung manajemen konflik atau bahwa pencarian keadilan dan memperoleh ketertiban sosial adalah tindakan terhormat dan penting.

Melalui proses pengetahuan sosial, pengalaman interaksi dirubah menjadi kerangka perspektif normatif bersama yang memaksa perilaku dengan menegaskan persediannya dan arti beberapa alternatif perilaku. Bukannya pada pembuatan struktur sosial kekuasaan pelaksana, maka dampak hukum yang mengikat lebih didapati pada ketergantungan pada penerimaan nilai interaksi yang berlanjut dan penerimaan realitas dan kegunaan kerangka kerja normatif termasuk peraturan prosedural untuk menetapkan arti dan dapat diterapkannya khusus. Walaupun pencapaian ketertiban dengan cara tersebut sebagaimana cara apapun

lainnya, dianggap sebagai masalah kadar, menegaskan kemungkinan empirik ketertiban hukum yang tidak dipaksakan. (Michel Barkun, dalam Austrin T. Turk, 1988 : 16). Barkun mencapai kesimpulan demikian karena ia menggabungkan definisi paksaan yang sangat ketat dengan definisi hukum yang sebenarnya tidak ketat. Paksaan dianggap hanya berarti ancaman kekuatan fisik yang paling nyata oleh perwakilan pelaksanaan pusat sehingga tidak memasukkan penggunaan cara-cara lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengendalian sosial untuk tujuan politik. Sebaliknya setiap pola tingkah laku atau interaksi dapat ditafsirkan sebagai norma hukum (terutama dimana pola tersebut tercermin dalam konvensi bahasa sebagai "peraturan"); dan setiap ketertiban atau sistem interaksi sosial dapat dipandang sebagai ketertiban hukum (terutama dimana ketertiban demikian diakui secara eksplisit dan diterima sebagai realitas sosial yang mengendalikan-walaupun tidak perlu menentukan). Jadi setiap hubungan yang berlanjut dalam ketiadaan "wasit" yang diadakan secara formal dan yang mengancam secara fisik. (ibid : 166).

Apa yang dikemukakan Bakun ini telah memperlihatkan bahwa hukum sebagai struktur budaya dapat banyak mendukung pemeliharaan ketertiban sosial dengan memberikan pedoman yang jelas, dapat dimengerti untuk menyalurkan dan membatasi perselisihan. Salah satu masalah dari hukum menyangkut cara-cara anggota masyarakat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di antara mereka.

Uraian singkat mengenai tiap bentuk ini kiranya akan dapat memperjelas pengertiannya. Yang dimaksud dengan konflik adalah situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan-tujuan mereka masing-masing

yang tidak dapat dipersatukan, dan dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuan masing-masing.

Bagan : Bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang terbagi dalam 6 sub kategori

Kelompok keenam Penyelesaian dengan kekerasan	- Kekerasan
Kelompok kelima Yuridis-politis	- Bertahap tanpa kekerasan - Tindakan politik dan aksi sosial - Pembentukan keputusan legeslatif - Penyelesaian melalui saluran pemerintah.
kelompok Keempat Yuridis-normatif	- Proses pidana - Proses perdata - Proses adminitrasi - Sidang pengadilan - Proses singkat - Arbitrase
Kelompok ketiga Pra-yuridist	- Pemakai jasa penengah - Sidang / musyawarah - Perdamaian - Pengaduan
Kelompok kedua Dikelola sendiri	- Dengan undian - Kesepakatan - Perundingan
Kelompok pertama	- Penyerahan sementara - Menghindarkan diri/meninggalkan pergi - Penyerahan

Kelompok pertama :

1. Penyerahan
2. Menghindarkan diri, melarikan diri, mengundurkan diri
3. Penyerahan sementara, penundaan reaksi, reaksi menunggu dulu.

Dalam kelompok ini, suatu konflik diakhiri karena salah satu pihak, kebanyakan pihak yang paling lemah atau yang paling rendah tingkatannya, mengalah pada situasi yang tidak menguntungkan pihak tersebut.

Apabila pihak yang paling lemah ini memperoleh kesempatan untuk menghindarkan diri dari kekuasaan pihak yang paling kuat, maka masalah konflik ini akan hilang. Memisahkan diri, perceraian, mencari tempat tinggal lain, mengasingkan diri, semua tindakan ini merupakan reaksi supaya konflik yang terjadi tidak menimbulkan akibat yang terlalu menyakitkan.

Di dalam lingkungan yang kemungkinannya untuk menghindarkan diri demikian ini kecil, baik secara sosial maupun secara fisik-geografis, kemungkinan bahwa konflik-konflik akan meningkat lebih besar.

Bentuk penyerahan yang hanya bersifat sementara terjadi apabila pihak yang paling lemah tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan pihak yang paling kuat. Tetapi cara ini semata-mata dilakukan agar pada kesempatan yang baik dapat menghindarkan diri atau melanjutkan kembali pertentangan itu. Perbedaannya dengan bentuk penyerahan yang pertama adalah bahwa pada penyerahan yang bersifat tetap, kedudukan berkuasa dari pihak yang paling kuat diakui sepenuhnya, kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan dan keinginan dari pihak yang paling lemah.

Kelompok kedua :

4. Perundingan
5. Kesepakatan.
6. Undian.

Di dalam kelompok ini konflik ditandai dengan kesamaan tingkat peranan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Di sini tidak ada pihak atau instansi ketiga yang perlu diminta bantuannya. Hal ini memberikan

kebebasan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik itu, tetapi sebaliknya juga meminta banyak pengorbanan dari mereka.

Suatu konfrontasi terbuka dengan pihak lawan tanpa melampaui pendiriannya sendiri atau mempersempitnya, menunjukkan nilai harga diri yang tinggi atau sikap yang terbuka. Penting juga untuk diketahui apakah kedua belah pihak memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan sosial diantara mereka atau tidak. Kesediaan yang kadang-kadang disebabkan karena terpaksa untuk melanjutkan hubungan sosial demikian itu, menciptakan suatu landasan yang baik agar konflik itu dapat dikelola sendiri.

Ada perundingan yang bertujuan untuk mencapai suatu penyelesaian konflik atas dasar Kesepakatan bersama, sedangkan ada pula perundingan dimana pihak-pihak berusaha memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari penyelesaian yang diusulkan, yaitu bila para pihak memperhitungkan suatu kemungkinan yang minimal bagi terjadinya kerugian yang maksimal. Jadi di sini para pihak bersedia untuk melakukan kompromi.

Dalam bidang perdagangan banyak dilakukan penyelesaian konflik secara mandiri demikian ini.

Undian juga merupakan suatu cara yang kerap dipergunakan untuk menyelesaikan suatu konflik. Di sini para pihak secara sepakat menetapkan untuk menentukan hasilnya oleh suatu badan yang tidak bersifat pribadi, dalam hal ini dengan cara undian.

Cara ini banyak dipergunakan dalam bidang oleh raga. Juga dalam kesempatan lain, umpamanya dalam kegiatan anak-anak ternyata cara undian merupakan cara penyelesaian konflik yang efisien.

Kelompok ketiga :

7. Lembaga pengaduan
8. 8. Perdamaian
9. Musyawarah
10. Penyelesaian dengan pihak penengah.

Ciri penyelesaian konflik yang termasuk kelompok ketiga ini adalah adanya instansi ketiga yang ikut serta terlibat, yaitu atas prakarsa dari salah satu pihak yang bersengketa. Siapa yang merupakan pihak ketiga ini tidaklah dapat ditentukan lebih dahulu. Kadang-kadang pihak ketiga ini merupakan seorang yang asing yang oleh kedua belah pihak yang bersengketa diterima sebagai penengah, atau seorang yang mampu mewujudkan suatu musyawarah diantara pihak-pihak yang bersengketa. Pekerjaan menyelesaikan konflik demikian ini bukan merupakan pekerjaan tetap pihak ketiga tadi, melainkan hanya dilakukannya secara insidental atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga ini dapat pula berupa suatu lembaga pengaduan atau biro penyelesaian perselisihan, yang tugasnya menyelidiki dan kemudian berusaha untuk menyelesaikan konflik-konflik atau hubungan-hubungan konflik diantara pihak-pihak yang bersengketa. Lembaga atau biro demikian ini memberikan jasanya atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, dan biasanya pihak yang lemahlah yang mengajukan pengaduan kepada lembaga atau biro dimaksud.

Dalam hal ini tindakan pengajuan pengaduan demikian itu dianggap sebagai petunjuk adanya suatu konflik. Ada kemungkinan bahwa pihak ketiga yang diminta jasa baiknya dapat menyelesaikan konflik tersebut.

Semua bentuk yang termasuk kelompok ini dapat disebut sebagai bentuk penyelesaian konflik pra-yuridis, karena di suatu pihak dipergunakan jasa pihak ketiga yang tidak memihak, tetapi dilain pihak, pihak ketiga ini kerap kali tidak cukup mampu untuk melakukan ikatan dengan aturan-aturan guna dapat menyelesaikan konflik itu. Keadaan demikian ini memberikan lebih banyak kemungkinan untuk menyelesaikan konflik kepada kelompok jenis ketiga ini, terutama jenis menengah, daripada seorang hakim resmi, karena seorang penengah dapat mengusulkan penyelesaian sementara, dapat menunjukkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian konflik nanti, dan dapat melakukan tekanan-tekanan terhadap pihak-pihak yang bersengketa supaya melakukan kompromi dengan ancaman akan menghentikan usaha-usahnya sebagai penengah.

Makin besar kepercayaan dan pengaruh pihak penengah terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, makin besar pula kemungkinan ia dapat mencari penyelesaian bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.

Meskipun demikian, pihak ketiga sebagai penengah tidak berarti berdiri sendiri dalam menyelesaikan konflik-konflik, karena pada akhirnya pihak-pihak yang bersengketa yang menetapkan cara tertentu yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Bentuk yang paling banyak terjadi adalah penyelesaian konflik dengan jalan perdamaian, yaitu dengan cara

melupakan semuanya, memanfaatkan segala-galanya, dan semua dimulai dengan yang baru.

Penyelesaian konflik dengan cara musyawarah dan dengan jasa pihak penengah banyak didasarkan pada masalah sikap memberi dan menerima dari kedua belah pihak tanpa mempertimbangkan apakah kedua belah pihak itu akan baik kembali dengan masa yang akan datang.

Pada penyelesaian konflik berdasarkan perdamaian, konflik itu harus seluruhnya dengan penemuan suatu *modus co-vivendi* yang pantas dan dapat diterima sebagai sarana.

Kelompok keempat :

11. Arbitrase
12. Proses singkat
13. Sidang pengadilan
14. Proses perdata, proses administrasi
15. Proses pidana

Kelompok ini berisi semua jenis bentuk peraturan hukum dalam penyelesaian konflik. Prakarsa setelah hakim menyatakan menerima perkara ini, maka keputusannya akan berada di tangan hakim itu. Para pihak tidak lagi menguasai konflik diantara mereka secara keseluruhan, kecuali apabila hakim mengusulkan untuk mengadakan perdamaian. Hakim kerap kali memang mencoba untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan suatu sidang pengadilan singkat, tetapi apabila usaha penyelesaian ini tidak berhasil, hakim akan memberikan keputusannya berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan demikian

ini tidak berdasarkan pada keinginan hakim sendiri, melainkan pada peraturan-peraturan hukum yang tidak bersifat pribadi. Semua bentuk yuridis mengenai penyelesaian konflik dirumuskan secara formal dengan persyaratan yang ketat dan bukti-bukti yang cukup, sedangkan komunikasi kebanyakan dilakukan secara tertulis.

Perumusan-perumusan secara formal ini mengakibatkan waktu penyelesaian konflik menjadi lebih lama meskipun para pihak yang bersengketa kadang-kadang merasa dirugikan karena lamanya waktu penyelesaian konflik secara yuridis, tetapi waktu itu sendiri kadang-kadang memberikan hasil yang mengembirakan. Setelah waktu berjalan beberapa lama, dapat terjadi bahwa konflik itu lenyap dengan sendirinya, atau bahwa pendirian pihak-pihak yang bersengketa, karena pengaruh-pengaruh dari pihak lain, berkembang menjadi lebih mendekati satu dengan yang lain, atau karena konflik itu tiba-tiba menjadi tidak relevan lagi bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Pihak-pihak ketiga dalam uraian diatas semua merupakan hakim-hakim profesional, kecuali mereka yang memberikan keputusan yang berdasarkan arbitrase. Arbitrase terletak pada batas antara penyelesaian konflik pra-yuridis dan penyelesaian konflik yuridis-normatif. Dalam arbitrase pihak ketiga dipilih sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, dan kerap kali bukan merupakan hakim-hakim profesional, melainkan orang-orang yang ahli mengenai masalah penyelesaian konflik, yaitu kebanyakan dalam bidang perdagangan dan industri.

Bagaimanapun juga, prosedur arbitrase banyak didasarkan pada peraturan-peraturan hukum, dan pada akhirnya keputusan-keputusan yang diberikan

mempunyai kekuatan mengikat yang bersifat yuridis bagi kedua belah pihak yang berselisih. Ikatan yang mempunyai kekuatan hukum dari keputusan dimaksud, membedakan jenis kelompok yuridis-normatif ini dari kelompok pra-yuridis sebelumnya.

Kelompok kelima :

16. Penyelesaian melalui saluran pemerintah.

17. Pembentukan keputusan legislatif.

18. Tindakan politik aksi sosial.

19. Bertalian tanpa kekerasan.

Dalam kelompok ini penyelesaian konflik beralih dari ruang sidang pengadilan yang tenang ke tengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan keputusan pemerintah dan keputusan politik. Pembentukan keputusan pemerintah dan keputusan legislatif, sama halnya dengan sarana perantaranya, yaitu hukum, bersifat sangat terikat pada peraturan-peraturan, sehingga dapat disebut sebagai penyelesaian konflik dengan bentuk yuridis-politis. Dalam beberapa hal masih terdapat kemungkinan untuk memasukkan pihak ketiga dalam bentuk suatu prosedur yang tidak berbentuk badan pribadi (orang).

Pada pembentukan keputusan yang bersifat pemerintahan, konflik-konflik kerap sekali diselesaikan oleh lembaga pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi, sehingga bentuk ini dapat dipersamakan dengan bentuk penyelesaian konflik oleh pihak ketiga. Tetapi penyelesaian konflik oleh lembaga pemerintah yang lebih tinggi ini tidaklah benar-benar sama dengan penyelesaian konflik oleh pihak ketiga, oleh karena lembaga pemerintah yang lebih tinggi itu mempunyai

kepentingan supaya konflik-konflik yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah dapat diselesaikan. Sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, dan yang disamping itu masih pula memiliki berbagai kesempatan untuk mempengaruhi situasi, lembaga pemerintah yang lebih tinggi memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mencampuri penyelesaian konflik-konflik yang terjadi dibanding dengan kekuasaan seorang hakim. Tetapi didalam negara hukum yang demokratis, lembaga pemerintah selalu terikat pada peraturan-peraturan hukum. Apabila peraturan-peraturan hukum ini dilanggar oleh suatu lembaga pemerintah, maka kembali menjadi tugas hakim untuk menyelesaikannya. Perundang-undangan sebagai suatu bentuk institusional konflik, maksudnya terdapat suatu prosedur tetap yang diterima oleh semua orang, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik-konflik dan pertentangan-pertentangan yang terjadi didalam kehidupan sosial dengan cara damai. Dalam hal ini peraturan-peraturan yang formal memegang peranan penting. Tanpa dapat dihindarkan, pertentangan-pertentangan didalam parlemen dapat demikian memuncak, dimana tiap partai politik dapat mengemukakan apa saja yang ingin mereka kemukakan, dan dapat mengajukan kritik yang sangat tajam terhadap partai-partai politik yang lain. Tetapi yang menyolok adalah peranan ketua parlemen yang dalam kenyataanya bertindak sebagai lembaga formal yang tidak berujud pribadi, partai-partai saling mengadakan komunikasi, dan tetap mengadakan komunikasi terus meskipun konflik terjadi dengan seru. Dengan pengecualian yang jarang terjadi, anggota-anggota fraksi mungkin terlibat dalam konflik secara fisik, dan apabila hal ini terjadi, maka jelas bertentangan dengan aturan tata tertib parlemen yang berlaku.

Kedua bentuk penyelesaian konflik yang bersifat politis lainnya, yaitu tindakan politik dan aksi sosial, serta bentuk bertahan tanpa kekerasan, diikat secara agak linak oleh peraturan hukum. Meskipun demikian kedua bentuk penyelesaian konflik ini biasanya masih diikat lagi oleh norma-norma sosial dan peraturan-peraturan informal.

Membuat suatu konflik menjadi terbuka agar orang-orang di sekelilingnya dan mereka yang belum tersangkut jadi ikut serta berpartisipasi, merupakan suatu cara yang kerap kali dilakukan. Biasanya terjadi suatu pembesaran skala dari konflik yang terjadi, dan bersama-sama dengan itu terjadi polarisasi sosial di dalam masyarakat. Kedua bentuk kegiatan itu dimaksudkan agar pemerintah atau pembuat undang-undang mendapat tekanan-tekanan untuk memaksa kedua lembaga ini mengambil keputusan-keputusan yang berbeda dari keputusan yang menurut rencana akan dikeluarkan atau yang sudah dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut.

Konfrontasi antara golongan-golongan oposisi dengan pemegang-pemegang kekuasaan pemerintah dan kekuasaan politik haruslah dianggap sebagai suatu cara kearah penyelesaian suatu konflik.

Aksi politik dan aksi-aksi sosial serta bentuk-bentuk kelanjutan lain dari proses politik dalam bentuk aksi-aksi tanpa kekerasan dengan disertai atau tanpa disertai pelanggaran-pelanggaran hukum, biasanya timbul dari suatu konflik yang terpendam.

Cara penanganan konflik dalam usaha mengarahkan ke jalan yang benar dalam bentuk yuridis-normatif berbeda dengan dalam bentuk yuridis-politis.

Dalam bentuk yuridis-politis penanganan konflik-konflik itu berujud proses sosial yang diarahkan pada suatu penyelesaian tertentu. Penyelesaian demikian ini dapat mengalami eskalasi apabila digunakan kekerasan. Di bawah pengaruh keadaan tertentu, aksi-aksi itu dapat mengakibatkan deskalasi sehingga mengurangi pertentangan-pertentangan yang terjadi.

Kelompok keenam

20. Penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu cara penyelesaian konflik, dimana satu pihak mencoba menyelesaikan suatu konflik terhadap pihak yang lain dengan menggunakan sarana fisik. Sama halnya seperti dalam bentuk penyelesaian konflik yang lain, dalam penyelesaian konflik dengan kekerasan juga masih dipertimbangkan mengenai penyelesaian atau pengakhiran konflik, meskipun pihak yang menggunakan kekerasan mungkin mengajukan alasan bahwa cara ini merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat ditempuh. Tetapi kekerasan menimbulkan kekerasan pula, baik dalam bentuk pembalasan maupun untuk memperkuat keadaan yang sudah terlanjur diwarnai dengan kekerasan.

Kerap kali dibedakan antara penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan penggunaan kekerasan oleh anggota-anggota masyarakat. Hal ini sudah merupakan masalah lama, yaitu masalah mengenai legitimasi dari kekuasaan negara untuk mempergunakan kekerasan pada kejadian-kejadian tertentu, misalnya penggunaan senjata oleh polisi, penangkapan penjahat-penjahat, menindas pemberontak, dan sebagainya. Monopoli penggunaan sarana kekerasan oleh negara memang menunjukkan jumlah pengguna kekerasan di

dalam masyarakat selama satu abad ini jadi menurun. Namun demikian, persoalan mengenai legitimasi kekuasaan negara dalam penggunaan kekerasan belum terjawab. Dapat diberikan contoh dimana negara melakukan kekerasan dengan dalih demi keamanan dan ketertiban. Perang saudara merupakan contoh yang paling ekstrem di mana berlaku hukum : kekerasan dilawan dengan kekerasan, tetapi di sini hukum penggunaan kekerasan akan jatuh bersama dengan batas antara yang menang dengan yang kalah.

Bagan Mengenai Bentuk-bentuk Penyelesaian konflik

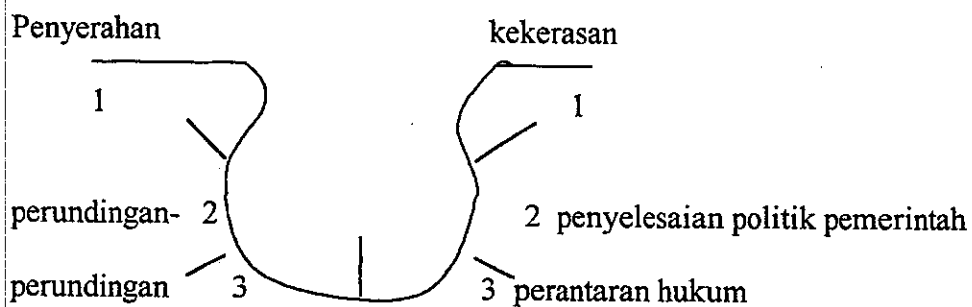
Bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang telah diuraikan dimuka dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus sebagai berikut : mula-mula bentuk penyelesaian mandiri, dengan campur tangan pihak ketiga pertama suatu penyelesaian pra-yuridis, kemudian penyelesaian yuridis disertai pihak ketiga sampai pada suatu perjuangan politik, dan kelanjutan dari perjuangan ini dengan menggunakan sarana lain, yaitu kekerasan.

Nampak adanya peningkatan formalitas dalam deretan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disusul kemudian dengan pengurangan formalitas yang berupa aksi-aksi politik dan kekerasan. Deretan bentuk-bentuk penyelesaian konflik itu juga mencerminkan apa yang di dalam psikologi dikenal dengan mekanisme reaksi "fight" dan reaksi "flight", dimana perundingan dengan dan intervensi oleh pihak ketiga merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan.

Apabila diperhatikan kembali deretan bentuk-bentuk penyelesaian konflik itu, maka akan ternyata bahwa suatu cara penetaan lain yang tidak berbentuk garis

lurus akan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Penyelesaian konflik yang formal tidak selalu lebih baik daripada penyelesaian konflik yang informal, dan penyelesaian politik tidak selalu lebih baik dari penyelesaian yuridis. Yang tergambar terutama menunjukka bentuk-bentuk alternatif dari penyelesaian konflik yang terjadi bersama-sama sekaligus, dan tidak terjadi secara beruntun.

Apabila semua bentuk itu disusun kembali menurut suatu kriteria yang lain, maka akan tergambar suatu bagan yang berbentuk sepatu kuda. Bagan ini terbagi menjadi tiga yaitu : penyelesaian konflik yang dilakukan oleh satu pihak ; oleh dua pihak ; dan penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga.



Apabila diperhatikan kedua ujung dari bagan terlihat bahwa letaknya sangat berdekatan. Kedua ujung tadi kelihatan serupa, baik pada penyerahan diri maupun dengan kekerasan, yaitu konflik diselesaikan oleh pihak yang kuat. Penyerahan kerap kali merupakan akibat dari kekerasan, sedangkan penyerahan (atau penundukan) yang berlangsung lama menimbulkan perlawanan dengan kekerasan. Juga pada penyelesaian konflik dengan cara pergi meninggalkan tempat, penyelesaian dilakukan oleh satu pihak saja.

Setelah memperhatikan hal-hal yang ekstrem sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing nampak lebih menyerupai, dibandingkan de bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang tergambar pada sisi lain dari bagan tersebut, maka

dapat diambil kesimpulan mengenai adanya dua kelompok cara penyelesaian konflik, yaitu : penyerahan, perundingan, undian di satu sisi, dan penyelesaian oleh pemerintah dan legislatif dan perjuangan politik pada sisi yang lain. Di bagian tengah dari bagan sepatu kuda tersebut terdapat penyelesaian konflik dengan campur tangan pihak ketiga.

Dengan bantuan bagan sepatu kuda ini dapat dirumuskan fungsi hukum dalam hubungannya dengan penyelesaian konflik sebagai berikut :

1. Hukum berfungsi untuk mengubah bentuk-bentuk penyelesaian konflik dengan kekerasan menjadi bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
2. Hukum berfungsi untuk mengubah penyelesaian konflik sepihak, terutama penundukan (atau penyerahandiri), menjadi penyelesaian konflik dengan dua atau tiga pihak.

Fungsi yang pertama biasanya dinyatakan dengan jelas dalam hukum dan dalam sidang pengadilan. Di sinilah letak fungsi emansipasi dari hukum dimana penguasaan dari pihak-pihak tertentu di dalam konflik dikurangi dengan cara perundingan di antara pihak-pihak yang setaraf atau dalam situasi di mana tersangkut tiga pihak, maupun dalam penyelesaian konflik dengan perantara peradilan. Baik dalam bentuk penyelesaian konflik dengan konflik yang tidak bersifat yuridis maupun yang berbentuk yuridis, nilai-nilai dan asas-asas hukum mempunyai peranan yang penting sekali, sedangkan di dalamnya dapat dikenal kembali aspek-aspek budaya dari hukum itu di dalam kehidupan sosial.

Hasil yang Telah Dicapai dalam Usaha Mewujudkan Penyelesaian Konflik tanpa Kekerasan.

Fungsi hukum dan peradilan untuk mewujudkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan di dalam kehidupan sosial, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hal ini sudah dapat diwujudkan dalam kenyataan. Apabila fungsi ini sesuai dengan fungsi hukum dan peradilan yang lebih dikenal sebagai sarana pemaksa, yang anggota-anggota masyarakat terlibat di dalamnya bertentangan dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini terutama berlaku dalam hukum pidana dimana pada tersangka yang dituntut selalu bertentangan dengan kemauan mereka masing-masing. Oleh karena hukum pidana sendiri hal demikian itu dianggap sebagai memberikan kemungkinan untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan sendiri, yaitu menghukum sendiri, pembalasan, penyelesaian tak terkendali, penyanderaan, dan lain-lain. Negara mengambil alih konflik itu dari pihak para korban dan menjamin agar pemeriksaan, penyidikan dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1981 : 115-127)

Dengan adanya hukum yang secara erat terkaitnya dengan perbedaan sosial dan konflik, maka penjelasan yang paling singkat tentang keterkaitan tersebut rupanya adalah bahwa orang tidak dapat mempercayai orang asing. Karena skala dan kompleksitas keterkaitan sosial meningkat, begitu pula perbedaan pengalaman manusia. Makin berbeda pengalaman yang orang miliki, makin berbeda pula persepsi dan evaluasi alternatif perilaku dan hubungannya.

Makin besar pula variabilitas dan apa yang dianggap sebagai keadilan dalam istilah khusus kehidupan sehari-hari.

C. Bentuk-Bentuk Kerjasama dan posisi Tawar Menawar Dalam Kerjasama.

C.1. Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian

Beberapa prinsip dasar hukum kontrak menurut hukum perjanjian Indonesia dikemukakan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian,
3. Perjanjian tersebut mengenai sesuatu hal tertentu,
4. Perjanjian tersebut merupakan suatu sebab hal yang halal.

Jika suatu perjanjian melanggar ketentuan/syarat-syarat tersebut maka perjanjian tersebut adalah batal karena hukum.

Keempat syarat tersebut selanjutnya diuraikan dalam pasal-pasal. Pasal 1338 mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak syah.

Pada prinsipnya, apabila ditinjau dari aspek perdata, maka setiap kerjasama dimulai dari aspek pembahasan tentang kebebasan berkontrak. Prinsip

kebebasan berkontrak ini muncul bersama dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan persaingan bebas. Keduanya saling mendukung dan berakar dari hukum alam. Kedua paham ini berpendapat bahwa individu pada umumnya mengetahui kepentingan mereka yang paling baik dan cara pencapaiannya. Dalam mencapai kesejahteraan individu-individu harus mempunyai kebebasan untuk bersaing dan negara tidak boleh campur tangan. Seiring dengan berkembangnya asas tersebut maka kebebasan berkontrak merupakan pula suatu prinsip yang umum dalam mendukung berlangsungnya persaingan bebas.

Menurut Treitel asas kebebasan berkontrak digunakan untuk merujuk pada dua asas umum (G.H. Treitel, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 1993:58-59). Asas umum yang pertama adalah bahwa "hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh dibuat oleh para pihak : asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak". Asas yang kedua menentukan "bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian".

Di Inggris dewasa ini terhadap kedua asas umum ini berlaku pembatasan-pembatasan. Terhadap asas umum yang pertama pada saat ini terlihat adanya kecenderungan untuk menekan penyalahgunaan yang disebabkan oleh karena berlakunya asas kebebasan berkontrak telah sangat dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan maupun oleh putusan pengadilan. (ibid, 69).

Pada dewasa ini timbul perkembangan-perkembangan yang memberikan banyak perlindungan kepada orang yang dianggap menjadi pihak yang lemah

dalam suatu hubungan kontraktual. Namun dalam sebagian besar transaksi-transaksi antara orang bisnis, dimana tawar menawar dapat dilakukan secara leluasa, asas kebebasan berkontrak masih merupakan hal yang penting.

Menurut treitel terhadap berlakunya asas umum yang kedua terdapat pengecualian berlakunya asas umum yang kedua dengan pertimbangan demi kepentingan umum (*public interest*). Sudah barang tentu makin besar turut campur tangan hukum terhadap hubungan para pihak, maka menjadi makin kurang pula pentingnya faktor kesepakatan. Dalam beberapa situasi, derajat dari campur tangan tersebut sedemikian besarnya sehingga menjadi tidak patut untuk menggambarkan bahwa hubungan-hubungan diantara pihak tersebut adalah suatu perjanjian. Misalnya hubungan perkawinan. Di situ pihak hanya dapat menentukan apakah mereka memasuki atau tidak memasuki hubungan tersebut.

Di dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungannya dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam kenyataan yang demikian, maka campur tangan negara untuk melindungi pihak yang lemah.

C.2. Bentuk-bentuk Kerjasama dan Posisi Para Pihak dalam Kerjasama

C.2.a. Pengertian kerjasama/kontrak

Pada pengertian industri kecil khususnya kerajinan kayu, terjadi kerjasama antara perajin, pengusaha lokal dan pengusaha asing. Kerjasama ini dapat dikategorikan dalam kerjasama atau kontrak secara egal dalam arti sesuai dengan peraturan yang ada, ada pula yang dilakukan dengan kerjasama “terselubung”.

Yang dapat dikategorikan sebagai kerjasama legal yaitu dengan cara-cara:

1. Kerjasama patungan dengan fasilitas PMA/PMDN.
2. Pengusaha asing mendirikan PMA murni asing, pengusaha lokal atau pengrajin sebagai mitra/sub-kontrak

Sedangkan kerjasama yang dilakukan secara ilegal, misalnya dengan cara-cara:

1. Melakukan “kawin semu”, antara orang asing dengan WNI, untuk memudahkan mendirikan perusahaan lokal.
2. Diangkat direktur “boneka” (seorang WNI), untuk mempermudah perijinan.

Negara turut campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dalam perjanjian. Dapat ditemukan pananaman modal asing, yaitu berkenaan dengan perjanjian *joint venture* antara patner asing dan patner Indonesia. Pemerintah menerapkan keharusan pengalihan saham dari pihak asing kepada Indonesia dalam 20 tahu, sehingga pihak indonesia memiliki saham minimal 20 %. (peraturan Pemerintah No.17 tahun 1992).

Di Indonesia pengaturan hukum kontrak diatur dalam beberapa macam hukum, tergantung dari materi kontrak yang diatur, sehingga asda hukum kontrak

yang diatur dalam hukum perkawinan Islam seperti dalam hal perkawinan atau waris atau hukum perdata yang mengatur hubungan hukum ekonomi/perdagangan.

Pembatasan mengenai kontrak dan ruang lingkupnya sebagaimana di bahas oleh para ahli dapat dicatat antara lain pendapat dari Henry Campbell Black MA dalam Black's Law Dictionary.

Black memberikan serangkaian definisi mengenai kontrak sebagai berikut:

- * *A promissory agreement between two or more persons that create or destroy a legal relation.*
- * *An agreement upon sufficient consideration, to do or not do a particular thing*
- * *An agreement between two or more parties, preliminary, step in making of which minds of parties meet and concurs in understanding of term .*
- * *A deliberate engagement between competent parties up on a legal consideration, to do or abstain from doing, some act.*
- * *It is agreement cheating obligation in which there must be competent parties, subject matter, legal consideration mutuality of agreement must not be vague or uncertain that terms are not ascertainable*
- * *A contract or agreement is either where a promise is made on one side and assented or on the other: or where two or more persons enter into engagement with each other by a promise on either side.*
- * *The writing conditioned, and which serves as proof of the obligation.*

Menurut Henry Campbell Black, kontrak dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara, tergantung dari unsur-unsur didalamnya yang mendapatkan tekanan utamanya, sehingga ada jenis kontrak yang *commutative* dan *independent*, *conditional*, *conceptual* dan *real: divisible and indivisible* dan sebagainya. (Henry Campbell Black, 1968:349).

C.2.b. Syarat-syarat dalam hukum kontrak

Penerapan hukum kontrak dalam praktek dunia usaha telah digambarkan diatas sebagai hal yang sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum sehari-hari.

Prof. Soebekti membahas aspek jual beli dan sewa menyewa yang dianggap sebagai yang paling banyak diperlukan sehari-hari. (Soebekti 1976:92).

Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. (Pasal 1339 KUH perdata).

Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa hanya ketentuan ketentuan dan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang dilarang) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu perjanjian.

Ada 3 tolok ukur dalam Pasal 1337 untuk menentukan apakah syarat-syarat dan ketentuan dalam suatu perjanjian dapat berlaku dan mengikat para pihak. Tolok ukur itu ialah undang-undang (wet), moral (goede zeden) dan ketertiban umum (openbare orde). Sedang menurut Pasal 1339 Tolok ukur ialah kepatutan (bilijkhed), kebiasaan (gebruich) dan undang-undang (wet). Kalau digabungkan maka tolok ukur menurut, kedua pasal itu ialah: undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan.

Undang-undang adalah Tolok ukur yang pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Padila bahwa para pihak tidak memasukkan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan hukum kedalam suatu perjanjian, karena hukum mempunyai supremasi dan selalu dianggap bahwa ketentuan-ketentuan hukum merupakan bagian yang integral dari setiap perjanjian. (ambrosio Padila, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 1993:119).

Sedangkan tolok ukur yang lain yaitu yang bertentangan dengan moral dan ketentuan yang bertentangan dengan ketertiban umum menurut Wiryono Prodjodikoro bahwa Tolok ukur ini adalah pengertian-pengertian yang sifatnya relatif, yang tidak sama di seluruh dunia, melainkan tergantung kepada sifat-sifat hidup negara masing-masing. Pengertian moral (Wiryono Prodjodikoro memakai istilah kesusilaan), harus diartikan sebagai moral dan dalam suatu masyarakat diakui oleh umum atau khalayak ramai. Sedangkan yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah kepentingan masyarakat yang dilawankan dengan kepentingan perseorangan, yang dalam berhadapan dengan kepentingan perseorangan itu dipermasalahkan apakah kepentingan masyarakat itu terinjakinjak atau tidak. (Wiryono Prodjodikoro, 1986:68-70)

Menurut yurisprudensi Philipina, morale berkaitan dengan salah benar dan dengan hati nurani manusia. Sedangkan ketertiban umum atau public order berkaitan dengan kesejahteraan umum dan termasuk keamanan umum sebagai mana menurut laporan Code Commission (edgardo I, Paras, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 1993:120).

Menurut penulis kepatutan mempunyai isi yang lebih luas dari moral dan melanggar ketertiban umum adalah juga tidak sesuai dengan kepatutan. Tetapi oleh karena Pasal-pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan pula moral dan ketertiban umum, adalah keadilan yang dapat dimaksudkan kedalam arti kepatutan. Dengan demikian sesuatu yang tidak adil berarti tidak patut. Dengan kata lain bila dikaitkan dengan kepatutan dalam arti keadilan maka klausul perjanjian secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan keadilan.

Tolok ukur lain dalam KUH Perdata yang juga harus diperhatikan adalah itikad baik, Pasal 1138 ayat (3) menentukan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Soebekti, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hakim diberi kekuasaan untuk menyimpan dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik. Selanjutnya Soebekti mengemukakan bahwa memang hukum itu selalu mengejar dua tujuan yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang dijanjikan dipenuhi (ditepati). Namun dalam menuntut dipenuhinya itu janganlah orang meninggalkan norma-norma keadilan atau kepatutan.

Itikad baik diistilahkan sebagai *good faith* dalam *black law dictionary* dijelaskan sebagai berikut :

An intangible abstract quality with in technical meaning or statutory definition, and it encompasses, among other things, an honest belief, the conscionable advantage, and individual's personal good faith is concept of his own inner spirit and, therefore, may not conclusively be determinate by his protestations alone. Doyle. V. Gordorn , 158N. S. 2d 248,259,260. Honesty of intention and freedom from knowledge of circumstances which ought to put the

holder upon inquiry. An honest intention to abstain from taking any unconscientious advantage of another even through technicalities of law, together with absence of all information notice or belief of facts which render transaction unconscientious. In common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and generally speaking, means being faithful to one's due or obligation. *See* *Front V. Calmanovitz*, 249 Cal.app 187,57 Aal.Rptr. 248,251 (Henry Campbell Black, 1986:623-634)

Dengan itikad baik dapat dimaksudkan sebagai niat baik dari pihak yang satu dengan satu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Niat adalah sesuatu yang ada di dalam batin seseorang memang adalah sesuatu yang *intangible abstract quality* seperti yang dijelaskan oleh Black itu. Niat tersebut harus merupakan niat yang jujur untuk tidak merugikan mitra janjinya yaitu seperti dikatakan Black adalah *an honest intention to abstain taking any unconscientious advantage of another*. Dalam kaitannya dengan tanggungjawab masyarakat yang selalu harus dimiliki oleh setiap orang mereka niat itu juga harus merupakan niat untuk tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan umum.

Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat, tetapi juga setelah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan. (Lihat Wiryo Prodjodikoro, 1986:56-57).

Ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP Perdata ini merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Kata lain bahwa sekalipun para pihak bersepakat untuk tidak dimuatnya suatu ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya demikian berat sebelah sehingga dirasakan tidak adil, namun tetap

saja ketentuan itu tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas itikad baik

Ada pengertian hukum baru yaitu konsep” penyalahgunaan keadaan” atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang menyangkut keadaan yang tidak dapat dimasukkan dalam itikad baik, patut dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai klasik. (HP. Panggabean, 1992:104). “Penyalahgunaan keadaan” pada *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* (NNBW) yaitu KUH Perdata Belanda yang baru telah dimuat sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum (*rechtshandling*) dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Menurut Pasal 44 NNBW tersebut seseorang dianggap melakukan suatu “penyalahgunaan keadaan” apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain telah melakukan perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada dalam keadaan-keadaan khusus, seperti berada dalam keadaan kecerobohan, kondisi mental yang abnormal atau tidak mempunyai pengalaman, dan ia telah mengajukan dilakukannya perbuatan hukum itu oleh orang lain itu, meskipun hal yang diketahui atau hal yang sebenarnya diketahui itu seharusnya mencegah ia untuk menganjurkan orang lain itu berbuat yang demikian. (P.P.C. Haanappel & Ejan Mackaay, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 1993:125).

D. Campur Tangan Pemerintah Dalam Kerjasama Antara Partner Lokal Dan Partner Asing Khususnya Perlindungan Pada Pihak Yang Lemah.

D.1. Campur Tangan Pemerintah Dalam Kerja Sama Patungan (*Joint-Venture*).

Perjanjian kerjasama patungan antara partner asing dengan partner domestik akan melahirkan suatu hubungan-hubungan hukum. Sesuai asas kebebasan kontrak, maka hubungan-hubungan tersebut sifatnya adalah saling percaya dan semua partner berkewajiban untuk setia pada kerjasama yang diadakan dan kemudian menjalankan kerjasama dengan itikad baik, patut dan adil. Jika prinsip-prinsip dasar dari hukum kontrak tersebut diterapkan pada pelaksanaan kontrak kerjasama patungan yang di dalamnya berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sifatnya tradisional maka sejak diterbitkannya UUPMA serangkaian kegiatan kontrak yang baru muncul dan yang telah ada sebelumnya mengalami pengembangan-pengembangan.

Kerjasama antara perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan pengusaha asing (WNA), lazim disebut sebagai usaha patungan atau *joint venture*. Perusahaan patungan adalah suatu bentuk perusahaan dari sebuah asosiasi dari dua atau lebih dalam bisnis internasional karena banyaknya jalan mengharuskan pemilikan lebih besar oleh mitra setempat. Jadi usaha patungan adalah gabungan dua atau lebih orang untuk maksud terbatas, dengan hak dan tanggungjawab yang lazimnya terdapat pada perusahaan persekutuan. Dalam perusahaan patungan dapat juga termasuk persekutuan antara perseroan-perseroan terbatas serta antara individu-individu. Berdasarkan atas itu maka kontrak dianggap sebagai *lex specialis*, walaupun dalam kontrak PMA ijin pemerintah merupakan dokumen yang penting sebagaimana pentingnya kontrak antara peserta

dalam kerjasama patungan modal asing dengan modal nasional. (Subekti, 1976:14)

Negara turut campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dalam perjanjian, dapat ditemukan penanaman modal asing yaitu yang berkenaan dengan perjanjian *joint venture* antara partner asing dengan partner Indonesia. Pemerintah menerapkan keharusan pengalihan saham dari pihak asing kepada Indonesia dalam 20 Tahun sehingga pihak Indonesia memiliki saham minimal 20 %. (Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1992).

Pembahasan hukum kontrak kerjasama patungan sebagaimana diuraikan terdapat banyak kaitan dengan hukum internasional/transnasional.

Sebelum membahas tentang kontrak kerjasama patungan dengan modal asing, terlebih dahulu menguraikan titik-titik kepentingan (*point of interest*) dari masing-masing peserta dalam pengaturan kontrak kerjasama untuk menggaji pengalaman yang ada serta memikirkan pengaturan pola-polanya untuk masa-masa yang akan datang. Titik kepentingan dari peserta kerjasama patungan menyangkut lingkungan aspek hukum, ekonomi dan politik dari penyelenggaraan kerjasama dengan modal asing.

Pengaturan kontrak kerjasama patungan yang menjadikan obyek untuk mengejar motif masing-masing peserta dapat dilakukan dalam (Sumantoro, 1984:163):

1. Pembentukan usaha kerjasama patungan (dalam bentuk PT)
2. Kontrak manajemen.
3. Perjanjian kerjasama teknik.

4. Perjanjian penggunaan hak/merk (*franchise and brand use*)
5. Perjanjian pemasaran
6. Perjanjian pembiayaan/pinjaman
7. Perjanjian yang merupakan kombinasi antara perjanjian tersebut di atas
8. Bentuk-bentuk kontrak lainnya.

Dalam kerjasama patungan sering pihak-pihak yang bekerjasama kedudukannya tidak seimbang. Dalam kondisi seperti ini cenderung pihak yang kuat akan selalu dapat memaksakan kehendaknya pada yang lemah. Oleh karena itu meski menurut kebebasan, berkontrak adalah yang berkaitan dengan pasar bebas, dalam berkontrak sepenuhnya adalah merupakan urusan para pihak, namun demi perlindungan hukum dan kepentingan umum, campur tangan pemerintah juga diperlukan.

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable* dalam konsep *Common Law*. Z. Asikin Kusuma Atmadja, Hakim Agung yang menjadi ketua majelis dalam pengadilan perkara Jaminan Buku Pensiun dan perjanjian utang-piutang, antara lain memberi catatan terhadap putusan perkara tersebut:

.....hasil yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yang seimbang antara para pihak (*Gelijkwaardigheid van Partijen*).

Disamping itu meskipun keseimbangan dan kesesuaian kedudukan para pihak itu ada, namun dalam pelaksanaan yang tercapai suatu hasil yang tidak seimbang dan tidak sesuai (tidak patut dan adil).

Dasar bagi keseimbangan dan kesesuaian dalam perjanjian tersurat dalam Pasal 1320 B.W, hanya apabila dalam keadaan *in concreto* ada keseimbangan dan

keserasian maka tercapailah kesepakatan/konsensus yang sah antara para pihak. Kalau syarat itu tidak terpenuhi maka Pasal 1338 B.W. tidak berlaku mutlak (kebebasan untuk mengambil keputusan tidak ada bagi salah satu pihak).

Bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendak pada pihak yang lemah hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibat kontrak tersebut tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.

Mengenai bagaimana pengadilan Indonesia seharusnya mengaku ada atau tidaknya *Bargaining power* yang seimbang diantara pihak dalam suatu perjanjian, menurut Z. Asikin Kusuma Atmadja adalah "penyalahgunaan keadaan" atau "penyalahgunaan kekuasaan ekonomi" yaitu mencakup keadaan yang tidak dapat dimaksudkan dalam itikad baik, patut dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik akan memperkaya tolok ukur bagi hukum Indonesia dalam menentukan ada atau tidaknya *bargaining power* yang seimbang dalam suatu perjanjian (catatan tentang Keputusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 1987 No. 3431 K/Pdt/1985).

Negara turut campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dalam perjanjian antara lain adalah dibidang penanaman modal asing. Berkenaan dengan perjanjian *joint venture* antara partner asing dan partner Indonesia. Pemerintah menerapkan keharusan pengalihan saham dari pihak asing kepada pihak Indonesia dalam 20 tahun, sehingga pihak Indonesia memiliki saham minimal 20 %. (Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1992).

Dalam kontrak kerjasama patungan dengan asing (*joint venture*) sering kali pihak-pihak yang bekerjasama kedudukannya tidak seimbang. Ini dimungkinkan karena pada umumnya kepentingan mayoritas saham ada pada partner asing. Kondisi ini sangat memungkinkan terutama karena adanya fasilitas yang diberikan dibidang PMA, yaitu dengan lahirnya deregulasi melalui peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994. Melalui deregulasi ini dimungkinkan komposisi saham dalam perusahaan *join venture* PMA adalah 95 % asing dan 5% nasional, dan dalam posisi seperti itu perusahaan PMA tersebut dapat melakukan usaha pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dengan kedudukan yang demikian itu, maka posisi partner nasional ada pada kedudukan minoritas dalam hal kepemilikan sahamnya. Oleh karena itu maka meski menurut asas kebebasan berkontrak sepenuhnya adalah urusan para pihak, namun demi perlindungan hukum dan kepentingan umum, campur tangan pemerintah diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai undang-undang perseroan terbatas, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang kedudukannya sebagai pemegang saham minoritas, agar tidak cenderung di lemahkan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, undang-undang telah mengatur.

Ketentuan peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak minoritas sebagaimana ditentukan dalam undang-undang PP; kiranya dapat dipergunakan untuk membentengi diri bagi perusahaan-perusahaan nasional yang dalam kapasitasnya sebagai partner dalam perusahaan-perusahaan *joint venture*

PMA. Memang tidak dapat dipungkiri dalam banyak aspek kedudukannya cenderung menjadi lemah dari partner asing, sehingga sangat memungkinkan kedudukan mereka semakin kuat. Oleh karenanya keberadaan ketentuan-ketentuan dalam UU PT mempunyai arti penting bagi perlindungan hukum pihak pengusaha nasional dalam berinvestasi *joint venture* dengan pihak investor asing.

D.2. Campur Tangan Pemerintah Pada Kerjasama Dengan Model Kemitraan/Sub-Kontraktor.

Secara umum kerjasama antara dua pihak dilandasi oleh rasa saling membutuhkan, dan dalam hubungan tersebut tentunya ada kontraprestasi. Dalam hubungan antara kedua belah pihak tersebut, perjanjian adalah merupakan sarana yang menunjang dalam upaya mewujudkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak agar masing-masing pihak tidak bertindak menyimpang dari apa saja yang telah disepakati bersama. Kerjasama yang dilakukan sebagai suatu itikad atau jalinan antara industri besar atau menengah dengan industri kecil semacam ini biasanya dilakukan dengan model sub-kontrak. Perjanjian sub kontrak tidak terlepas dari perjanjian pada umumnya, dimana suatu perjanjian sub kontrak juga harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebagaimana perjanjian pada umumnya. (R. Subekti dan Tjitrosudibyo, 1995:283). Ikatan yang terjadi pada kerjasama subkontrak adalah jalinan antara industri kecil dengan industri besar atau menengah dimana ikatan tersebut diharapkan dapat menciptakan adanya desentralisasi usaha (pemerataan) dalam bidang industri khususnya industri

kerajinan dan meningkatkan dinamika industri kecil untuk tumbuh dan berkembang dan dapat memproduksi secara efektif dan optimal.

Pengertian sub-kontrak dapat dilihat dari sudut hubungan para pihak, ada tiga katagori, yaitu (Sudadyo. P. 1989,2) :

1. *Sub Contracting Up Stream,*

Yaitu sub-kontrak antara industri kecil dan industri sedang atau besar bilamana bahan dasar/setengah jadinya dibuat oleh industri kecil dan finishingnya dibuat oleh industri sedang atau besar.

2. *Sub Contracting Down Stream,*

Yaitu bahan setengah jadi dibuat oleh industri sedang atau besar, sedang finishingnya atau barang jadinya dibuat oleh industri kecil.

3. *Sub Contracting Partial*

Yaitu bilamana sebagian dari mata rantai proses produksi dikerjakan oleh industri kecil atau sebaliknya oleh industri sedang atau besar.

Sebagaimana dikemukakan bahwa perjanjian sub kontrak diharapkan dapat menciptakan desentralisasi usaha bidang industri dan meningkatkan dinamika untuk tumbuh kembang industri kecil.

Menurut Ismangoen, makin lengkap dan makin teliti persyaratan suatu pesanan akan mengurangi timbulnya resiko perselisihan dikemudian hari. Persyaratan teknis maupun pembayaran harus disesuaikan dan ditentukan dengan jelas, demikian pula dengan standar dan kualifikasi yang telah ditentukan. (Insmangoen Notosapoetro, 1987:142). Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dapat diwujudkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Ada dua tipe hubungan sub kontrak antara industri kecil dan industri besar atau sedang, yaitu: (P.Sudabyo, 1989,3)

1. *Independent Sub-Contractor*

Industri kecil tersebut sebagai sub-kontrak yang tidak tergantung pada industri besar tersebut dan dapat bertindak sendiri.

2. *Sub Ordinate or Captive contractor*

Industri kecil seluruhnya atau sebagian besar tergantung kepada industri besar yang mengambil seluruh atau hampir seluruh hasil produksinya.

Industri kecil ini berkewajiban untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan tersebut walaupun industri kecil ini sesungguhnya adalah *legally independent*.

Kerjasama sub-kontrak ini dapat dilaksanakan dalam hubungan jangka pendek, biasanya untuk memenuhi kapasitas produksi dari perusahaan besar atau sedang. Hubungan kerja berakhir apabila perusahaan sudah memungkinkan memenuhi kapasitas produksinya.

Sedangkan hubungan sub kontrak yang dilaksanakan dalam jangka panjang biasanya dikenal dengan hubungan kerjasama komplementer, biasanya dilakukan dalam waktu yang panjang dengan saling menguntungkan.

Dicken membedakan hubungan sub kontrak dalam dua bentuk yaitu :

1. *Industrial Sub Contracting*, artinya pihak sub kontrak mengerjakan proses tertentu atau menghasilkan komponen tertentu yang kemudian diolah oleh principal, yaitu industri besar atau sedang.

2. *Commercial Sub Contracting*, artinya pihak sub kontraktor menghasilkan barang jadi yang tinggal dipasarkan oleh pihak principal. Dengan demikian perusahaan sedang atau sedang tersebut tidak lain adalah perusahaan dagang (trading).

Alasan-alasan suatu perusahaan mensubkontrakkan dapat bermacam-macam, namun biasanya dapat diketahui motif-motifnya adalah ,alasan ekonomis, alasan kualitas, dan alasan perluasan produksi. Selain itu juga adanya pengkonsentrasian pada bidang spesialisasinya sendirinya sehingga beberapa barang di sub kontrakkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Motivasi Dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Aktivitas Perajin Dalam Perkembangan Usaha.

A.1.a. Perkembangan Usaha Kerajinan-Industri Ukir Kayu Di Jepara Dan Industri Perajin

Kabupaten Jepara adalah sebuah Kabupaten dengan luas lebih kurang 949,80 Km² dengan kepadatan penduduk rata-rata kurang lebih 675 orang /km². Kota Jepara dewasa ini tumbuh menjadi daerah industri ukiran yang telah mampu memberikan kesempatan kerja kepada kurang lebih 65.000 perajin. (wawancara dengan Arifin Mubaroq-Pengusaha)

Banyaknya jumlah perajin ukir Jepara dewasa ini merupakan kelanjutan dari usaha ukir Jepara yang sudah dimulai jauh sebelum masa kemerdekaan. Karmadi dan Kartadarmaja (1985 : 3-6) memperkirakan tumbuh dan berkembang seni ukir Jepara ke dalam lima tahapan. Tahapan yang pertama, didasarkan pada peninggalan sejarah yang bernilai Arkheologis dengan menunjuk bukti-bukti ukiran-ukiran yang terdapat pada masjid dan pemakaman Mantingan Jepara. Berdasarkan pada bukti itu, berarti seni ukir di Jepara diawali dengan perkembangan budaya Islam sekitar 1512. Tahap kedua, pada masa R.A.. Kartini, alasan yang diajukan, karena R.A. Kartini berhasil mengumpulkan para perajin tradisional yang berada di desa Belakang Gunung. Para perajin itu disuruh membuat peti jahitan, asbak rokok, meja kecil sebagainya. Jadi

sejenis bahan-bahan souvenir. Barang-barang itu dikirimkan kepada antara lain sahabat-sahabatnya yang ada diluar negeri sebagai tanda mata. Sejak itulah barang-barang ukiran Jepara mulai dikenal di dunia luar. Atas usaha R.A. Kartini ini secara perlahan-lahan industri kerajinan ukir Jepara dibuat untuk tujuan komersial. Tahap ketiga terjadi pada masa jaman Belanda. Dengan didirikannya sekolah pertukangan dan diberi nama *Openbare Ambasche Scool* dengan jurusan mebel ukir. Pada masa belanda itu telah berhasil digali dan dikembangkan motif (tipe) ukiran Majapahit, Mataram, Pajajaran Bali dan lain-lain. Tahap keempat adalah masa setelah Proklamasi Kemerdekaan R.I. Waktu itu, sekolah ukir Jepara telah mengembangkan lebih jauh kepada penggalian kerajinan rumah tangga. Tahap kelima adalah berkembangnya barang-barang souvenir seperti bingkai kaca, pot bunga, lampu hias dan mebel. Kalau pembagian Karmadi dan Kartadarmaja (1985) benar, maka ukir kayu yang berkembang dewasa ini dapat ditempatkan pada tahap keenam, dimana ukir Jepara dengan bercirikan tipe-tipe kerajinan ukir yang berorientasi kepada jenis-jenis mebel Eropa klasik seperti masa Henri VII, Charles I dan II serta model-model abad 18, yang biasa disebut "antique reproduction and garden furniture" serta model-model populer lainnya sejak awal tahun 90-an banyak diminati investor asing untuk konsumen asing (dieksport). Satu kegiatan yang cukup penting dalam mengangkat eksistensi industri mebel ukir Jepara ke dunia internasional adalah ketika diselenggarakannya "*Jepara Handy Craft Exhibition in Bali*" yang bertempat di Hotel Nusa Dua Tahun 1990. Gebrakan itu menarik 13 orang pengusaha asing dari 60

negara. Langkah ini dapat dikatakan sebagai titik balik bagi permebelan Jepara kearah pemasaran internasional.

Karya-karya klasik maupun populer, dibuat oleh perajin Jepara dalam tiga kategori, yaitu kategori halus, sedang dan kasar. Ketiga katagori itu dibedakan berdasarkan pada kualitas kayu, kualitas ukiran dan harga. Katagori halus ditandai oleh kayu pilihan (yang karenanya jarang dibuat dempulan). Penggarapan yang lebih halus dari nilai estesisnya, sehingga harganya jauh lebih tinggi dari pada barang yang sama tetapi berkatagori sedang dan kasar. Bahan dasar yang dipakai untuk produk katagori halus adalah kayu tua yang tidak cacat untuk konsumen lokal dan export kenegara-negara Eropa atau kayu mahoni (*mahgany*) untuk barang-barang yang dieksport ke Amerika dan beberapa negara lainnya.

Dalam sekitar tiga tahun terakhir pemasaran mebel mengalami “booming” perkembangan kota Jepara sebagai kota industri kerajinan dan mebel ukir mengalami perkembangan yang luar biasa. Secara fisik dapat dilihat dengan bermunculannya gedung-gedung bertingkat, mobilitas yang cukup tinggi dari masyarakat sehingga menimbulkan kemacetan serta lalu lalanganya warga negara asing dari berbagai penjuru dunia memadati kota Jepara.

Berdasarkan data terakhir, sekitar 800 kontainer mebel/bulan diekspor ke seluruh dunia. Data menunjukan bahwa 90% pergerakan ekonomi di Kabupaten Jepara di dominasi oleh sektor mebel. (Dinas Perindustrian & Perdagangan Jepara, September 19998).

Barang-barang yang dihasilkan perajin dapat disimpulkan dalam 4 jenis spesialisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Spesialisasi pekerjaan bubut
2. Spesialisasi ukir tiga dimensi, termasuk mebel, peralatan rumah tangga dan relief
3. Spesialisasi ornamen-ornamen dan
4. Spesialisasi barang-barang souvenir.

Adapun Spesialisasi menurut lokasi desa adalah sebagai berikut :

Tabel:

No	Spesialisasi	Lokasi/Desa
1	Pekerja bubut	Kedungino, Wonorejo, Kuwasen
2	Relief	Saripan, Panggang, Potroyudan, Senenan, Mantingan.
3	Ornamen, Ukir Mebel dan alat-alat rumah tangga.	Tegalsambi, Mantingan, Platar, Sukodono, Langon, Pengkol, Tahunan, Saripan, dan lain-lain Panggang dan Belakang Gunung
4	Barang souvenir	

Sumber: Pemda Jepara, September 1998-dat, tahun 1998.

Dalam Perkembangan yang semakin pesat, maka kerajinan ukir Jepara dapat ditemui hampir di seluruh desa-desa di Jepara, dengan mengabaikan spesialisasi daerah masing-masing.

Wilayah yang memproduksi kerajinan dan mebel kayu dewasa ini sudah meliputi hampir seluruh wilayah Jepara. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 :

**DESA POTENSI INDUSTRI UKIR
KABUPATEN JEPARA**

I.	<u>KEC. KELING</u> 1. Ds. Keling 2. Ds. Tulakan 3. Ds. Bandungharjo 4. Ds. Kaligarang	IV.	<u>KEC. JEPARA</u> 1. Ds. Mulyoharjo 2. Ds. Kuwesan 3. Ds. Monorejo 4. Ds. Bandengan 5. Ds. Kedungino 6. Ds. Karangkebagusan 7. Kel. Potroyudan 8. Kel. Panggang 9. Kel. Pingkol 10. Kel. Jobokuto 11. Kel. Kauman 12. Kel. Bulu 13. Kel. Saripan 14. Kel. Bapangan		3. Ds. Bugel 4. Ds. Dongos 5. Ds. Kerso 6. Ds. Sukoso 7. Ds. Menganti 8. Ds. Suwanlor 9. Ds. Bulakbaru
II.	<u>KEC. BANGSRI</u> 1. Ds. Bangsri 2. Ds. Banjaran 3. Ds. Bondo 4. Ds. Wedelan 5. Ds. Tubanan 6. Ds. Kaliaman 7. Ds. Kedungleber 8. Ds. Tengguli 9. Ds. Keabang 10. Ds. Cepogo			VII	<u>KEC. MAYONG</u> 1. Ds. Pelemkerep 2. Ds. Tigojuru
III.	<u>KEC. MLONGGO</u> 1. Ds. Sekuro 2. Ds. Mambak 3. Ds. Bulungan 4. Ds. Lebak 5. Ds. Kawak 6. Ds. sinanggul 7. Ds. Karanggondang 8. Ds. Slagi 9. Ds. Plajan 10. Ds. tanjung 11. Ds. Jambu Timur 12. Ds. Srobyong 13. Ds. Suwawal Barat 14. Ds. Suwawal Timur 15. Ds. Jambu	V	<u>KEC. TAHUNAN</u> 1. Ds. Tahunan 2. Ds. Langon 3. Ds. Ngabul 4. Ds. Sukodono 5. Ds. Mantingan 6. Ds. Kecapi 7. Ds. Platar 8. Ds. Mangunan 9. Ds. Petekeyan 10. Ds. Semat 11. Ds. Senenan 12. Ds. Telukawur 13. Ds. Krapyak 14. Ds. Tegalsambi 15. Ds. Demangan	VIII	<u>KEC. PECANGAAN</u> 1. Ds. Rengging 2. Ds. Troso 3. Ds. Pecangaan Wetan 4. Ds. Pecangaan Kulon 5. Ds. Lebuawu 6. Ds. Manyargading 7. Ds. Pendosawalan
		VI	<u>KEC. KEDUNG</u> 1. Ds. Jondang 2. Ds. Rau	IX	<u>KEC. BATEALIT</u> 1. Ds. Pekalongan 2. Ds. Ngasem 3. Ds. Mindahan 4. Ds. Bawu 5. Ds. Reguklampitan
				X	<u>KEC. WELAHAN</u> 1. Ds. Sadigede 2. Ds. Welahan

Dari pengamatan dan data-data yang diperoleh, pengrajin di Jepara yang berusia 46 tahun keatas relatif sedikit (22,5%) dibanding dengan yang berusia antara 30-40 tahun (61,66%). Bahkan 15,8% diantaranya dibawah usia mereka, yang berusia antara 23-29 tahun 15,8% masing bujangan. (Info Mitra, Desember 1998).

Sedangkan daftar potensi industri mebel ukir Jepara sampai tahun 1997 adalah sebagai berikut :

**DAFTAR POTENSI INDUSTRI MEBEL UKIR
DI KABUPATEN JEPARA**

No	URAIAN	TAHUN				
		1993	1994	1995	1996	1997
1.	Lokasi Kecamatan	9	9	9	10	10
2.	Lokasi Desa	80	80	80	83	85
3.	Jumlah perusahaan/Unit Usaha	2.110	2.145	2.216	2.437	2.493
4.	Jumlah Tenaga kerja	29.258	29.882	32.624	35.234	38.264
5.	Nilai Investasi (Rp.000)	1.984.900	1.985.173	2.578.000	3.351.400	4.356.820
6.	Kebutuhan bahan baku/th (m3)	179.742	180.176	186.500	213.571	297.00
7.	Nilai bahan baku (Rp.000)	62.909.700	127.843.000	138.969.750	162.843.050	237.600.000
8.	Nilai Produksi (Rp.000)	201.494.652	241.077.652	275.168.200	321.104.110	522.720.000
9.	Nilai ekspor (US. \$)	48.627.888,36	54.355.023	59.275.500	66.745.724	97.431.125

**KETERANGAN : DAFTAR KECAMATAN
DAN DESA TERLAMPIR**

**KANTOR DEPARTEMAN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
JEPARA**

Jumlah barang yang diproduksi oleh perajin umumnya tergantung pada tingkat besar kecilnya pesanan (pembeli bebas), pelanggan dan order dari kolektor. Sehingga besar kecilnya jumlah pekerja juga sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Bagi perajin Jepara dewasa ini rata-rata pekerja yang bekerja pada perajin antara 11 sampai 20 orang adalah 30,76%, sedangkan yang memiliki pekerja 6-10

ada 43,58%, yang sudah memiliki pekerja 41 orang keatas hanya 3,4% saja. (Muhadjirin Thohir, 1994:32). Dengan demikian kualitas perajin umumnya adalah pengusaha kecil, karena itu wajar apabila sampai tahun 1995, banyak pengusaha Jepara yang belum memiliki pembukuan, tidak memberi nama perusahaan dan belum mempunyai ijin usaha. (ibid : 33).

Sampai dengan Desember 1998, jumlah pengusaha kecil terwsedbut ada kurang lebih 5000 orang. (wawancara dengan Arifin Mubaroq pengusaha/ketua Koperasi Mebel Ukir Tahun Jaya). Perkembangan yang ada dilapangan pada tahun 1998 , jumlah tenaga kerja yang dipakai perajin sangat dipengaruhi oleh order yang diterima. Sehingga perajin yang semula hanya mempekerjakan 10-20 orang, apabila order yang diterimanya besar, maka mereka akan mempekerjakan tenaga kerja sampai 100 orang.

Yang menarik adalah hampir semua perajin yang sudah berumah tangga selalu melibatkan anggota keluarga dengan alasan bahwa pekerjaan dan kekayaan yang mereka miliki adalah milik bersama. Keuntungan dari kebiasaan yang demikian, adalah bahwa hampir seluruh anggota keluarganya mengetahui seluk-beluk usahanya, sehingga ketrampilan mengukir kayu tersebut menjadi turun temurun.

A.2. Motivasi Perajin Dan Faktor-Faktor Pendorong Aktivitas Perajin.

Keberanian membuka usaha sebagai perajin ukir, dipengaruhi oleh berbagai alasan yang saling mendukung. Alasan itu menyangkut pada lingkungan sosial, ditafsirkan sebagai realitas sosial bahwa Jepara memang dikenal sebagai kota ukir,

karena itu dikalangan lingkungannya sendiri sering muncul pertanyaan khas “Anda orang Jepara, mengapa tidak mengukir ?, kemudian kalau sudah tahu dirinya pandai mengukir, mengapa tidak membuka usaha sendiri sebagai perajin ukir?”.

Sedangkan alasan yang menyangkut ketrampilan diberi makna lewat pribadinya yang secara umum sudah menjadi tukang ukir atau tukang kayu selama mereka bekerja pada perajin. Pada umumnya ketrampilan dalam kerajinan ukir diperoleh berkat bekerja pada perusahaan saudaranya atau temannya secara kekeluargaan, yang disebut magang. Berdasarkan pada ketrampilan yang telah dimilikinya itu, mendorong dirinya untuk sedapat mungkin bisa mengubah status. Menjadi tukang adalah “buruh”, sedangkan perajin atau pengusaha adalah “juragan”. Buruh adalah orang yang disuruh, sedangkan juragan adalah orang yang menyuruh. Oleh karena kalau sama-sama bekerja mengapa tidak sekalian memilih sebagai pengusaha ?. Hampir semua pekerja ukir memimpikan menjadi perajin/pengusaha. Dengan kata lain kalau lingkungan sosial memberikan peluang dan ketrampilan sudah didapat maka mereka akan mencoba dan berani membuka usaha. Berkat dorongan seperti itulah maka perajin ukir semakin tumbuh subur di Jepara terutama sekitar tahun 1986-1990, sedangkan tahun 1991 sampai dengan sekarang dorongan itu semakin diperkuat dengan kehadiran modal asing, melalui orang-orang asing yang berkunjung di Jepara. Orang-orang asing yang berstatus Tenaga Kerja Asing (TKA) di Jepara sampai dengan bulan Agustus 1998 ada 150 orang (data orang asing , Kantor Imigrasi Semarang, Februari 1999). Menurut Polres setempat jumlahnya dipastikan lebih banyak lagi mengingat ada beberapa orang asing yang masuk melalui

Bali dan Jakarta yang tidak terpantau oleh kantor Imigrasi Semarang. Sedang orang asing yang menggunakan visa turis yang lalu lalang di Jepara mencapai 2000 orang (Kompasw 26 juni 1997). Didukung hasil wawancara (Arifin Mubaroq-pengusaha).

Dorongan lingkungan sosial dan psikologis seperti disebutkan diatas, umumnya tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan formal yang pernah diterimanya. Artinya, untuk menjadi perajin ukir rata-rata (65%) hanya lulusan SD, kendatipun ada yang sampai perguruan tinggi atau sarjana (4,16%). Dinas Perindustrian & Perdagangan Jepara , (September 1998). Tidak berkaitannya antara pendidikan dan pekerjaan, didukung dengan kenyataan yang sering dijadikan contoh. Misalnya perajin yang diwawancarai cenderung menunjukan pengusaha-pengusaha sukses yang rata-rata berpendidikan rendah sebagai contoh.

berdasarkan pada kenyataan-kenyataan tersebut diatas, seperti mereka dimotivasi oleh prospektif kerajinan ukir itu sendiri, Pandangan optimistik terhadap masa depan usaha kerajinan ukir, hal ini nampak dari pengakuan secara umum bahwa mereka memiliki motivasi sebagai perajin ukir, karena memiliki motivasi yang besar untuk bisa memperbaiki hidup, disamping alasan ingin memperbaiki hidup juga karena mereka dapat mengaktualisasikan diri dalam pergaulan dan meningkatkan kepercayaan diri karena meningkatnya kemampuan diri.

Teori motivasi kerja sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Maslow (1943) yang dikenal sebagai teori Hirarkhi kebutuhan (*hierarchy of needs*) menunjukan adanya lima tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong seseorang untuk mendapatkan kepuasan atas

kebutuhan tersebut, setelah kebutuhan yang rendah (sebelumnya) telah dipuaskan. Menurut Maslow kebutuhan utama manusia berada pada tingkat pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Setelah pertama itu terpenuhi atau terpuaskan, barulah menginjak pada kebutuhan kedua (lebih tinggi), yaitu kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan ketiga baru dilaksanakan setelah kebutuhan kedua terpenuhi. Proses ini berjalan terus sampai akhirnya terpenuhi kebutuhan kelima yaitu aktualisasi diri.

Proses tersebut masing-masing saling tergantung dan saling menopang. Suatu kebutuhan yang lebih rendah tidak selalu hilang bila kebutuhan yang lebih tinggi muncul. Semua kebutuhan cenderung menjadi bagian kepuasan dalam setiap daerah jadi, bila suatu kebutuhan mencapai puncaknya, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivasi utama perilaku. Kemudian kebutuhan selanjutnya mulai mendominasi. Tetapi walaupun suatu kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan itu masih mempengaruhi perilaku. Hanya intensitasnya lebih kecil, karena kebutuhan manusia saling tergantung dan saling menopang. bila estimasi-estimasi Maslow kita terapkan pada perilaku untuk menjelaskan motivasi kerja dari para perajin di Jepara, estimasi ini tampak logis dan dapat diterapkan pada motivasi para perajin dalam melaksanakan kegiatannya serta dalam melakukan kerjasama dengan pengusaha baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing. namun perlu disadari pula bahwa ada hal-hal lain yang mempengaruhi bagaimana dorongan itu menjadi performennya, dalam hal ini faktor-faktor kemampuan dan pelatihan, kesempatan, perlakuan yang adil, dan imbalan (balas jasa yang tinggi akan mempengaruhi prestasi).

B. Pengaruh Kepentingan Perajin Dan Pengusaha Lokal Terhadap Persepsinya Pada Investor Asing Di Jepara.

Pengaruh dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan suatu perubahan perilaku dan sikap orang lain atau kelompoknya. (Soekanto Reksohadiprodjo, 1996:104)

Persepsi disini diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh sebagai cara menyimpulkan informasi dan penafsiran (Jalaludin Rachmad, 1988:157) atau bagaimana orang melihat sesuatu terhadap mereka (Vernon A. Musalman & John H. Jackson, 1987:170).

Persepsi disini merupakan persepsi kelompok perajin dan kelompok pengusaha lokal, bukan lagi persepsi individu.

Persepsi dapat dikategorikan pada tataran :

- a. kognisi, yaitu pengetahuan kelompok tentang obyek,
- b. Afeksi, yaitu bagaimana interpretasi dari kelompok pada obyeknya,
- c. Katektik, yaitu keputusan kelompok untuk bertindak.

Bekerja adalah syarat dasar manusia untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Sedang pilihan pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan diri, peluang dan keberanian. Pilihan seperti itu tidak sama kadarnya pada setiap diri manusia. Perasaan adanya perbedaan kemampuan, nasib dan rizki bagi orang seorang sangat mewarnai pandangan hidupnya (word-view) perajin ukir Jepara. Pandangan hidup itu sering berakar dari religi dan budaya. Pada suatu religi misalnya kerja dipandang sebagai tujuan hidup tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan

hidup. Tujuan hidup manusia itu sendiri secara ekonomi minimal adalah mampu menghidupi diri dan keluarganya. Selain itu, sebagian dari hasil kerja bisa diamankan kepada sesama, sehingga tahapan-tahapan tuntunan orang bekerja adalah bisa hidup baik dan membantu sesama. Untuk mencapai harapan dari usahanya itu, maka perajin ukir Jepara memandang pekerjaannya dengan penuh hormat. persepsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai yang diyakininya sangat mempengaruhi sikap dalam menjalankan usahanya. Dalam menjalankan aktifitas ekonominya, industri permebelan sangat dipengaruhi oleh interaksi para pelakunya yang dapat dikelompokkan dalam :

1. Perajin

Pengertian perajin, dapat dikategorikan sebagai:

- a. Pembuat produk jadi kerajinan/mebel.
- b. Pengusaha kecil pembuat kerajinan dan mebel kayu, yang mempekerjakan 1 - 50 tukang/tenaga kerja atau perajin “rumahan”

2. Pengusaha Lokal Menengah - atas

Pengertian pengusaha lokal, adalah pengusaha yang memproduksi barang dan mengeksport barang tersebut, atau pengusaha kolektor dari perajin untuk kemudian diekspor yang pada umumnya usahanya telah berkembang pada pertengahan tahun 80 an dengan modal dalam kategori usaha menengah-atas.

3. Investor asing dapat dikategorikan sebagai:

- a. Orang asing yang menjalankan usahanya secara legal sebagai produsen dengan bentuk usaha dengan fasilitas PMA, PMDN, maupun non fasilitas.

- b. Orang asing yang melakukan usahanya dibidang perdagangan (trading) produk kerajinan dan mebel Jepara.
- c. orang asing yang menjalankan usahanya dengan cara menggunakan nama orang Indonesia, baik secara mengangkat pengusaha lokal maupun “perkawinan”.

Adanya berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara kelompok dan organisasinya yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat yang kompleks serta terdapat kelangkaan sumber-sumber maka pola-pola adaptasi yang fungsional untuk suatu kelompok atau kelompok segmental dalam masyarakat mungkin disfungsional untuk yang lain.

Interaksi yang terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat belum tentu satu pihak dengan pihak yang lain akan sama-sama merasakan kepuasannya karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan daya reaksi yang berbeda-beda.

Konflik tersebut mungkin bukan cerminan ketidaksesuaian antara mereka, melainkan lebih mencerminkan ketidaksesuaian atau posisi, antara kepentingan-kepentingan mereka seperti yang ditentukan oleh posisi mereka masing-masing.

Dengan demikian dalam masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan pihak yang memiliki otoritatif yaitu kepentingan untuk selalu berada di dalam situasi konflik pula. Sementara itu konflik tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kenyataan bahwa didalam setiap masyarakat selalu terdapat distribusi kewenangan yang terbatas. Konsekuensi yang timbul dalam suatu masyarakat ialah bahwa bertambahnya wewenang pada suatu pihak berarti berkurang wewenang pada pihak lain (Roni Hanitijo Soemitro, 1984:9-10).

Teori yang dikemukakan Coser, sebagai penggagas yang mempertemukan implikasi-implikasi dari fungsionalisme dari teori konflik, mengemukakan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang mendasar, dan proses konflik dihubungkan dengan benda - benda alternatif seperti kerjasama dalam berbagai cara yang sifatnya kompleks. Coser menekankan bentuk-bentuk konflik dan interaksi lainnya tidak didalam tingkat antar pribadi, tetapi lebih pada konsekuensi-konsekuensi konflik keseluruhan untuk sistem sosial yang lebih besar dimana konflik terjadi.

Teori yang dikemukakan oleh Coser ini kiranya dapat dipakai untuk menganalisis temuan lapangan untuk mengetahui situasi persepsi perajin dan pengusaha lokal pada investor asing.

Dari kalangan perajin dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu:

- a. Perajin yang tidak mendapat order dari orang atau pengusaha asing (50 responden).
- b. Perajin yang menerima order dari orang atau pengusaha asing (10 responden).

Dari 60 perajin ini yang melakukan usahanya antara tahun 1985-1990 ada 6% sedang yang melakukan usaha setelah 1990 an ada 94 %. Para perajin mengemukakan bahwa kehadiran orang-orang asing tersebut jangan melakukan produksi, cukup hanya sebagai pembeli produk saja, sehingga apabila mendirikan perusahaan adalah pekerjaan jasa trading saja. (sebanyak 94%), sedang yang lain menyetujui peran investor pada produksi sebanyak (6%). Pengaruh yang dirasakan perajin, dengan kehadiran orang/pengusaha asing tersebut 24% orang menyatakan

menguntungkan, karena meningkatkan harga jual produk, 40 % menyatakan tidak berpengaruh terhadap usahanya, sedangkan 30 % menyatakan dirugikan, karena menimbulkan kesulitan perajin memperoleh tenaga kerja.

Sedangkan sepengetahuan perajin, para investor asing tersebut melakukan kerjasama dengan orang Jepara melalui cara perkawinan (100% responden mengetahui), dan mendirikan perusahaan sendiri 40 %.

Perajin “rumahan” yang mendapat order dari pengusaha asing legal, artinya pendirian usahanya dengan fasilitas PMA/PMDN, terdiri dari 7 responden.

Pada kelompok ini 100% mengatakan merasa sangat diuntungkan, sejak menjalani mitra kerja dengan PMA usahanya maju dengan pesat dengan meningkatnya kemampuan memproduksi mebel berkualitas tinggi. 5 dan 7 memiliki show room ditempat-tempat yang strategis di Jepara dan mempekerjakan 50-100 orang. jumlah tenaga ini sangat dipengaruhi oleh order yang diterima. Jadi secara fair sebagian perajin merasa diuntungkan dengan kehadiran pengusaha asing. Menurut mereka dari segi order, sekarang sudah pasti, tidak harus memburu order, untuk setiap order diberi panjer (down payment) sebesar 40% dari nilai order produksi dari 40% untuk nilai order finishing (3 respondent). Selain itu ia juga diberikan bantuan berupa mesin yang dibutuhkan, seperti gergaji bengkok dan lain-lain yang pembayarannya dipotong dari realisasi order. (2 respondent).

perajin yang mendapat order dari orang asing yang berlaku sebagai pengusaha ilegal lebih memungkinkan mendapat perlakuan yang buruk dari investor asing tersebut. 2 respondent yang melakukan kerjasama dengan mereka mengalami

yang disebabkan oleh karena wan prestasi yang dilakukan oleh orang asing. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara orang asing tersebut menghilang setelah order dipenuhi, sementara perajin tidak mempunyai kemampuan untuk melacak karena status yang kurang jelas dan kerjasama yang dilakukan dengan didasari kepercayaan.

Karena itu memperlmasalahkan orang asing menurut mereka harus dibedakan antara resmi dan tidak resmi atau masyarakat mengistilahkan dengan “ilegal”. Bagi yang resmi harus dibedakan kepada orang asing yang mempunyai legalitas berusaha kita harus menghormatinya, asal aktivitasnya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana pun mereka telah mendongkrak mebel Jepara kedunia International. Tapi jika akivitasnya dianggap merugikan masyarakat, misalnya dengan “merebut” porsi perajin, yaitu melakukan produksi sendiri, itu harus di cegah, demikian penuturan-penuturan mereka.

Untuk mengatasi hal itu, menurut mereka maka perlu peraturan yang memadai. Peraturan itu harus disesuaikan dengan karakter dan sosial budaya masyarakat Jepara (2 responden). jika aturan yang ada masih berpedoman pada aturan investasi secara global (aturan yang bersifat umum), maka dikhawatirkan akan memancing timbulnya benturan. sehingga menurut mereka (2 responden) perlu peraturan yang memiliki ciri khas kedaerahan dan watak yang berbeda.

Suasana kompetisi yang sehat dan dinamis perlu dikembangkan mengingat, dampak yang dirasakan masyarakat Jepara dengan kehadiran orang/pengusaha asing antara lain tidak ada pengangguran, serta kesejahteraan masyarakat. Dimasa krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, ternyata masyarakat Jepara

mayoritas tidak berimbas. Hal ini membuktikan secara riil kekuatan ekonomi Jepara cukup mengakar kuat. (dari data kantor imigrasi Jateng, dari 20 Kabupaten. yang menjadi wilayah kantor Imigrasi Semarang hanya Jepara yang tidak mengirim TKI keluar negeri).

Beberapa pengusaha lokal yang melakukan *join venture* dengan pengusaha asing, menduduki pada jajaran direksi pada perusahaan PMA *join venture* (3 responden). Perusahaan ini termasuk pelopor ekspor mebel dengan kontainer sejak 8 tahun lalu. Rata-rata ekspor 30 sampai 40 kontainer setiap bulan. Dan guna pengadaan komoditas ekspor, diberlakukan pola kemitraan berdasarkan kesetaraan, antara perusahaan dan para perajin yang menjadi pemasoknya meskipun diakuinya dengan terbentuk standar kualitas atau disain, itulah sebabnya perusahaan melalui berbagai usaha misalnya memberi sampel, meningkatkan teknik pembuatan agar dapat menghasilkan produk yang memadai sebagaimana yang dikehendaki pasar luar negeri itu. Dengan mematok standar mutu tersebut maka perusahaan berani membayar perajin dengan tinggi.

Menanggapi kehadiran orang atau pengusaha asing di Jepara mereka (2 responden) menyatakan sebagai suatu yang wajar apabila terjadi kecemburuan sosial. apabila menyaksikan kehidupan yang sangat pesat di satu sisi sementara pada sisi yang lain masih banyak pengusaha dan perajin lokal yang belum berhasil.

Pemikiran kearah kemandirian itu harus dikembangkan, tidak boleh terlalu dibawah bayang-bayang orang asing. melalui berbagai dalih keunggulan dengan orang asing, masyarakat mebel Jepara harus mampu menentukan sikapnya. Alih

keunggulan dapat dicapai apabila terjadi pada kemitraan. Melalui kesiapan sumber daya manusia, masyarakat mebel Jepara sedikit demi sedikit harus mampu menjadi majikan di negeri sendiri. keberadaan orang asing harus menjadi jembatan serta pemacu bagi masyarakat setempat, bukan bayang-bayang yang menakutkan yang perlu disirnakkan.

Bagaimana persepsi pengusaha lokal kelas menengah dan kuat, yang pada umumnya sudah melakukan usaha ekspor sejak pertengahan tahun 80 an, diwakili oleh 3 responden, 1 sebagai wakil dari asosiasi permebelan dan kerajinan Indonesia cabang Jepara, satu wakil dari perusahaan ketua koperasi pengusaha kerajinan dan satu wakil dari ketua ikatan pengusaha Sokodon.o.

Kehadiran orang/pengusaha asing harus diterima sebagai kenyataan dengan segala konsekuensinya. sebab keberadaannya saat ini sudah merupakan bagian dari kegiatan bisnis mebel setempat.

Sebab masa mebel Jepara sendiri tidak akan dapat dilepas dari orang asing jika ingin terus eksis di pasar internasional.

Mereka itulah yang saat ini mampu mensejajarkan diri dengan pengusaha asing. Keuntungan besar dari bisnis mebel yang seharusnya menjadi milik warga Jepara, atau Indonesia pada umumnya telah jatuh ke tangan orang asing. hal ini menurutnya antara lain karena peraturan yang ada lebih berpihak pada investor, daripada masyarakat mebel Jepara sendiri yang umumnya adalah pengusaha kecil.

Berpedoman pada aturan yang ada, warga negara asing di Jepara bisa bebas melakukan, binsis mebel, karena diperlakukan sama antara pemebel asing dan

pribumi, akibatnya orang asing yang memiliki kelebihan dan keunggulan praktis selalu muncul sebagai pemenang diseluruh sektor. Misalnya pengadaan bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan akses keluar negeri.

Mereka merasa pola bapak angkat yang dijalankan ternyata tidak efektif setelah kehadiran orang asing. Hal ini disebabkan karena tidak menentunya standar harga, bahkan perajin yang sudah menerima orderpun terganggu penjadwalannya. Hal ini menurutnya sudah menurunkan tanggung jawab perajin, meskipun hanya selisih beberapa ribu rupiah.

Sebagian investor asing tersebut, hanya mengantongi sisa kunjungan bebas, kunjungan usaha mereka sudah berani melakukan kegiatan bisnis ilegal, sebagaimana ditempuh oleh ekportir lokal. Guna mengelabui hukum yang dapat menjeratnya, mereka melakukan kawin semu dengan perempuan setempat. Dengan menumpang identitas istrinya mereka dengan bebas melakukan bisnis di Jepara. Atau mereka mengangkat direktur “boneka” didalam perusahaan yang menjalankannya. yaitu dengan meminjam nama penduduk setempat yang sedikit mengetahui bisnis mebel untuk mengurus perijinan. Padahal aktivits perusahaan baik dari sisi permodalan, investasi maupun pemasaran dikendalikan mereka.

Dsisi lain muncul kesulitan yang oleh perajin, kesulitan mencari tenaga terampil dan langkanya bahan baku.

Menurut mereka pihak yang dirugikan dengan kehadiran orang asing adalah pengusaha lokal yang berorentasi pada pasar lokal. Karena mereka menjualnya dengan rupiah, sudah tentu tidak sebanding dihadapkan dengan pesaing eksportir

yang menjualnya dalam dolar. Sehingga proses pengadaan barangpun mengalami kendala yang serius, terutama karena melonjaknya harga yang diminta oleh perajin. Sedangkan dari sisi perajin, mereka terpaksa menaikkan harga jual karena kenaikan sektor bahan baku, ongkos tenaga kerja dan bahan pendukung lain. Kenaikan ongkos tenaga kerja itu terpicu oleh kehadiran perusahaan asing, baik legal maupun ilegal. Sebab dengan upah yang tinggi mereka secara tidak langsung merebut tenaga kerja yang sudah terikat dengan perusahaan yang lain, para perajin khususnya.

Keberadaan orang asing tersebut cukup dominan dalam aktivitas bisnis terutama dalam perusahaan ekspor dengan kontainer. Sehingga keberadaanya praktis dibutuhkan dan sekaligus menjadi gantungan bagi ribuan perajin. Saat ini keberadaan orang asing dinilai sudah cenderung membangun iklim persaingan yang kurang sehat karena kelonggaran fasilitas yang diberikan, akibatnya orang asing di Jepara tak ubahnya sebagai penduduk asli yang dengan bebas dapat keluar masuk kampung memborong dagangan atau membujuk pekerja lain untuk bekerja padanya dengan upah yang jauh lebih tinggi dari yang didapat dari pekerja lokal. Suasana ini sangat memperhatikan terutama dikalangan pengusaha kecil karena banyak tenaga kerja yang lari ke pengusaha asing karena mengejar target yang rata-rata lebih tinggi 30 % dari pengusaha lokal dan melonjakkan bahan baku dan bahan pendukung lainnya.

Kondisi pro dan kontra pada kehadiran orang asing ini akibatnya timbul konflik kepentingan masyarakat Jepara.

Dari berbagai kepentingan tersebut secara garis besar menurut peneliti dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

A. Ada kelompok pengusaha yang tidak menghendaki orang asing melakukan usaha memproduksi mebel di Jepara dengan alasan:

- a. dengan adanya orang asing melakukan kegiatan usaha mebel dengan kedok pribumi maka pengusaha lokal menjadi terdesak dan tersisih, karena kalah bersaing dalam manajemen usaha, kemampuan dalam memberi upah terhadap perajin/pekerja, kalah dalam perolehan bahan baku dan kemampuan menyerap hasil produksi perajin atau pengusaha kecil rumahan.
- b. pengusaha yang membutuhkan bahan baku berupa kayu, telah menyebabkan semakin langkanya persediaan kayu di pasaran. Pada gilirannya harga kayu menjadi meningkat. Pengusaha yang kuat modal dan efisien dalam manajemennya menguasai pasaran bahan baku dan tenaga kerja seolah-olah terjadi monopoli bahan baku dan tenaga kerja. Hal ini sebenarnya sesuai dengan dalih hukum pasar, dan apabila disimak secara mendalam kondisi ini menimbulkan daya saing dan peningkatan kualitas perajin/tenaga kerja lokal. Namun disisi lain kondisi ini mempersempit ruang gerak dan mengancam eksistensi kelompok pengusaha tingkat menengah besar yang sudah menguasai bisnis permebelan pada era sebelumnya.
- c. Dengan adanya orang asing melakukan usaha dengan pola PMA/PMDN yang diijinkan memproduksi mebel sejak dari hulu ke hilir, pengusaha pribumi terdesak dan kalah bersaing dalam manajemen, peralatan yang berupa mesin-

mesin berteknologi modern, kemampuan dalam memberikan upah terhadap tenaga kerja, perolehan bahan baku, kemampuan menyerap hasil produksi perajin/pengusaha rumahan.

B. Adanya kelompok pengusaha yang justru mengharapkan kehadiran orang asing melakukan kegiatan usahanya di Jepara dengan alasan :

- a. Pengusaha kecil rumahan lebih merasa beruntung langsung atau mensuplai hasil produksinya kepada perusahaan PMA/PMDN/orang asing yang melakukan kegiatan usaha sekalipun dengan berkedok pribumi, karena mereka membayar kontan dan terkadang memberikan panjer terlebih dahulu sebelum penyerahan barang yang dapat dianggap sebagai bantuan permodalan.
- b. Orang/perajin asing berkedok usaha pribumi berani membayar produk dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha menengah/besar pribumi yang cenderung mengulur-ulur waktu pembayaran.

C. Dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil produksi kepada orang-orang kecil/rumahan dapat menaikkan upah karyawan. Pada gilirannya perajin mampu tumbuh menjadi pengusaha menengah bahkan yang lebih beruntung mampu menjadi pengusaha besar.

Dengan adanya perbedaan kepentingan antara perajin, pengusaha lokal, pengusaha asing maka memunculkan kondisi konflik.

Kondisi konflik ini memunculkan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat.

Beberapa perajin, masyarakat dan mahasiswa membentuk kelompok yang menamakan diri aliansi rakyat dan mahasiswa Jepara (ARMJ), kelompok pengusaha lokal menengah dan kuat memiliki organisasi Apindo Jepara yang diketuai oleh H. Arifin Mubaroq. Serta perajin Sukodono membentuk Perajin Mebel Sukodono (PMS), yang diketuai oleh H. Vardoni.

Beberapa kali timbul aksi-aksi sosial yang mengatas namakan rakyat dan mahasiswa Jepara yang menentang hadirnya pengusaha asing melakukan kegiatan usaha mebel di Jepara. (Suara Merdeka, 8 September 1998).

Tuntutan yang diajukan di hadapan Bupati KDH Tk. II Jepara dan pimpinan DPRD yang tuntutananya antara lain : (Humas, Pemda Tk. II Jepara).

1. Mengadakan upaya perlindungan kepada warga Jepara dalam memproduksi mebel ukir;
2. Melarang orang asing memproduksi mebel ukir di Jepara baik produksi barang jadi maupun produk barang setengah setengah jadi;
3. Menertibkan legalitas orang asing di Jepara baik mengenai legalitas keberadaan diri

maupun usahanya.

Tuntutan tersebut disertai dengan penegasan dalam tatap muka antara pejabat daerah, yang ditegaskan pula di situ bahwa :

- * Semua perusahaan asing harus menghentikan produksi barang jadi maupun barang setengah jadi dan harus menjadi pembeli murni/buyers.

- * Untuk semua itu perusahaan asing harus menjadi PMA/PMDN bidang jasa /trading.

Disisi lain terjadi pula aksi unjuk rasa yang dilakukan perajin dan pengusaha lokal mitra kerja perusahaan asing dan tenaga kerja pada perusahaan asing yang dipermasalahkan keberadaanya oleh masyarakat. Aksi unjuk rasa besar-besaran dilakukan oleh kurang lebih oleh para perajin dan pengusaha lokal, yang kemudian diterima oleh DPRD Bupati KDH Dati II Jepara dan Kapolres serta Pejabat lainnya (Kedaulatan Rakyat 28 Pebruari 1999).

Kondisi fisik sebagai temuan pada penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa konflik timbul akibat adanya kenyataan di dalam setiap masyarakat selalu terdapat distribusi kewenangan yang terbatas. Konsekuensi yang timbul dalam masyarakat adalah bertambahnya wewenang pada suatu pihak berarti berkurangnya wewenang dipihak lain. Sementara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Coser, bahwa bentuk - bentuk konflik dan interaksi lainnya itu tidak dalam tingkat antar pribadi, tetapi lebih pada konsekuensi-konsekuensi konflik sebagai keseluruhan untuk sistem sosial yang lebih besar dimana konflik terjadi. Apabila dikaji berdasarkan teori Coser maka konflik kepentingan tersebut tidak harus merusak atau disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem itu.

Perbedaan persepsi perilaku aktivitas industri ukir kayu dapat dijelaskan dengan kesimpulan bahwa makin berbeda persepsi dan evaluasi alternatif perilaku dan hubungannya. makin besar pula variabilitas dalam apa yang dianggap sebagai

keadilan dalam kehidupan sehari-hari para perajin, pengusaha lokal dan investor asing.

C. Kerjasama Antara Perajin/Pengusaha Lokal Dengan Orang/Pengusaha Asing Dan Posisi Tawar Menawar Para Pihak Dalam Kerjasamanya.

Sebagaimana temuan dalam penelitian ini, bahwa orang asing yang melakukan kerjasama sedangkan perajin maupun pengusaha lokal dilakukan dengan beberapa cara yang dapat dikategorikan sebagai kerjasama legal yaitu dengan cara-cara :

1. Kerjasama patungan untuk memproduksi barang kerajinan/mebel
2. Pengusaha asing mendirikan PMA/PMDN, pengusaha lokal atau perajin sebagai mitra .

Pengertian perajin dapat dikategorikan sebagai:

1. Produk jadi kerajinan/mebel
2. Pengusaha kecil yang bergerak sebagai kolektor dari pengrajin lepas.

Sedangkan pengusaha lokal adalah pengusaha yang memproduksi barang dan mengekspor barang tersebut atau pengusaha kolektor dari perajin yang kemudian di ekspor. Masing-masing bentuk kerjasama tersebut menimbulkan keragaman pula dalam *bargaining power* para pihak, sebagaimana dikemukakan dalam introduksi teori bahwa kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak

memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi unconscionable.

Bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendak kepada pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut membawa peruntungan kepadanya akibatnya kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan yang adil.

Sejak tahun 1987 Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan tentang larangan ekspor kayu gelondongan. Kebijakan ini jika dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya karena adanya issue pelestarian hutan tropis dikalangan masyarakat internasional. Kebijakan ini sangat mempengaruhi perusahaan furniture terutama yang menggunakan bahan baku kayu yang berada di negara-negara maju seperti Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Sehubungan dengan ini maka banyak negara-negara maju yang melirik negara berkembang yang memiliki banyak bahan baku untuk dijadikan tujuan ekspansi usahanya.

Indonesia termasuk negara tujuan mereka. Jepang sebagai salah satu wilayah di Indonesia sudah sejak lama memiliki spesifikasi budaya ukir dan kerajinan kayu. Sehingga ketika diselenggarakan “Jepang handy craft & furniture” tahun 1990 di Bali Jepang mulai dikenal dan selanjutnya menjadi tujuan investasi asing dibidang mebel dan furniture.

Perajin Jepara memiliki keunggulan dalam beberapa hal antara lain:

1. Budaya ukir dan kerajinan kayu sudah dimiliki masyarakat secara turun temurun.

2. Sangat mudah menyerap pengetahuan tentang permebelan dan kerajinan kayu.
3. Dalam hal menjiplak atau meniru model yang dipesan sangat sempurna.
4. Bahan baku relatif mudah di dapat dengan harga yang murah.

Keunikan dari investasi dibidang kerajinan kayu ini adalah teknologi hasil dari produk investasi justru dimiliki oleh partner lokal. Sedangkan kelebihan yang dimiliki partner asing adalah permodalan, manajemen dan pemasaran khususnya untuk ekspor.

Investor asing datang berbisnis di Jepara lebih banyak disebabkan oleh faktor insting bisnis yang kuat dari keunggulan yang dimiliki masyarakat perajin Jepara mereka mendapatkan profit tinggi dan kualitas barang yang diinginkan.

Perkembangan kerajinan ukir mebel Jepara ini mengalami perkembangan yang sangat pesat pada 3 tahun terakhir. Kalau semua hanya beberapa gelintir pengusaha lokal yang bisa mengakses pada pengusaha/orang asing pada perkembangan sekarang, orang asing kini banyak yang langsung mendatangi perajin di desa-desa guna membeli produk secara langsung pada perajin atau order pada perajin secara langsung dalam partai besar. Pada gilirannya perajin ini kemudian berkembang sebagai pengusaha rumahan dengan beberapa tukang untuk memenuhi order orang asing tersebut.

Dari tahun ke tahun semakin banyak orang asing yang masuk ke Jepara. Selaras dengan era pasar global, pemerintah Indonesia menyambut baik dan memberikan kesempatan kepada setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia di sektor apapun termasuk industri mebel.

Dari Kantor Imigrasi setempat, diperoleh data sampai dengan akhir Desember 1998, sekurang-kurangnya ada 9 perusahaan asing yang berbentuk PMA/PMDN 105 perusahaan yang mempekerjakan orang asing dalam bentuk usaha perseroan terbatas (PT), Comanditer Venorscap (CV), firma dan usaha dagang (UD). Sedangkan perusahaan yang bergerak dibidang ekspor mebel/furniture dan kerajinan ukir kayu sejumlah 205 buah.

Berkaitan dengan keberadaan investor asing di Jepara, dengan keluarnya deregulasi PP No. 20 tahun 1994 yang memungkinkan pengusaha asing dapat mendirikan PMA dengan 100 % asing, implikasinya adalah perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA 90% berstatus PMA murni.

Dengan deregulasi di bidang pemilikan modal yang memperbolehkan perusahaan asing dengan status PMA murni, akan dapat mengakibatkan dikesampingkannya tenaga lokal untuk jabatan-jabatan puncak diperusahaannya. Padahal sebenarnya (orang-orang Indonesia) justru yang menguasai permebelannya. Sedangkan tujuan dari UUPMA, antara lain adalah upaya menyalurkan modal setelah 20 tahun perusahaan beroperasi dari PMA berubah menjadi PMDN yang notabene kepemilikan sahamnya minimal 55 % dimiliki oleh pengusaha nasional. Namun dengan SK Menteri penggerak dana investasi/ketua BKPM No. 21/SK/1996 bahkan dimungkinkan status PMDN dirubah menjadi PMA.

Dengan adanya fasilitas PMA murni dapat mengakibatkan tenaga kerja lokal tidak saja dikesampingkan bahkan benar-benar tidak berkesempatan dalam posisi

yang memungkinkan, hanya sebagai karyawan pada tingkat pelaksana saja bukan pemegang policy.

Kedudukan seseorang dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari peran, tugas, serta posisi apa yang dipegangnya.

Menurut UU no 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, posisi penting dalam perusahaan yang berbentuk PT, selain RUPS adalah direksi dan komisaris.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengurusan sedangkan komisaris dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UU No. 1 tahun 1995, bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi.

Berkaitan dengan UUPMA, didalam Pasal 9 menentukan bahwa pemilik modal memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam. Pada umumnya posisi general manager, marketing manager serta top executive manager didominasi oleh orang asing. Sedangkan pada perusahaan join venture hanya personal manager yang dipegang oleh orang Indonesia. Wewenang dan dominasi itu menjadi logis karena memang dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UUPMA, yang menentukan bahwa perusahaan PMA diijinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga ahli yang berasal dari warga negara asing bagi jabatan yang belum diisi dengan tenaga kerja Indonesia.

Apabila pertimbangan modalnya antara 70% asing dan 30% lokal, maka pada umumnya Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Produksi, Direktur

Marketing, Direktur Logistik, Direktur Keuangan dan Direktur Personalia, dua diantaranya, biasanya Direktur Logistik dan Personalia adalah orang Indonesia (Soemantoro kuliah, 1997).

Pada perusahaan join venture (1 respondent) dalam praktek, salah satu PMA Join venture Kanada di Jepara, yang mengurus mengoperasikan, memanaj serta mengeluarkan kebijakan perusahaan di semua bidang mulai dari pemasaran biaya-biaya operasional dan penetapan peringkat gaji karyawan dipegang oleh Presiden direktur yang dalam hal ini partner asing. Kuatnya posisi kedudukan yang ada pada partner asing kadang kala tampak melampaui batas. Tidak jarang semua biaya perjalanan keluarga menjadi biaya perusahaan. Sebagai partner lokal kedudukannya lemah namun pihak lokal tidak dapat berbuat banyak. Hal ini disebabkan karena kondisi permodalan yang sangat kecil. Dan itupun bukan karena penyeteran saham modal riil, melainkan partner asing butuh partner lokal, yang akibatnya keberadaannya dihargai dalam prosentase yang sangat kecil.

Temuan menarik pada investasi mebel dan venture kayu Jepara ini, bahwa patner lokal umumnya tidak dilihat dari tingkat pendidikannya, tetapi lebih pada relationship, baik disengaja maupun tidak disengaja terjalin pada orang atau pengusaha asing hal ini disebabkan karena umumnya masyarakat yang bergerak dibidang permebelan mempunyai tingkat kemampuan yang relatif sama.

Masyarakat perajin, umumnya tidak mempermasalahkan bagaimana bentuk perusahaannya tapi meliputi apa saja kegiatan dari perusahaan asing tersebut..

Sebagian besar perusahaan asing di Jepara bergerak dibidang ekspor. Dan sebagian dari mereka ada yang memproduksi sendiri barang mebel, namun pada umumnya perusahaan asing tersebut lebih banyak memberikan "order" dengan pola kemitraan atau sub kontraktor dengan para pengusaha rumahan/perajin dengan disain dan standar kualitas dari ekportir yang lebih tepat bila disebut berkedudukan sebagai kolektor dan eksportir.

Pada PMA murni (100% modal asing), diambil satu responden, PT. Chia Jian IF, PMA murni yang berkedudukan di Bangsri Jepara dengan nilai investasi sebesar \$ 2.500.000, merupakan perusahaan cabang Taiwan. Perusahaan tersebut hanya mengkhususkan 100 % pasar produknya ke Taiwan dan Jepang. Dalam memenuhi kualitas produksinya perusahaan ini banyak menggunakan mesin yang cukup canggih, namun diakuinya mesin tersebut hanya dipakai untuk membuat produk-produk yang tidak dapat dilakukan dengan tangan manusia.

Dalam melakukan kerjasama dengan pengusaha/perajin lokal ia menggunakan cara kemitraan dengan perajin sekitarnya. Selama ini yang dilakukan adalah memberi order pada perajin dengan kualitas yang telah ditentukan. Perusahaan memberi down payment (DP) sebesar 40 % dari nilai order. Mengingat proses finishing cukup rumit yaitu dengan oven maka perusahaan membuat 2 macam kontrak yaitu kontrak untuk produksi mebel dan kontrak untuk proses finishing. Dari 2 kontrak tersebut maka perusahaan sudah menerima DP 2 x 40 %. Kontrak dilakukan secara tertulis dengan bentuk yang sederhana yang sering disebut sebagai surat perintah kerja suatu perjanjian antara masing-masing pihak telah sepakat dan

setuju mengikat diri untuk melakukan perjanjian dengan perusahaan asing sebagai pihak pertama (I) dengan perusahaan industri kecil sebagai pihak kedua (II) dalam perjanjian itu dimuat:

1. Surat perintah kerja (SPK), merupakan dasar dari perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak setiap pihak pertama memberikan pesanan kepada pihak kedua.
2. Kewajiban pihak I
 - a. Membeli barang yang ditetapkan dalam SPK dengan perincian harga yang disepakati.
 - b. Seandainya ada perubahan harga bahan baku maka pihak II berhak berunding sekurang-kurangnya 3 bulan dari tanggal SPK ditetapkan.
 - c. Barang yang diserahkan oleh pihak II kepada pihak I tidak boleh ditolak berdasarkan alasan yang tidak masuk akal, penolakan dapat dilakukan pihak pertama atas dasar spesifikasi dengan mutu dibawah standar yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan-ketentuan SPK.
 - d. Penolakan barang yang disepakati akan mengakibatkan pihak I dikenai tindakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

PT. Chia Jian, juga memberikan bantuan masing-masing yang dibutuhkan perajin misalnya gergaji bengkok dan lain-lain dengan pembayaran dicicil setelah realisasi order. PMS tersebut juga memperhatikan pengembangan kemampuan perajin dengan cara meniru³⁰ perajin untuk mengikuti training permebelan dengan biaya

ditanggung sepenuhnya dari PMA tersebut. Bagi perajin untuk kerjasama semacam ini dianggap menguntungkan, terbukti dari pengukuran beberapa mitra lokalnya (3 responden).

Upaya peningkatan kemampuan dilakukan oleh perusahaan ini dengan mengirimkan 30 mitranya ke Taiwan dengan biaya PMS tersebut. Kerjasama yang dilakukan sangat menguntungkan, dari sisi order kini ia merasa pasti tidak perlu mencari order lagi dari sisi peningkatan SDM, merasakan manfaatnya, karena bertambahnya pengalaman dan kemampuan dalam membuat mebel berkualitas internasional. Sedangkan harga yang ditawarkan pengusaha PMA tersebut jauh lebih tinggi meskipun dengan konsekuensi standar kualitas dan ketepatan waktu.

Perusahaan PMDN (1 responden) Pt. Alam Agung Jaya adalah perusahaan PMDN yang berkedudukan di Regin Pecangaan Jepara. Perusahaan eksportir ini menggunakan standard dollar dengan perajin untuk memenuhi omsetnya yang rata-rata 30-40 kontainer tiap bulan dengan omset 2 milyar lebih. Untuk memenuhi target tersebut perusahaan ini melakukan pola kemitraan dengan 500 perajin. Sedangkan untuk finishing dan packing ia mempekerjakan sekitar 800 orang termasuk staff. Perusahaan ini memberikan standar mutu internasional, dan juga kepentingan tersebut PT Alam Agung Jaya juga meminjamkan mesin pada perajin. Perusahaan ini dimiliki oleh warga negara Belanda Mr. Mooid Arena Jacobus yang menikah dengan wanita Indonesia. Semula perusahaan ini dipermasalahkan legalitasnya, karena menggunakan nama istrinya sebagai pemilik perusahaan sedangkan Mr. Mooid A.J. sebagai Quality Control dan export division, namun

dengan arahan dari pemerintah dalam hal ini BKPM Jateng, kantor Imigrasi Semarang dan Pemda Jepara maka perusahaan ini berubah status menjadi PMDN pada Januari tahun 1999.

PT. Garishta Mulia (milik warga negara Belanda dengan menikahi wanita Indonesia) yang berepusat di ngabul Jepara adalah perusahaan PMA dapat dikatakan sebagai ekportir terbesar. Perusahaan ini memiliki omset 50 kontainer per bulan yang dipenuhi dengan bermitra dengan perajin atau pengusaha lokal rumahan. Pada banyak perajin kerjasama sub kontraktor (4 responden) perjanjian tidak dilakukan secara terperinci dan hanya dilakukan dibawah tangan artinya tidak dilakukan dihadapan notaris. Prinsip yang digunakan hanya prinsip kepercayaan saja. Namun demikian meskipun hubungan bisnis dengan orang asing banyak dilakukan atas dasar kepercayaan, tetap saja dibutuhkan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Kepentingan perajin dan tukang kurang terlindungi pada kerjasama yang dilakukan antara masyarakat perajin dengan orang asing yang status hukumnya tidak jelas atau sering disebut dengan petualang bisnis mebel. Perajin menerima order dari orang asing tanpa melakukan kontrak tertulis hanya saling percaya dengan kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Modal dari perajin setelah pesanan diangkut ternyata orang asing tidak muncul kembali di Jepara, dan melakukan wan prestasi. Perajin tidak punya kemampuan untuk melacak keberadaan orang asing tersebut (2 responden).

Kesulitan lain yang dialami perajin lokal karena tidak adanya kontrak yang mengatur detail kualitas yang diinginkan, kadang-kadang terjadi pesanan sudah

dibuat dengan modal perajin sendiri sementara setelah jadi ditolak pemberi order dengan alasan mutu atau kualitas tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini sangat merugikan perajin terlebih lagi ada suatu anggapan bahwa lebih baik mendapat order dari orang asing karena kemungkinannya akan mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada mengerjakan order dari pengusaha lokal tersebut, tetapi ternyata malah tertipu.

Dari keempat responden yang mengalami peristiwa tersebut keempatnya telah turun 100 % menyatakan hanya pasrah dan hal tersebut mungkin merupakan resiko. Mereka kemudian berusaha bangkit lagi melakukan usahanya.

Ditinjau dari aspek upah tenaga kerja maupun perajin yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asing yang mempunyai bentuk jelas dan legal mereka justru merasakan keuntungan karena upah yang diterima bagi tenaga kerja tersebut upah minimum regional. Rata-rata upah yang diterima untuk tukang amplas, pelitur dan lain-lain berkisar antara Rp. 5.500 sampai dengan Rp.7.000 kalau mereka bekerja pada pengusaha asing dapat mencapai Rp.11.000 sampai Rp.13.000 perhari. Sedangkan perajin memilih bekerjasama dengan pengusaha asing, mereka mendapat bimbingan baik dalam perkembangan teknik finishing peningkatan kualitas barang. Disamping itu produknya dihargai lebih tinggi dari nilai jual produksi lokal.

Temuan di lapangan yang cukup menarik untuk dianalisa juga, adalah moralitas masyarakat Jepara. Pada umumnya responden mengemukakan sisi negatif dari kehadiran investor asing adalah menurunnya derajat moral orang Jepara (85%). Masyarakat Jepara pada umumnya penganut agama Islam yang taat. Dari penelitian

Mujjahirin Tohir (1994), diperoleh data 99,3 % penduduk tahunan Jepara penganut agama Islam yang taat. Kondisi ini sangat mempengaruhi pandangan mereka terhadap budaya asing yang merupakan dampak ikutan dari investasinya. Penampilan orang asing terlalu demonstratif dan spontan, “vulgar” menurut istilah masyarakat Jepara. Mereka terbiasa berpelukan dan berciuman dikeramaian sehingga berpengaruh terhadap anak muda di Jepara. (94%). Sementara 6% mengatakan tidak mempengaruhi. Mereka tidak mengindahkan legalitas dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Dengan pengaruh uang dengan kekuasaan sebagai majikan, mereka ada yang menganggap pekerja wanita Jepara bisa dijadikan gundiknya (istilah masyarakat Jepara “nggotri”), yang mengakibatkan banyak anak lahir tidak melalui ikatan perkawinan resmi, pergaulan bebas antara orang asing dengan wanita Jepara melahirkan anak “Jadah” anak yang lahir diluar perkawinan resmi. (100% responden menyatakan mengetahui keadaan ini).

Dampak negatif lainnya menurut perajin terhadap orang asing adalah membentuk masyarakat eksklusif. Tidak mau bergaul dengan masyarakat (25%). Mereka berkumpul ditempat yang khusus didatangi orang asing, misalnya Hotel Ratu Shima. Menurut perajin (25%) orang asing tersebut menganggap dirinya bangsa kelas satu, sedang masyarakat Jepara ada dibawahnya.

Dari aspek sosial budaya yang diharapkan oleh masyarakat Jepara adalah agar mereka mengerti agar belajar mengerti karakter orang Jepara. Sebagai pendatang mestinya mereka menyesuaikan diri dan bersikap hormat dan meningkatkan kesejahteraan dalam pengertian yang luas.

D. Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Investasi Asing Di Jepara Dan Implikasinya Pada Pengawasan Terhadap Orang Asing.

Kebijaksanaan adalah terjemahan dari "*policy*". Kata kebijaksanaan seringkali disebut dengan kebijakan mengandung dua unsur yang sangat penting yaitu : (1) Prinsip dasar (*basic principal*) atau kumpulan dari prinsip-prinsip yang berhubungan satu sama lain tentang hal-hal yang pokok dan mendasar tujuan, dan (2) cara kerja (*rules action*) sebagai konsekuensi dari prinsip tadi yang mengatur atau mensyaratkan agar tujuan tadi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Dalam fenomena pembangunan ekonomi itu sendiri menunjukkan suatu proses perubahan sosial yang besar yang memerlukan adanya penalaran dan pemahaman dari berbagai segi dan atau dngan kata lain, dapat dilihat dari berbagai perspektif, untuk kemudian mendapatkan pemahaman yang baik. Dalam lingkup ini pelibatan hukum di dalamnya sendiri menyatakan teori pembangunan dalam perkembangannya menjadi semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada suatu disiplin ilmu (A. Hoogerwerf dalam Bambang Sunggono, 1994,5).

Setiap pemikiran suatu masalah ditentukan oleh :

1. Kedudukan sosial ekonomi.
2. "semangat jaman" yang berlaku dan berperan .
3. "semangat masalah dramatis" yang menarik perhatian publik maupun media masa.

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan bahwa perkaitannya dengan masalah-masalah

sosial menjadi semakin intensif. (Sutandyo Wignyosubroto 1991,9) berangkat dari itu maka studi tentang hukum harus juga memperhatikan hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial yang lebih luas. Penetrasi yang semakin meluas itu juga mengandung timbulnya pertanyaan mengenai efektifitas pengaturan oleh hukum serta efek-efek hukum itu yang ditimbulkan terhadap perilaku manusia, maupun organisasi-organisasi di masyarakat. Pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Pembatasan dan pengaturan yang dilakukan hukum dalam bidang-bidang yang menyangkut segi-segi kehidupan pribadi manusia harus pula berhadapan sikap-sikap dan nilai-nilai sosial yang tertanam secara tradisional didalam masyarakat.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa disuatu pihak hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu dan oleh karenanya ia harus paham tentang seluk-beluk masalah yang nanti diaturnya, sedangkan dipihak lain ia juga menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan diluar hukum serta proses bekerjanya. Dalam suasana hubungan yang timbal balik ini dibutuhkan pula suatu pendekatan terhadap hukum yang tidak sepihak, yaitu yang hanya memusatkan perhatian pada kepaduan logis sistem hukum. (Sacipto Rahardjo, 1987:16-17)

Secara yuridis dengan mencermati penjelasan UU No.1 tahun 1967 tentang PMA, akan dapat diungkapkan jiwa dari UUPMA, yaitu mencegah dominasi modal asing. Dalam pembangunan ekonomi asas penting yang dipengaruhi terus adalah segala usaha harus berdasarkan pada kemampuan serta kesanggupan rakyat

Indonesia. Pasal 5 Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah sepenuhnya memperhatikan kekuatan modal nasional yang ada dan rencana-rencana pembangunan yang akan disusun oleh pemerintah. Kemudian Pasal 27 menentukan bahwa perusahaan modal asing wajib memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut pertimbangan yang ditetapkan UUPMDN, No.6 tahun 1968, Pasal 6 dan 7 menentukan bahwa dalam jangka waktu tertentu agar perusahaan mengalihkan usahanya kepada warga negara Indonesia (Pasal 7 ayat 2). Pemerintah menerapkan keharusan pengalihan saham dari pihak asing kepada pihak Indonesia dalam 20 tahun. Sehingga pihak Indonesia memiliki saham minimal 20 % (Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1992).

Kiranya dari ketentuan tersebut tersirat bahwa menurut UUPMDN tidak dapat dialihkan status PMA. Namun dengan SK Menteri Penggerak Dana Investor Ketua BKPM No.21/SK/1996 bahkan dimungkinkan status PMDN menjadi PMA.

Bidang usaha yang dapat dijangkau modal asing, menurut PP No. 20 tahun 1994, pada pasal 5 ayat 1 adalah "perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf a dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yaitu: pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi air minum, pembangkit tenaga atom dan mass media. Investasi mempunyai arti yang sangat strategis. Peran strategis ini dapat dilihat dari sasaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan income perkapita, devisa negara dan alih teknologi.

Menurut Drs. Soedarsono, ketua BKPMJ Jateng, untuk menggairahkan minat investor asing, agar tertarik menanamkan modalnya diperlukan iklim sejuk dan situasi yang mendukung, seperti keamanan dan jaminan stabilitas dari pemerintah maupun masyarakat. Apa yang terjadi akhir-akhir ini di Jepara dimana keberadaan orang yang notabene adalah investor di gugat, bisa berdampak pada terciptanya suasana atau iklim usaha yang kurang nyaman. Patut dikhawatirkan, para pemilik modal tidak tertarik lagi melakukan usahanya di Jepara. Jika hal ini terjadi artinya pergerakan usaha di Jepara akan mengalami *side back* atau kemandegan.

Kehadiran sebuah investor harus diakui sangat berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan di Jateng. Pengertian akan hal ini perlu dimasyarakatkan atau disosialisasikan, karena keberhasilan suatu investasi akan sangat mendukung pencapaian kesinambungan di bidang ekonomi.

Pemerintah daerah, dalam hal ini sangat berkompeten terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam upaya penyelesaian konflik dan tuntutan-tuntutan masyarakat, Pemda juga tidak ingin mengadakan aspek yuridis formal. Oleh sebab itu, menyikapi keberadaan orang asing yang secara ilegal melakukan usahanya dengan menggunakan ijin tinggal sementara atau visa turis harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Kalau keberadaan orang asing yang ilegal di Jepara memang harus ditertibkan. Demikian pula keharusan legalisasi seluruh perusahaan asing yang melakukan aktivitas bisnis di Jepara.

Untuk kepentingan itulah, Pemda TK I, Jepara membentuk Tim SIPORA
(Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten Jepara) yang terdiri
dari:

- * Kakanim Klas 1 Semarang c.q. Kasi Wasdakim.
- * Kabag Perekonomian Setwilda Kabupaten Dati II Jepara.
- * Kabag. Ketertiban Umum Kabupaten Dati II Jepara.
- * Komandan Kodim 0719 Jepara c.q. Pasi Intel.
- * Kapolres Jepara c.q Kasad IPP.
- * Kajari Jepara c.q. Kasi Intel
- * Kepala Kantor Catatan Sipil.
- * Kepala Kantor Dep.Perindustrian dan Perdagangan Jepara.
- * Kepala Kantor Dep. Tenaga Kerja Kudus c.q. Kasi Perijinan.
- * Kepala Perwakilan BKPMJ Jateng di Jepara.

Kinerja Tim Koordinasi Orang Asing Kabupaten Jepara dalam kurun waktu awal bulan Juli 1997 sampai dengan saat ini, dapat digambarkan dalam berbagai langkah penindakan, pembinaan dan pengarahan sebagai berikut : (komunikasi pribadi, Kanim Semarang, 03-03-1999).

1. Tiga buah perusahaan yang perijinannya belum lengkap ditutup sementara dari kegiatannya yaitu:
 - 1) CV. Seanplay, desa Bawu, Kecamatan Batualit Jepara.
 - 2) CV. Kualitas mebel, desa Bawu, Kecamatan Batualit Jepara.
 - 3) PT. Jansen, desa Bandengan, Jepara.

Ketiga-tiganya diarahkan untuk melengkapi perijinan yang diperlukan untuk beroperasi di Jepara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penindakan terhadap tenaga kerja warga negara asing dengan KITAS ex Kamin lain (Jakarta) beroperasi di Kantor/perusahaan cabang di Jepara yang izinnya belum lengkap, dibina agar tidak beroperasi sebelum izin-izin perusahaannya di Jepara dilengkapi terlebih dahulu, yaitu :

- 1) Robert Maximilian Nider Huber Ryan, laki-laki warga negara Jerman, dikenakan tindakan karantina dan dideportasi serta ditangkal masuk Indonesia kecuali untuk investasi.
- 2) Murray William Savega, laki-laki warga negara New Zealand, dikenakan tindakan karantina dan penangkalan 1 tahun.
- 3) Tom Curis, laki-laki warga negara Australia, dilarang beroperasi di wilayah Jepara (Wilayah Kanim Semarang) selama perusahaan cabangnya di Jepara belum mempunyai izin.
- 4) Aslan Edward Sassoon, laki-laki warga negara Singapura dilarang beroperasi di wilayah Jepara (wilayah Kanim Semarang) selama perusahaan cabangnya di Jepara belum mempunyai izin.
- 5) Kramer Jurriaan Theodoor, laki-laki warga negara Belanda pemegang KITAS ex Knim Semarang, dilarang di wilayah Jepara selama IKTA yang dimiliki tidak meliputi Jepara.

3. Penindakan terhadap tenaga kerja warga negara asing yang memegang KITAS ex Kanim Semarang, bekerja pada perusahaan lain tanpa melalui prosedur mutasi dan alih sponsor.
 - 1) Lodevicus Antonius Leo Msrie Van Hengten, laki-laki warga negara Belanda, TKA pada CV. Sumber Rijeki tertangkap tangan bekerja pada PT Mebel Jawa Indah, dikenakan tindakan deportasi dan penangkalan.
 - 2) Anthony Pau Daly, laki-laki warga negara Australia, TKA pada PT Satin Abadi, tertangkap tangan bekerja pada CV. Yale & Co dikenakan tindakan deportasi dan penangkalan.
4. Penindakan dan pembinaan terhadap tenaga kerja warga negara asing yang menggunakan Multiple Visa:
 - 1) Antonius Chritianus Henricus Van Duppen, laki-laki warga negara Belanda, sponsor : PT Word Wide Furniture, dikenakan tindakan deportasi dan penangkalan, diizinkan masuk kembali dengan syarat untuk investasi.
 - 2) Martinus Johanse, Petrus Van Duppen, laki-laki warga negara Belanda, sponsor PT WordnWide Furniture, dikenakan tindakan deportasi dan penangkalan diizinkan kembali dengan untuk invetasi.
 - 3) Tootako Mizuguchi, laki-laki waga negara Jepang , pemegang Multiple Visa tertangkap tangan bekerja sebagai Quality Control pada PT Sakura Bintara Perkasa, Jepara dikenakan sangsi deportasi.

- 4) Wu Hien Tang, laki-laki warga negara Taiwan (ROC) bekerja dan berlaku sebagai investor pada PT Tri Upaya Sakti ternyata tersangkut perkara hutang kepada pimpinan perusahaan dikenakan tindakan karantina dan dideportasi.
 - 5) Dimitri Panteleev laki-laki warga negara Rusia pemegang Multiple Visa tertangkap tangan bekerja sebagai Quality Control PT Evina Manunggal, Jakarta bersyarat bekerja di cabang perusahaan tersebut yang ternyata juga belum mempunyai izin beroperasi di Jepara, dikenakan tindakan karantina dan dideportasi.
 - 6) Alexandre Rybkine laki-laki warga negara Rusia pemegang Multiple visa tertangkap tangan berkerja sebagai Qulity Control pad PT Evina Manunggal Abadi Jakarta ternyata juga belum mempunyai izin beropersi di Jepara dikenakan tindakan karantina dan dideportasi.
 - 7) Hsien Chang Shou laki-laki warga negara Tiwan tertangkap tangan tidak menunjukan paspor asli kebangsaannya, setelah diperiksa di Kanim Semarang yang bersangkutan dapat menunjukan dengan Multiple Visa .
5. Penindakan terhadap tenaga kerja warga negara asing pemegang visa kunjungan, yaitu:
- 1) Leonardo Cometa, Jr laki-laki warga negara Philipina kedapatan bekerja pada PT The Mahogany, dikenakan tindakan deportasi.
 - 2) Avelindo Lobardio laki-laki warga negara Philipina kedapatan bekerja pada PT The Mahogany dikenakan tindakan deportasi.

- 3) Binveido T, Guino laki-laki warga negara Philipina kedapatan bekerja pada PT The Mahogany dikenakan tindakan deportasi.
 - 4) Eric Fransiscus laki-laki warga negara Belgia bekerja sebagai Computer Analis pada PT Satin Abadi, dikenakan tindakan karantina dan dideportasi.
 - 5) Malcom alexander Lavis laki-laki warga negara Singapura membuka usaha tanpa izin dikenakan tindakan deportasi.
 - 6) Loh Song Huat laki-laki warga negara Singapura membuka usaha tanpa izin dikenakan tindakan deportasi.
6. Penindakan terhadap tenaga kerja warga negara asing pemegang fasilitas bebas visa Kunjungan singkat (BVKS), yaitu :
- 1) Lex Ross MC laki-laki warga negara Amerika Serikat bekerja pada CV Agree Jaya Mustika , Wanarejo Jepara dikenakan tindakan deportasi.
 - 2) Gil Soo Hong laki-laki warga negara Korea Selatan dikenakan tindakan deportasi
7. Pembinaan tenaga kerja warga negara asing pemegang KITAS ex Kanim Semarang ternyata menanamkan modalnya melalui istrinya yang warga negara Indonesia, yaitu :
- 1) Jobt Molerr laki-laki warga negara Jerman semula hidup bersama tanpa menikah secara resmi dan menempuh jalan PMA dengan mempekerjakan karyawan lebih 200 orang dan menjalin kemitraan dengan 60 perajin.

- 2) Van Leuken laki-laki warga negara Belanda telah berhasil mengalihkan perusahaan PT Gerisha Mulia menjadi perusahaan PMDN mengikuti arahan dan pembinaan Tim Sipora Kab. Jepara.
- 3) Arend Jacobus Mooij laki-laki warga negara Belanda menanamkan modalnya melalui istrinya Nr. Anak Agung Sagung Raka Mertawati, warga negara Indonesia yang dinikahi di Belanda 14 tahun yang lalu. Istrinya mendirikan PT Alam Agung Jaya di Bali dan membuka cabangnya di Jepara Arend Jacobus Mooij sebagai Quality Controlnya. Perusahaannya di Jepara mempekerjakan 800 orang staf dan menjalin kerjasama dengan 400 orang perajin rumahan. Terkadang Arend Jacobus melakukan kegiatan manajemen.

Sementara Pemerintah Daerah membuat kebijaksanaan yang pada hakekatnya untuk mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan cara menjadikan koperasi sebagai usaha andalan. Bupati Kepala daerah berharap semua urusan yang terlibat dalam pengembangan industri kerakyatan, khususnya ukir kayu dan permebelan menyatukan sikap dan persepsi agar dapat bahu-membahu menghadapi tantangan yang datang dari pihak manapun termasuk pasar era pasar global.

Jepara sebagai pemasok 2% keperluan pasar mebel dunia, haruslah dapat ditingkatkan jangan sampai peluang tersebut direbut oleh negara berkembang lainnya.

Pendirian Pemda Jepara terhadap keberadaan dan perkembangan mebel adalah:

1. Berupaya terus memberdayakan usaha mebel terus bertumbuh kembang dalam menyongsong pasar global dengan penggalakan ekspor.

2. Penerapan sistem mebel yang banyak menyerap tenaga kerja dalam rangka penanggulangan pengangguran .
3. Mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi perkembangan industri itu sendiri.

Dalam kondisi sebagaimana paparan di atas dibutuhkan hukum yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud mengabdikan pada usaha-usaha memperingan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan-kebijakan sosial seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial termasuk kelompok sosial yang dikesampingkan dan terlantar serta perlindungan lingkungannya.

Dalam konsepsi hukum responsif ditekankan pentingnya makna sasaran kebijaksanaan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijaksanaan serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijaksanaan.

Lebih khusus lagi dalam hal hukum yang responsif akan memelihara tanggung jawab moral dan etika tertinggi dalam 2 jalan yaitu :

1. Menguasai paham yang berkaitan dengan agama dari moralitas umum.

Pertumbuhan kekuasaan dari kecenderungan tujuan untuk mengurangi persepsi dan simbol. Hukum bertujuan menerima bahwa adat dan moralitas, sejauh mereka mengklaim wibawa/kuasa itu sah, menjadi dibenarkan dengan suatu beban yang rasional dari biaya dan keuntungan. Efek pertama adalah tekanan dari perasaan

luka oleh diskriminasi dari lawan kode etik. Hukum mengatur, kemudian dibudayakan dalam pengetahuan yang tepat.

Hukum responsif menggali alternatif artinya mencapai hukum akhir non kriminal dari regulasi yang ada di daerah. pada kenyataannya pencarian alternatif ini mungkin baik untuk menambah kepastian hukum.

2. Memberanikan pada suatu "problem center" dan pendekatan sosial integratif untuk krisis bagi ketertiban umum.

Pada kondisi demonstrasi-demonstrasi dan krisis sosial lainnya, perlu suatu hukum yang mengecam peraturan yang salah ini menimbulkan ketidaktaatan sebuah legitimasi, artinya lebih baik disiapkan untuk perjuangan yang moderat siap dinegosiasikan dalam kepentingan dari pengundangan kembali dalam sebuah kerangka kerjasama. Asumsi ini menyatakan bahwa pemerintah publik tidak kaku tetapi terbuka untuk negosiasi kembali, juga bahwa mereka akan lebih baik memperhitungkan dari kepentingan sosial, pola ini meminta suatu model dari banyak kelompok struktur masyarakat, termasuk lapisan dalam realisasi dan penegakan legitimasi dan konflik masyarakat. Pengabdian perintah mungkin dilihat sebagai perbedaan pendapat dan aski masyarakat tidak ditolak tetapi muncul sebagai seni-negosiasi, diskusi dan kompromi. (Nonet & Selmik, 1986:92-93).

Sementara itu kenyataan empirik mengungkapkan bagaimana berkembang apa yang disebut dengan *a polity orientation*. Lasswel menyatakan bahwa para ahli kebijaksanaan harus memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah manusia

dalam masyarakat fundamental, serta berupaya untuk membantu terwujudnya harkat kemanusiaan dalam teori dan praktik. (Daniel Larner dan Harold Laaswell dalam Bambang Sunggono, 1994 :27). Pegharapan demikian itu tentunya menjadi penting tidak hanya untuk keperluan pengambilan keputusan atau merumuskan kebijaksanaan, tetapi juga untuk implementasinya. Implementasi kebijaksanaan public pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah dalam berbagai jenjang hingga pemerintah yang terendah. Disamping itu setiap kebijaksanaan adalah wujud peraturan perundang-undangan.

Implementasi kebijaksanaan dalam kaitan ini dibedakan dari implikasi sebagaimana disinggung di atas. Suatu Proses implementasi (Kebijaksanaan) merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijaksanaan publik. Kegiatan dari suatu kelompok aksi yang ditujukan untuk mempercepat atau memperlambat (menghambat) pelaksanaan suatu kebijaksanaan tertentu menjadi bagian dari proses implementasi dan bukan dari implementasi itu sendiri.

Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut ini. (Williams dan Elmore dalam Bambang Sunggono, 1994 : 139).



Dari skema tersebut diatas terlihat, bahwa proses implementasi di mulai dengan suatu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hal kebijaksanaan yang segera atau disebut *policy performance*. Secara konkret antara lain untuk menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Perubahan taraf kesejahteraan masyarakat dapat juga dianggap sebagai hasil akhir kebijaksanaan *policy outcome* atau *policy impact*.

Dalam kaitan ini, masing-masing kelompok mempunyai kepentingan tertentu terhadap program dan atau isi kebijaksanaan publik, dimana masing-masing mungkin berusaha untuk mencapainya dengan cara mengajukan tuntutan-tuntutan atau kebutuhan-kebutuhan mereka dalam prosedur alokasi sumber daya. Bahkan seringkali terjadi bahwa tujuan-tujuan dari kelompok itu bertentangan satu sama lain, dimana hasil akhir dari proses pertentangan ini serta akibatnya mengenai siapa yang akan ditentukan oleh dukungan strategi, sumber daya dan posisi kekuasaan setiap aktor/kelompok yang terlibat. Apa yang diimplementasikan dengan demikian adalah merupakan hasil dari suatu perhitungan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok saling berkompetisi terhadap sumber daya yang bersifat terbatas. Di samping itu, proses kompetisi juga meliputi daya tanggap dari para pejabat pelaksana atau tindakan-tindakan para elit politik yang semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan tertentu.

Konsekuensi untuk membuat kebijaksanaan efektif yang lebih rasional merupakan semua perbuatan kebijaksanaan publik juga menimbulkan hal-hal yang

ditimbulkan oleh interaksi sistem administrasi dan sistem politik. (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadijaya, 1988: 48).

Suatu peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai wujud konkret kebijaksanaan publik atau suatu yurisprudensi yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijaksanaan publik. Disamping sebagai alas dasar, juga menjadi peredam dalam konflik-konflik yang terjadi berkaitan dengan implementasi suatu kebijaksanaan publik.

Konsekuensi dari upaya menumbuhkan konsistensi bahkan kepatuhan negosiasi penyesuaian-penyesuaian dan sebagainya.

Aspek lain yang harus juga diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan kebijaksanaan adalah tanggapan (*responsiveness*). Jadi idealnya lembaga-lembaga pelayanan publik semisal berokrasi dalam hal ini Pemerintah Daerah. PBKPM/BKMD dan kantor Imigrasi harus tanggap terhadap kebutuhan dari pihak-pihak yang mereka butuhkan/harapkan menerima manfaat sebagaimana upaya untuk melayani sebaik mungkin.

Dengan mencermati fenomena sosial dari maksudnya investor asing pada kehidupan masyarakat Jepara, tidak hanya membawa implikasi dalam bidang ekonomi dan hukum saja, melainkan mengimbas pula pada bidang sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu maka dalam kondisi sebagaimana paparan di atas dibutuhkan hukum yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat namun tetap mengkaji secara hati-hati perubahan sosial masyarakat

dengan maksud mengabdikan pada usaha-usaha memperingan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial serta memperhatikan keharmonisan masyarakat, seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial termasuk kelompok sosial yang dikesampingkan dan terlanjar serta perlindungan terhadap lingkungannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian pada paparan di atas, mulai Bab I sampai Bab III, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Peningkatan aktivitas perajin dapat dijelaskan dengan kondisi-kondisi :
 - a. *Hierarchy of needs* dapat diterapkan untuk menjelaskan motivasi perilaku dari para perajin di Jepara, estimasi ini masih tampak logis dan dapat diterapkan pada motivasi para perajin dalam melaksanakan kegiatannya serta dalam melakukan kerjasama dengan pengusaha baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Namun perlu disadari pula bahwa ada hal-hal lain yang mempengaruhi bagaimana dorongan itu menjadi kinerja, dalam hal ini faktor-faktor kemampuan dan pelatihan, kesempatan, perlakuan yang adil, dan imbalan (balas jasa) yang tinggi akan mempengaruhi prestasi.
 - b. Lingkungan sosial memberikan peluang dan apabila ketrampilan sudah didapat dengan cara magang, maka mereka akan mencoba dan berani membuka usaha. Berkat dorongan seperti itulah, maka perajin ukir semakin tumbuh berkembang. Hubungan yang terjalin baik secara sengaja maupun tidak disengaja dengan orang asing, akan memberikan peluang mereka melakukan kerjasama dengan orang/pengusaha asing.

2. Bahwa secara sosiologis, persepsi masyarakat perajin terhadap kehadiran investor asing di pengaruhi oleh kepentingannya. Perbedaan persepsi dari para pelaku aktivitas industri kerajinan ukir kayu dapat dijelaskan dengan kesimpulan bahwa semakin berbeda pengalaman yang orang miliki, makin berbeda pula persepsi dan evaluasi alternatif perilaku dan hubungannya. Makin besar perbedaan persepsi dan evaluasi, maka kemungkinan makin besar pula variabilitas dalam apa yang dianggap sebagai keadilan dalam kehidupan sehari-hari para perajin, pengusaha lokal dan investor asing.

Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat Industri Ukir Jepara menimbulkan adanya kelompok-kelompok masyarakat, yang dapat dibedakan sebagai berikut :

- A. Ada kelompok pengusaha yang tidak menghendaki orang asing melakukan usaha memproduksi mebel di Jepara dengan alasan :
 - a. Dengan adanya orang asing melakukan kegiatan usaha mebel dengan kedok pribumi, maka pengusaha lokal pribumi asli (kelas menengah-besar) menjadi terdesak dan tersisih, karena kalah bersaing dalam manajemen usaha, kemampuan dalam memberikan upah terhadap perajin/pekerja atau tenaga kerjanya, kalah dalam perolehan bahan baku dan kemampuan menyerap hasil produksi perajin atau pengusaha kecil-rumahan.

- b. Dengan adanya orang asing melakukan usaha dengan pola PMA/PMDN, yang diijinkan memproduksi mebel sejak dari hulu sampai ke hilir, pengusaha pribumi/lokal terdesak dan kalah bersaing dalam manajemen, peralatan yang berupa mesin-mesin berteknologi modern, kemampuan dalam memberikan upah terhadap perajin/tenaga kerja, perolehan bahan baku, kemampuan menyerap hasil produksi perajin/pengusaha rumahan.
 - c. Dampak sosial budaya sebagai dampak ikutan kehadiran orang asing/investor asing di Jepara menurunkan derajat moral orang Jepara. Pergaulan yang bebas antara orang asing dengan warga masyarakat Jepara banyak mengakibatkan lahirnya anak diluar ikatan perkawinan yang sah.
- B. Adanya kelompok pengusaha/masyarakat yang justru mengharapkan kehadiran orang asing melakukan kegiatan usahanya di Jepara dengan alasan :
- a. Perajin/pengusaha kecil rumahan lebih merasa beruntung langsung atau mensuplai hasil produksinya kepada perusahaan PMA/PMDN/orang asing dengan pola kemitraan atau sub-kontrak.
 - b. Dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan maka pengusaha kecil rumahan dapat menaikkan upah karyawan/pekerjanya.
- Pada gilirannya perajin mampu tumbuh menjadi pengusaha menengah bahkan yang lebih beruntung mampu menjadi pengusaha besar.

3. Hubungan kerja antara perajin dan orang/pengusaha asing dilakukan dengan :
 - a. kerja sama patungan dalam bentuk PMA/PMDN untuk memproduksi barang kerajinan/mebel.
 - b. Pengusaha asing mendirikan PMA murni, pengusaha lokal atau perajin sebagai mitra/sub kontrak

Sub kontraktor dapat dilakukan secara :

1. *Sub-Contracting Up Stream,*

Yaitu sub kontrak antara industri kecil dan industri sedang atau besar bilamana bahan dasar/setengah jadinya dibuat oleh industri kecil dan finishingnya dibuat oleh industri sedang atau besar.

2. *Sub-Contracting Down Stream,*

Yaitu bahan setengah jadinya dibuat oleh industri sedang atau besar, sedang finishingnya atau barang jadinya dibuat oleh industri kecil.

Sedangkan kerjasama yang dilakukan secara ilegal, misalnya dengan cara-cara :

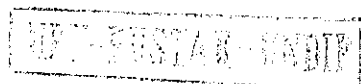
- melakukan “kawin semu”, antara orang asing dengan WNI, untuk memudahkan mendirikan perusahaan lokal.
 - Diangkat direktur “boneka” (seorang WNI), untuk mempermudah perijinan.
4. Posisi tawar menawar antara perajin dengan orang/investor asing sangat dipengaruhi oleh pola kerjasama yang dilakukan.

Pada pola kerjasama patungan, posisi para pihak ditentukan oleh besarnya saham yang dimilikinya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan investasi asing. Namun demikian, pada industri kerajinan ini memiliki spesifikasi pola kerja sama patungannya, mengingat Perajin Jepara memiliki keunggulan dalam beberapa hal, antara lain :

1. Budaya ukir dan kerajinan kayu yang sudah dimiliki masyarakat secara turun temurun.
2. Sangat mudah menyerap pengetahuan tentang permebelan dan kerajinan kayu.
3. Dalam hal menjiplak/meniru model yang dipesan sangat sempurna.
4. Bahan baku relatif mudah didapat dengan harga relatif murah.

Keunikan dari investasi di bidang kerajinan kayu ini adalah bahwa teknologi dasar dari obyek investasi justru dimiliki oleh partner lokal. Sedangkan kelebihan yang dimiliki partner asing adalah permodalan, manajemen dan pemasaran khususnya untuk ekspor.

Investor asing datang berbisnis di Jepara lebih banyak disebabkan oleh faktor insting bisnis yang kuat dari keunggulan yang dimiliki masyarakat perajin Jepara mereka mendapatkan profit tinggi dan kualitas barang yang diinginkan.



Masing-masing bentuk kerjasama tersebut menimbulkan keragaman pula dalam *bargaining power* para pihak, sebagaimana dikemukakan dalam introduksi teori bahwa kebebasan berkontrak hanya dapat dicapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang.

Ditinjau dari aspek upah tenaga kerja maupun perajin yang melakukan kerjasama dengan orang/pengusaha asing yang mempunyai bentuk jelas dan legal, mereka justru merasakan keuntungan, karena upah yang diterima bagi tenaga kerja diatas upah minimum regional.

Namun demikian, apabila dilihat dari aspek makro, sebagai kebijaksanaan pemerintah, maka aspek upah atau harga produk yang lebih tinggi tidak menjamin adanya keadilan pada posisi para pihak. Selama pengambil keputusan adalah pihak yang kuat dalam modal, yaitu pengusaha asing maka posisi perajin yang sebenarnya justru memiliki ketrampilan dan teknologinya berkedudukan lemah. Oleh karena itu maka diperlukan peran pemerintah.

Dalam kondisi sebagaimana paparan di atas dibutuhkan peranan pemerintah dengan terus mengkaji hukum yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud mengabdikan pada usaha-usaha memperingan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial termasuk perlindungan terhadap lingkungannya.

Disamping itu diperlukan konsep hukum, institusi dan proses dari hukum dalam mencegah, memperkecil dan konflik, bagaimana mekanisme hukum timbul

dan diciptakan, bagaimana tujuan tersebut berkaitan dengan mekanisme non-legal komplementer, dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai lebih efektif.

Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih operasional pada tingkat pelaksanaan sebagai wujud konkret kebijaksanaan pemerintah, berkaitan dengan implementasi suatu kebijaksanaan publik, di samping sebagai alas dasar, juga menjadi peredam dalam konflik-konflik yang terjadi berkaitan dengan implementasi kebijaksanaan publik.

C. Saran-Saran

1. Permasalahan menyangkut legalitas bentuk usaha dan jenis profesi dikalangan investor maupun tenaga kerja warga negara asing yang menimbulkan konflik di Kabupaten Jepara hendaknya diselesaikan dengan cara-cara persuasif, dialog dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, aparatur pemerintah dan investor.
2. Perlu dukungan dan bantuan dari berbagai kalangan dan instansi terkait untuk segera menyusun dan memberlakukan peraturan pada tingkat daerah dengan Peraturan Daerah tentang kegiatan usaha dengan pola sistem kemitraan antara perusahaan menengah/besar dengan perusahaan kecil yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Memberikan batasan-batasan dan pengawasan bagi orang/pengusaha asing yang ada di Jepara, misalnya dengan :
 - a. Lokalisasi wilayah Perusahaan asing.
 - b. Melakukan pengawasan dan penertiban secara terus menerus terhadap keberadaan orang asing, dalam kaitannya dengan status orang/pengusaha asing.
4. Pemerintah mendirikan “problem center” dengan pendekatan integratif untuk menampung dan menelusuri titik-titik penyebab konflik dengan asumsi pemerintah tidak kaku tetapi terbuka untuk negosiasi, memperhitungkan kepentingan sosial dengan melibatkan banyak kelompok dalam struktur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Dennis. 1982, Small Industry in developing Countries, World development. Vol.10, No.11.
- Black, Henry Compbell. MA, 1968. Black's Law Dictionary Fouth.Ed. The Publisher Editional Staff, Boston College, St Paul Minn.
- Blau, Peter. M. dan Marshall W. Meyer, 1956. Bureucracy in Modern Sociaty, Random House, New York
- Faisal, Sanfiah, 1990. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi, YA3. Malang.
- Gunardi, Harry Seldadyo, 1996. Industri Kecil Indonesia, Definisi, Transformasi dan Policy, CEES Jakarta.
- Haryatmoko, J. 1986. Manusia dan Sistem, Kanisius, Yogyakarta.
- Harijan, Rusli, 1996. Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1972,. Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia. Alumni, Bandung.
- Humble, John, 1973, Audit Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Seri Pustaka Eksekutif. London.
- Johnson, Doyle Paul, 1981. Sociological Theory ClassicalFounders and Contemporary Perspectives, John Wiley & Sons. Inc, Florida.
- Karmadi, Agus Dona & M. Soenata Kartadarmadja, 1985. Sejarah perkembangan Seni Ukir di Jepara, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, proyek Inventarisasi dan Sejarah Nasonal, Depdikbud, Jakarta.
- Koentjaraningrat, ed. 1989. Metode-Metode Penelitian masyarakat, Cet. 9, Gramedia, Jakarta.
- Mangunwihardjo Suyudi, 1997, Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UNDIP, Semarang.
- Merton, Robert K, 1968. Social Theory and Social Structure, Free Prees, New York.

- Moleong, Lexi. J. 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rasda Karya*, Bandung.
- Mulyana W. Kusuma dan Paul S. Baut (ed), 1988, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, YLBHI Jakarta.
- Nasution, S, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Notosapoetro, Ismangoen, 1984. *Sebuah Model Kerja Sama Sub Contracting di Jateng*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Notosapoetro, Ismangoen, 1987, *Prospek dan Program Pengembangan Industri Kecil melalui Sistem Sub Kontraktor FAMD*, Jakarta.
- Pemda Dati II Jepara, 1974, *Risalah dan Kumpulan Data Tentang perkembangan Seni Ukir Jepara*, Jepara
- Pemda Dati II Jepara, 1988, *Data Statistik Jepara dalam Angka*, Jepara.
- Persons, Talcott, 1969, *Politics and Social Structure*, Free Prees, New York.
- Persons, Talcott, 1970, *Social Structure and Personality*, New York Prees, New York.
- Radjaguguk, Erman, 1996, *Hukum Investasi di Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Pengadilan*, FH. UI, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1987, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1990, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, (ed) *Hukum dan Perspektif Sosial*, Alumni Bandung
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan Handoko, Honi T., 1996, *Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Perilaku*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
- Ritzer, George, Penyadur Alimandan, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Prees, Jakarta.
- Rifai, M, 1995, *Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan*, Gajdah Mada University Prees, Yogyakarta.
- Soebekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Soebekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya, Bandung

- Soedadyo P, 1987, Pola Management Kerjasama Bapak Angkat-Anak-anak Angkat, Makalah Seminar, Semarang.
- Soemodiningrat, Gunawan, 1996, Perlu Lembaga Keuangan Kerakyatan, dalam Media KUK, No. 18 th ke-IV Desember 1996.
- Soebagiyo, Fellix untung, 1987, Dunia Usaha Kecil : Satu Tujuan dari Segi Hukum, dalam Sumantoro Hukum Ekonomi, UI Prees, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, Beberapa Masalah dalam studi Hukum dan Masyarakat, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Sumantoro, 1984, Kerjasama Patungan dengan Modal Asing, Alumni Bandung.
- Usman, Marzuki, 1997, Komitmen Pengembangan Usaha Kecil, dalam Kita Sukses Pengusaha Kecil, Institut Bankir Indonesia, Jurnal Keuangan dan Moneter, IBI, Jakarta.
- Turk, Austin. T. 1969, Kriminalitas dan Ketertiban Hukum, Rand Me Nally, Chicago.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 1974, Penelitian Hukum; Sebuah Tipologi, Masyarakat Indonesia No. 4 UNAIR, Surabaya.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 1980, Hukum dan Metode-Metode Kajian, Kertas Kerja BPHN, Jakarta.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 1990, Penggunaan Metodologi Penelitian Menurut Tradisi Sains dalam Ilmu Hukum dan Ilmu-Ilmu Sosial, dimuat dalam Refleksi Hukum, No. 2 UKSW, Salatiga.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 1994, Tipologi Penelitian Hukum, UNAIR, Surabaya.

Hasil-Hasil Penelitian

- Thohir, Mudjahirin, 1994, Hubungan Ritus dalam Aktivitas Ekonomi, Kasus Masyarakat Pengrajin Ukir di Jepara, Fakultas Sastra – UNDIP, Semarang.
- Dawam Rahardjo dkk, Profil Industri Kecil, 1993.
- Dawam Rahardjo dkk, Penelitian Kerajinan Batik, 1976.

Darmawan, I Ketut Supasti, Peranan Deregulasi dan Implementasi.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang No.11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan UU No.1 Tahun 1967 Tentang PMA.

Undang-Undang No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

PP No.20 Tahun 1994, Tentang Pemilikan Saham dalam Rangka Perusahaan yang didirikan dalam Rangka PMA.

PP No .50 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan PMA

Kep. Ketua BKPM No.21/SK/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA.

Kep. Presiden RI No.97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan PMDN dan PMA.

Kep. Manives/Ketua BKPM No. 22/SK/1996, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 1996.

Keputusan Ketua BKPM No.21/SK/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam Rangka PMDN dan PMA.

Keputusan Presiden RI No.97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Keputusan Ketua BKPM No.15/SS/1993 Tentang Tata Cara Permohonan PMDN dan PMA.

Keputusan Presiden RI. No. 17 tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional yang Sama Seperti PMDN.

Keputusan Presiden RI No.50 Tahun 1987 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan PMA Untuk Diberi Perlakuan Sama Seperti Perusahaan PMDN.

Keputusan Ketua Badan koordinasi Penanaman Modal No.5/SK/1987 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan PMA.

Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.16/SK/1989 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan PMA.

Surat Keputusan Ketua BKPM No.08/SK/1988 Tentang Pelaksanaan Penetapan Jangka Waktu Ijin Perusahaan PMA.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.747/KMK/04/1990 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Investasi di Wilayah Tertentu.

Surat Keputusan Ketua BKPM No.21/SK/1991 Tentang Persyaratan Investasi Minimal Bagi Perusahaan PMA.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP.291/MEN/1991 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka PMA.

Surat Kabar

Kompas, 26 Juni 1997

Kompas, 12 April 1998

Suara Merdeka, Jum'at, 12 Pebruari 1999 hal.I

Wawasan, Sabtu, 13 Pebruari 1999

Wawasan, 2 Maret 1999

Suara Merdeka, 18 Desember 1998

Info Mitra, Ed. Desember 1998

Kedaulatan Rakyat, 23 Pebruari 1999

Suara Merdeka, 1 Maret 1999 hal.IV